

i  
1440

N

# SEJARAH

Perlawanan Terhadap  
Imperialisme dan  
Kolonialisme di  
**DAERAH ISTIMEWA ACEH**

SEJARAH  
Perlawanan Terhadap  
Imperialisme dan  
Kolonialisme  
SEJARAH  
Perlawanan Terhadap  
Imperialisme dan  
Kolonialisme

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

1982/1983

Imper  
onialis  
RAH

BIBLIOTHEEK KITLV



0334 6424





MILIK DEP. P DAN K  
TIDAK DIPERDAGANGKAN

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

# SEJARAH PERLAWANAN TERHADAP KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI DAERAH ACEH

Konsultan : Dr.T. Ibrahim Alfian MA  
Tim Penulis :  
Ketua : Drs. Zakaria Ahmad  
Sekretaris/Anggota : Drs. Rusdi Sufi  
Anggota : Drs. Muhammad Ibrahim  
Drs. Nasruddin Sulaiman



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
1982/1983



## SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1982

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio  
NIP. 130119123.



## KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di berbagai wilayah di negara kita.

Bagi bangsa Indonesia yang memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya kembali pada tanggal 17 Agustus 1945, sesudah berjuang melalui berbagai perlawanan fisik, maka sejarah perlawanan itu sendiri menempati kedudukan utama dan mempunyai nilai tinggi. Sepanjang sejarah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, telah terjadi berbagai perlawanan, besar maupun kecil, sebagai reaksi terhadap sistem imperialisme dan kolonialisme bangsa asing. Pengalaman-pengalaman itu merupakan modal yang berharga dalam usaha mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah melakukan inventarisasi dan dokumentasi perlawanan itu sebagai kejadian sejarah yang akan memberikan kesadaran akan jiwa kepahlawanan, terutama pada generasi muda, mengenai kesinambungan sejarah dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Juni 1982

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi  
Sejarah Nasional

Penyunting :

1. Dr. T. Ibrahim Afian

2. Sutrisno Kutoyo

3. Drs. M. Soenyata Kartadarmada



Gambar Kullit

Penyunting :

1. Dr. T. Ibrahim Alfian
2. Sutrisno Kutoyo
3. Drs. M. Soenyata Kartadarmadja



## DAFTAR ISI

	Halaman
PERMUKIAN	
DAFTAR PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
PENDAHULUAN	1
BAB I. PERLAWANAN TERHADAP PORTUGIS	
A. Kontak Dan Konflik Aceh - Portugis	5
B. Akhir Dan Pada Konflik	8
BAB II. PERLAWANAN TERHADAP BELANDA	13
A. Latar Belakang Hubungan Aceh - Belanda	13
B. Konflik Sebelum Perang Aceh - Belanda	41
C. Masa Perang 1873 - 1912	51
D. Beberapa Kasus Perlawanan Mingsat Jepang Musuk	89
BAB III. PERLAWANAN TERHADAP JEPANG	95
A. Selayang Pandang Latar Belakang Sosial Aceh Menjelang Kehadiran Jepang	95
B. Gambar Kulit Aceh Terhadap Jepang	102
Oleh :	
Hafid Alibasyah	111
C. Kesimpulan	123
D. Penutup	144

Gambar Kuli  
Oleh :  
Hafid Alibasyah

## DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
PENDAHULUAN	1
BAB I. PERLAWANAN TERHADAP PORTUGIS	5
A. Kontak Dan Konflik Aceh – Portugis ..	5
B. Akhir Dari Pada Konflik .....	28
BAB II. PERLAWANAN TERHADAP BELANDA	33
A. Latar Belakang Hubungan Aceh – Belanda .....	33
B. Konflik Sebelum Perang Aceh – Belanda .....	41
C. Masa Perang 1873 – 1912 .....	51
D. Beberapa Kasus Perlawanan Hingga Jepang Masuk .....	89
BAB III. PERLAWANAN TERHADAP JEPANG	95
A. Selayang Pandang Latar Belakang Situasi Aceh Menjelang Kehadiran Jepang .....	95
B. Perlawanan Rakyat Aceh Terhadap Jepang .....	102
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	111
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	133
DAFTAR INFORMAN .....	144







## PENDAHULUAN

Kalau kita menelusuri sejarah penjajahan di Indonesia, tampak bahwa telah terjadi serentetan perlawanan dari bangsa Indonesia, baik besar maupun kecil, sebagai reaksi mereka terhadap sistem penjajahan itu. Pada umumnya penjajahan itu berlangsung melalui sistem kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan Jepang. Perlawanan-perlawanan itu merupakan tindakan-tindakan dari mereka yang tertekan dan tertindas, yang diberikan dalam usaha untuk membebaskan diri dari situasi yang demikian ke situasi yang mereka cita-citakan, yaitu bebas dari penekanan dan penindasan.

Meskipun dalam kadar dan sasaran yang berbeda-beda, tetapi perlawanan itu dapat dijumpai hampir pada setiap daerah di Indonesia, termasuk di daerah yang sekarang disebut dengan nama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Oleh karena perlawanan-perlawanan itu telah melahirkan pengalaman-pengalaman unik tersendiri bagi tiap-tiap daerah, maka perlu diadakan perekonstruksian dalam rangka untuk pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap perlawanan itu kepada generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Maka dalam hubungan inilah Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, telah merintis jalan ke arah usaha perekonstruksian itu pada beberapa daerah di Indonesia, termasuk di dalamnya Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Daerah Aceh yang terletak di ujung bagian utara pulau Sumatera, sebagai bagian paling ke barat dan paling utara dari kepulauan Indonesia, atau antara  $95^{\circ} 13'$  dan  $98^{\circ} 17'$  bujur timur dan  $2^{\circ} 48'$  dan  $5^{\circ} 40'$  lintang utara, merupakan pintu gerbang sebelah barat kepulauan Indonesia. Maka dalam sejarahnya daerah Aceh telah banyak didatangi oleh berbagai suku bangsa asing terutama dalam kaitan dengan hal perdagangan dan diplomasi. Namun di antara para pendatang asing tersebut dalam perkembangannya telah mempraktekkan sistem kolonialisme dan imperialisme di kawasan tersebut. Maka oleh karenanya telah menimbulkan reaksi/antagonisme dari pihak Aceh berupa perlawanan-perlawanan terhadap bangsa-bangsa yang mempraktekkan sistem tersebut, dalam rangka mempertahankan eksistensi mereka.

Adapun skope temporal pendeskripsian sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme tersebut di Daerah Istimewa Aceh, mencakup suatu periode yang panjang, meskipun terputus-putus/diskontinue, yaitu semenjak awal abad ke XVI, perempatan pertama abad ke XVII, akhir abad ke XIX dan awal hingga pertengahan abad ke XX; yakni sejak kedatangan bangsa Barat pertama kali ke Aceh (1509) hingga masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia (1945).

Sedangkan skope spatial meliputi hampir keseluruhan wilayah administrasi yang sekarang disebut dengan nama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yakni yang terdiri dari 8 kabupaten: 1. kabupaten Aceh Besar, 2. kabupaten Pidie, 3. kabupaten Aceh Utara, 4. kabupaten Aceh Tengah, 5. kabupaten Aceh Timur, 6. kabupaten Aceh Barat, 7. kabupaten Aceh Selatan dan 8. kabupaten Aceh Tenggara. Namun karena tidak semua wilayah ini mempunyai peranan yang sama dalam perlawanan-perlawanan ini, maka titik berat uraiannya juga menjadi tidak sama.

Dalam rangka mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Daerah Istimewa Aceh, team peneliti telah melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu pertama studi kepustakaan, dan kedua studi lapangan/wawancara ke kabupaten-kabupaten dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh.

Selama studi kepustakaan sejumlah arsip, buku-buku dan artikel-artikel yang tersimpan pada beberapa perpustakaan di Banda Aceh, seperti Perpustakaan Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh (PDIA), Perpustakaan Museum Negeri Aceh, Perpustakaan Negara Banda Aceh, Perpustakaan Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh dan Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, telah diteliti dan dipelajari untuk diambil/dikumpulkan data-data yang berkaitan dengan Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme Dan Imperialisme di Daerah Istimewa Aceh. Selain itu selama studi lapangan di daerah-daerah dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, team peneliti juga telah memanfaatkan beberapa perpustakaan pribadi-pribadi, terutama dari tokoh-tokoh dan para cendekiawan serta intelektual di Aceh. Sejumlah arsip-arsip dan buku-buku serta artikel-artikel yang berhasil dikumpulkan telah dicantumkan pada bahagian Daftar Kepustakaan dalam naskah ini.

Dalam kegiatan penelitian lapangan, telah dilakukan sejumlah wawancara dengan beberapa tokoh/pemimpin setempat guna mendapat keterangan yang lebih terperinci. Sehubungan dengan para informan ini, mengingat antara lain agar dapat memberikan keterangan yang lebih mendekati kebenaran, maka mereka yang dipilih umumnya berumur sekitar 55 tahun ke atas; Adapun nama-nama mereka dapat dilihat pula pada bahagian Daftar Informan pada bagian naskah ini.

Setelah team peneliti berhasil mengumpulkan sejumlah sumber, maka diadakan penilaian terhadap sumber-sumber itu berdasarkan kritik sumber yang lazim digunakan dalam suatu penulisan sejarah kritis. Kritik sumber ini dilakukan baik secara intern maupun secara ekstern. Maka untuk ini anggota team peneliti telah melaksanakan serangkaian diskusi sehingga berhasil memisahkan antara sumber-sumber yang meragukan kebenarannya dengan sumber-sumber yang mengandung kebenaran, sejauh yang dapat dicapai. Selanjutnya melalui proses interpretasi para anggota team merumuskan dan menyeleksi fakta-fakta untuk disinteheskan atau dirangkaikan dalam bentuk penyusunan naskah Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme Dan Imperialisme Di Daerah Istimewa Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian baik lapangan maupun kepustakaan, sesuai dengan data yang tersedia, maka ditetapkan adanya 3 perlawanan yang menonjol yang terdapat di Daerah Istimewa Aceh, yaitu Perlawanan terhadap Portugis, Belanda dan Jepang. Maka sesuai dengan hal itu penulisan ini dibagi dalam bab-bab yaitu sebagai berikut:

## PENDAHULUAN

### BAB I PERLAWANAN TERHADAP PORTUGIS

### BAB II PERLAWANAN TERHADAP BELANDA

### BAB III PERLAWANAN TERHADAP JEPANG.

## BAB I PERLAWANAN TERHADAP PORTUGIS

### A. Kontak Dan Konflik Aceh – Portugis

Aceh terletak di ujung sebelah utara pulau Sumatra, merupakan bahagian yang paling utara dan paling barat dari kepulauan Indonesia. Di sebelah baratnya terbentang lautan Hindia, sedang di sebelah utara dan timurnya terletak Selat Malaka. Sudah semenjak zaman kuno Selat Malaka merupakan jalan perniagaan yang ramai, yang banyak dilalui kapal dagang dari berbagai negeri Asia. Tempat-tempat di sepanjang perairan Selat Malaka, silih berganti menempati kedudukan sebagai pelabuhan tempat mengambil perbekalan bagi kapal-kapal yang lewat di sana. Salah satu yang terkenal ialah Malaka. Selama beberapa abad Malaka telah terkenal sebagai pusat perdagangan tiga jurusan antara negeri India, Cina dan negeri-negeri Asia Tenggara. Pelabuhannya banyak disinggahi kapal dari berbagai negeri yang membawa barang-barang dagangan dari India, Timur Tengah, Eropa, Cina dan negeri-negeri di Asia Tenggara. Selain itu Malaka pada waktu itu (abad ke XV) juga berfungsi sebagai pusat penyebaran Agama Islam yang disebarkan oleh pedagang-pedagang Islam baik yang berasal dari negeri-negeri di Timur Tengah maupun dari Gujarat (India).

Orang-orang Portugis pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1509. Dan sebagai tempat yang pertama mereka kunjungi adalah Pedir dan Pasai (Aceh). Baru sesudahnya mereka menuju ke Malaka. Seperti diketahui bahwa mereka pada tahun 1511 merebut kota Malaka dari Sultan Mahmud,

yang menjadi Sultan di Malaka pada waktu itu.<sup>1</sup> Tetapi sebelumnya mereka telah berusaha untuk mengadakan hubungan dengan kota tersebut. Dan untuk ini Gubernur Portugis yang berkedudukan di India (Goa) mengirimkan Lopes de Sequeira bersama dengan 4 buah kapal ke tempat itu. Ekspedisi atau eskader itu berangkat dari Cochin pada permulaan bulan September 1509. Sebelum sampai di Malaka Lopes de Sequeira singgah di Pedir dan Pasai (Aceh), dua buah pelabuhan yang terletak di pantai utara Sumatra yang terkenal dengan ekspor ladanya. Perlu dicatat di sini bahwa pada waktu itu penguasa-penguasa dari kedua kerajaan tersebut sudah memeluk agama Islam. Di kedua tempat itu Lopes de Sequeira diberi izin untuk berdagang. Kemudian dia melanjutkan pelayarannya ke Malaka. Setibanya di Malaka rombongan ini diterima dengan baik oleh Sultan Mahmud<sup>2</sup>. Perjanjian diadakan antara Sultan Mahmud dengan Lopes de Sequeira dan yang tersebut terakhir diizinkan untuk mendirikan kantor dagangnya di Malaka. Tetapi ternyata kemudian hubungan ini menjadi tidak baik. Terjadi konflik antara pihak Malaka dengan pihak Portugis dan sebahagian besar tentara Portugis berhasil ditawan, tetapi Lopes de Sequeira berhasil melarikan diri dengan kapalnya dan kembali ke India<sup>3</sup>.

---

1. Mengenai faktor apa yang mendorong bangsa Portugis untuk datang ke Indonesia dan kemudian merebut Malaka, lihat misalnya, Sartono Kartodirdjo. "Religious and economic aspects of Portugese-Indonesian relations", *Separata de STUDIA-Revista* Quadrimestral No.29 (Lisboa: April 1970). Lihat juga Dharmo-no Hardjowidjono, "Benarkah Orang-orang Portugis Melancarkan Perang Agama Terhadap Umat Islam Selama Kehadiran Mereka di Indonesia", *Seminar Sedjarah Nasional II*, P. III/34, (Yogyakarta: 26 - 29 Agustus, 1970).

2. P.A. Tiele, "De Europeers in de Maleische Archipel" *BKI* 36 (1877), hal. 13-14.

3. C.Wessels S.J., "Portugeezen en Spanjaarden in den Indischen Archipel tot aan de komst van de O.I. Compagnie 1515-1605", di dalam F.W. Stapel (ed) *Geschiedenis van Nederlandsch Indie*, deel II, (Amsterdam: Joost van de Vondel, 1938), hal. 153.

Selanjutnya pada tahun 1511, pimpinan Portugis di India mengirimkan suatu armada di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque untuk menyerang Malaka. Dan pihak Portugis pada tahun itu juga berhasil menduduki Malaka. Setelah menguasai Malaka, pada mulanya orang-orang Portugis lebih suka berhubungan dengan pedagang-pedagang yang beragama Hindu dari pada dengan pedagang-pedagang yang beragama Islam. Hal ini dimaksudkan oleh Portugis untuk menghancurkan perdagangan saudagar-saudagar Islam yang biasa berdagang di Malaka, sehingga menimbulkan kegoncangan dalam jaringan perdagangan di Selat Malaka, terutama di kalangan pedagang-pedagang Islam. Salah satu akibatnya ialah pedagang Islam yang biasa berdagang di Malaka menyingkir dari sana ke tempat-tempat lain. Dan salah satu di antaranya adalah Aceh.

Dengan berdatangan pedagang-pedagang Islam ke Aceh, maka Aceh menjadi ramai dan mulai berkembang sebagai tempat berdagang. Sebelumnya, atau pada saat orang-orang Portugis mula muncul di perairan sekitar Selat Malaka, Aceh masih merupakan sebuah kerajaan kecil yang tunduk kepada kerajaan tetangganya Pedir. Oleh saudagar-saudagar Islam, Aceh digunakan sebagai pengganti Malaka untuk tempat berdagang dan tempat menyebarkan Agama Islam. Hal ini tidak disia-siakan oleh Sultan Aceh (yang pada waktu itu bernama Sultan Ali Mughayat Syah 1514 – 1530), untuk memanfaatkan kesempatan guna membina kerajaan agar benar-benar dapat menjadi pusat perdagangan sebagai pengganti Malaka yang telah diduduki oleh Portugis.

Setelah menduduki Malaka pihak Portugis, selanjutnya berusaha menguasai lalu lintas perdagangan di kawasan Selat Malaka. Tujuan mereka tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga bersifat religeus, yaitu menyebarkan agama mere-

ka dan meneruskan memerangi orang-orang Islam sebagai kelanjutan dari Perang Salib. Oleh karenanya Selat Malaka menjadi tidak aman lagi bagi pedagang-pedagang Islam. Dan seperti telah disebutkan mereka yang biasa berdagang di Malaka, mendatangi tempat-tempat lain di sekitar itu. Selain Aceh dapat pula disebutkan Pedir (Pidie) dan Pasai. Rupa-rupanya tempat-tempat yang tersebut terakhir itu menjadi incaran pula pihak Portugis. Mereka tidak menginginkan tempat-tempat di sekitar Selat Malaka berkembang menjadi saingan Malaka yang sudah mereka duduki. Karenanya pihak Portugis di Malaka mengirimkan armadanya ke Pedir dan Pasai. Sesampai di kedua tempat itu pihak Portugis belum menampakkan keagresipannya. Karena mereka mendapat sambutan baik dari penguasa Pedir dan Pasai. Mereka menerima hadiah-hadiah sebagai tanda persahabatan dengan kedua kerajaan itu<sup>4</sup>. Khusus di Pedir pihak Portugis berhasil mendapatkan izin buat pendirian sebuah factorij (kantor dagang) mereka di sana. Dan kantor ini oleh Portugis diperkuat dengan mendirikan sebuah benteng di sekelilingnya<sup>5</sup>.

Bertepatan dengan kehadiran Portugis di Pedir, tentara Aceh menyerang Pedir dalam rangka membebaskan diri dari pengaruhnya dan untuk mempersatukan Pedir ke dalam kerajaan Aceh. Rupa-rupanya penguasa Pedir terpaksa meminta bantuan pihak Portugis yang berada di sana untuk mempertahankan Pedir dari serangan Aceh. Dan permintaan ini diterima oleh Portugis. Sehingga terjadilah konfrontasi ini diterima oleh Portugis. Sehingga terjadilah konflik bersenjata pertama kali antara pihak Aceh dengan Portugis. Dalam konflik ini, baik Pedir maupun Portugis tidak

---

4. *Ibid.*, hal. 154.

5. Benteng ini mungkin yang dinamakan Benteng Kuta Asan sekarang.

kuasa membendung serangan pihak Aceh. Aceh berhasil menguasai Pedir dan tentara Portugis yang tersiksa yang sempat menyelamatkan diri terpaksa melarikan diri ke Malaka. Dan sejak saat itu Pedir tunduk di bawah kuasa Aceh. Rupa-rupanya pihak Portugis yang berkedudukan di Malaka tidak puas dengan peristiwa itu. Selanjutnya dalam tahun 1519 mereka mencoba melakukan agresi langsung ke Aceh di bawah pimpinan Gaspar de Costa. Tetapi agresi Portugis ini dapat digagalkan oleh pihak Aceh. Namun pada tahun 1521 kembali Portugis bersama-sama dengan beberapa pengikut dari Pedir mencoba menyerang kerajaan Aceh untuk kedua kalinya. Dan usaha ini pun mengalami kegagalan berkat kesiapan siagaan tentara Aceh, panglima Portugis sendiri Joge de Brito tewas dalam pertempuran ini<sup>6</sup>.

Keberhasilan dalam mempertahankan diri ini menjadikan Aceh menyusun suatu rencana untuk mengusir Portugis baik dari wilayah Aceh Darussalam (Daerah Istimewa Aceh sekarang), maupun dari pusat kedudukan mereka di Asia Tenggara yaitu Malaka. Hal ini dilakukan oleh Aceh karena mereka menganggap Portugis sebagai agresor dan telah merusak keharmonisan jaringan perdagangan tradisional di kawasan itu. Sebagai langkah pertama, pada tahun 1524 Aceh melakukan pengejaran terhadap Portugis yang berada di Pasai. Seperti halnya Pedir, Pasai yang mendapat bantuan Portugis pada tahun itu juga berhasil dikuasai oleh Aceh dan selanjutnya disatukan menjadi satu dengan Aceh, yaitu Aceh Darussalam. Sementara itu orang-orang Portugis yang dipimpin oleh Sebastian de Sausa yang ikut mempertahankan Pasai dari serangan Aceh dan mereka selamat, melarikan diri ke selatan yaitu ke Aru yang pada waktu itu masih bersifat animistik.<sup>7</sup>

---

6. Zakaria Ahmad. *Sekitar Keradjaan Atjeh Dalam Th. 1520-1675*, (Medan: Monora, 1972), hal. 37.

7. Dharmono Haridjowidjono, *op.cit.*, hal. 5.

Pada tahun 1529 setelah merasa dirinya cukup kuat, Aceh melakukan pula ekspansi ke daerah itu. Untuk menghadapi ekspansi Aceh raja Aru meminta bantuan pula dari Portugis dan Portugis bersedia membantunya<sup>8</sup>. Perlu dicatat di sini bahwa bantuan tersebut bukanlah bersifat prodeo, melainkan Raja Aru harus membayarnya dengan sejumlah emas kepada pihak Portugis.<sup>9</sup>

Langkah berikutnya yang ditempuh Aceh dalam rangka mengusir agresor Portugis dari kawasan Selat Malaka, adalah Aceh berusaha untuk memperkuat angkatan perangnya. Hal ini terjadi ketika di Aceh berkuasa Sultan Alauddin Riayat Syah al Kahhar (1537 – 1571). Sejalan dengan maksud di atas, sultan ini bercita-cita pula untuk menguasai perdagangan di kawasan Selat Malaka dan ingin memperluas pengaruhnya atas daerah-daerah yang menghasilkan lada, kapur barus, emas, kemenyan dan barang-barang dagangan lainnya di pesisir pantai barat dan timur pulau Sumatra. Tujuannya agar dapat memonopoli perdagangan di sana, terutama perdagangan lada. Tetapi dalam hal ini Sultan Aceh maklum, bahwa kedudukan Portugis di Malaka dianggap sebagai penghalang untuk mencapai cita-citanya. Maka sultan Aceh ini juga berhasrat untuk mengusir kedudukan Portugis dari Malaka. Untuk merealisasikan maksudnya Sultan Aceh harus memperkuat angkatan perangnya, terutama armada lautnya. Salah satu cara ialah mengadakan suatu hubungan dengan kerajaan Islam yang besar pada waktu itu, yaitu kerajaan Turki. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan militer.

Namun sebelum mengirim utusan ke Turki, pada tahun 1547 Aceh telah mempersiapkan suatu serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun itu juga Malaka

---

8. *Ibid.*,

9. *Ibid.*

mulai digempur oleh kerajaan Aceh. Dua buah kapal Portugis yang sedang berlabuh di pelabuhan itu berhasil dihancurkan oleh pihak Aceh. Selanjutnya Aceh mendaratkan tentaranya dan berhasil menduduki kampung Upeh, salah satu bahagian dari bandar Malaka. Pihak Portugis dalam penyerangan Aceh itu, hanya bertahan di benteng saja dan tidak mampu memberi perlawanan di luar benteng. Karenanya praktis seluruh Malaka berhasil dikuasai oleh Aceh, kecuali benteng pertahanan Portugis saja. Pihak Aceh memberi ultimatum kepada penguasa Portugis di Malaka yang berada dalam benteng yaitu Simao de Mello, supaya menyerah kepada pihak Aceh. Simao de Mello tidak memberi jawaban dan terus bertahan di bentengnya<sup>10</sup>. Meskipun demikian usaha Aceh mengusir Portugis dari Malaka belum berhasil. Hal ini disebabkan karena berhasilnya pihak Portugis untuk memecah belah antara Johor dan Aceh. Berita yang diterima oleh pasukan Aceh tentang bala bantuan untuk Portugis yang datang dari lautan, serta pertempuran antara pasukan Aceh lain dengan Portugis yang dibantu oleh Johor di Perlis, memaksa pasukan Aceh menarik diri dari Malaka dengan maksud untuk menghadang pasukan bantuan Portugis itu di lautan. Tetapi pasukan yang hendak dihadang itu tidak pernah dijumpai.<sup>11</sup>

Meskipun penyerangan tersebut gagal, Aceh terus juga memperkuat kedudukannya. Laporan yang disampaikan oleh pembesar Portugis kepada rajanya di Lissabon membuktikan betapa khawatirnya Portugis terhadap Aceh.<sup>12</sup> Karena kerajaan Johor dianggap oleh Aceh selalu membantu pihak

---

10. R.O. Winstet, *A History of Malaya*, (London: Luzak & Company, 1935), hal. 78. Lihat juga dalam Zakaria Ahmad, *op. cit.*, hal. 44.

11. *Ibid.*

12. *Ibid.*

Portugis, maka pada tahun 1564 Aceh menyerang Johor dan berhasil didudukinya. Sultan Johor terbunuh dalam penyerangan itu dan sejumlah tawanan dari Johor diangkut ke Aceh. Untuk beberapa tahun Johor menjadi vazal kerajaan Aceh<sup>13</sup>. Tindakan ini juga dimaksudkan oleh kerajaan Aceh sebagai persiapan untuk menyerang Portugis lagi di Malaka, agar Johor tidak mendapat kesempatan membantu Portugis seperti pada penyerangan Aceh tahun 1547. Sementara itu Portugis pun merencanakan memperbesar kekuatannya di Malaka dan mengatur persiapan untuk menyerang balas Aceh. Don Antonio de Noronda penguasa Portugis yang baru untuk Malaka, ketika masih berada di Goa (India), dalam tahun 1564 telah mendapat kabar pula tentang Aceh yang telah membentuk suatu persekutuan antara kerajaan-kerajaan Islam untuk menentang Portugis.<sup>14</sup>

Dalam rangka untuk memperoleh bantuan dari Kerajaan Islam terbesar pada masa itu, pada tahun 1563 Sultan Aceh mengirim suatu utusan ke kerajaan Turki. Utusan tersebut membawa serta hadiah-hadiah berharga dari Sultan Aceh untuk dipersembahkan kepada penguasa kerajaan Turki. Hadiah-hadiah itu ialah berupa emas, rempah-rempah dan lada.<sup>15</sup> Selain pemberian hadiah para utusan Aceh juga telah

---

13. I.A. Macgregor, "A Portuguese Sea Fight Near of Singapore," *JMBRAS* Vol. XXIX, Part 3, (1957), hal.6.

14. *Ibid.*, hal. 7. Lihat juga D.G.E. Hall, *A History of South East Asia*, (London: Macmillan & Co Ltd., 1960), hal. 284; dan Zakaria Ahmad, *op.cit.*, hal. 45.

15. Mengenai utusan Aceh yang dikirim oleh Sultan al Kahhar ke Turki, di Aceh terkenal dengan kisah *lada sicupak*. Dalam kisah ini Turki disebut negeri Rum. Inti kisah ini ialah mengenai perutusan Aceh yang dikirim ke Turki. Di antara hadiah yang dipersembahkan kepada penguasa Turki ialah lada. Pada waktu berangkat muatan lada memenuhi kapal yang membawa perutusan tetapi karena lama dalam perjalanan dan banyak rintangan yang dialami di laut menyebabkan muatan lada tinggal sedikit atau hanya tinggal si pucak (lebih durang ½ liter) yang dapat dipersembahkan kepada penguasa Turki. Sewaktu utusan itu kembali, se-

meyakinkan pihak Turki mengenai suatu keuntungan yang akan diperoleh pihak Turki dari perdagangan rempah-rempah dan lada Indonesia, bilamana orang-orang Portugis telah dapat diusir dari Malaka oleh Aceh dengan bantuan Turki.<sup>16</sup> Perutusan Aceh ini boleh dikatakan berhasil, karena pihak Turki telah bersedia mengirimkan bantuan kepada Aceh, berupa dua buah kapal perang dan 500 orang tenaga berbangsa Turki untuk mengelola kapal-kapal itu. Di antara ke 500 orang Turki itu juga terdapat ahli-ahli militer yang dapat membuat kapal-kapal perang baik ukuran besar maupun kecil dan meriam-meriam berukuran besar. Selain itu pihak Turki juga memberikan sejumlah meriam berat beserta perlengkapan-perengkapan militer lainnya kepada pihak Aceh. Semuanya itu selamat tiba di pelabuhan Aceh pada tahun 1566/1567.<sup>17</sup>

Di samping bantuan militer yang diperoleh dari Turki, Aceh juga berusaha untuk mendapatkan bantuan dari beberapa pemimpin kerajaan di Indonesia dan India, tetapi Aceh hanya mendapatkan sekedar bantuan yang terbatas dari pemimpin Calicut dan Jepara.<sup>18</sup> Selain itu dalam rangka menyingkahkan Portugis dari kawasan Selat Malaka, Aceh juga menggunakan tentara-tentara sewaan yang terdiri dari selain orang Turki juga dari orang-orang Gujarat, Malabar dan Abyssinia.<sup>19</sup>

---

lain membawa surat Sultan Turki untuk Sultan Aceh, dibawa pula alat-alat perlengkapan perang. Salah satu ialah sebuah meriam yang dinamai *Meriam Lada Sicupak*.

16. C.R. Boxer, "A Note On Portuguese Reactions to The Revival of The Red Sea Spice Trade and The Rise of Acheh, 1540-1600", *International Conference On Asian History*, Paper No.2, (Kuala Lumpur: Department of History, University of Malaya, 5th - 10th August, 1968), hal. 9.

17. *Ibid.*

18. *Ibid.*

19. R.O. Winstedt, *A. History of Malaya*, (Kuala Lumpur, Singapore: Marican & Sons, 1968), hal. 79.

Dalam tahun 1568 kembali Aceh menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Serangan ini adalah serangan yang paling dahsyat yang pernah dilakukan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al Kahhar. Dalam penyerangan ini Aceh telah menggunakan kekuatan yang terdiri dari 15.000 orang Aceh, 400 orang tentara Turki, disertai pula dengan 200 pucuk meriam besar dan kecil yang dibuat dari tembaga.<sup>20</sup> Dan penyerangan ini tentara Aceh dipimpin sendiri oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al Kahhar.<sup>21</sup> Tetapi untuk menghadapi penyerangan Aceh ini pihak Portugis juga telah siap. Bantuan-bantuan tambahan dari Goa telah terlebih dahulu mereka terima. Selain itu Portugis juga telah sempat memberi kabar kepada sekutunya Johor dan Kedah agar membantunya bila diserang oleh pihak Aceh. Dengan demikian pada waktu penyerangan Aceh itu kedudukan Portugis dalam suasana yang menguntungkan. Pertempuran berlangsung dengan seru, baik di darat maupun di laut. Banyak jatuh korban di kedua pihak, Sultan Alauddin Riayat Syah al Kahhar sendiri, kehilangan puteranya yang memerintah di Aru. Dan kenyataannya pada penyerangan kali ini pun Aceh belum berhasil mengenyahkan Portugis pada kedudukannya di Malaka.

Semenjak pertempuran Aceh – Portugis di Malaka tahun 1568 itu, Portugis menginsafi betul, bahwa membiarkan Aceh merebut Malaka berarti membunuh diri bagi Portugis di Timur. Oleh karena itu diputuskan oleh pemerintahnya di Lissabon, untuk mengirim kekuatan armada sekuat mungkin ke Malaka.<sup>22</sup> Dan untuk melancarkan roda

---

20. R.A. Hoesein Djajadiningrat, "Critisch overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de Geschiedenis van het Soeltanaat Atjeh", *BKI* 65 (1911), hal. 153.

21. I.A. Macgregor, *loc. cit.*,

22. *Ibid.* Lihat juga Zakaria Ahmad, *op.cit.*, hal. 46.

pemerintahannya di Asia, sejak tahun 1571 Portugis telah mencoba mengadakan pembagian pemerintahan menjadi tiga ke gubernuran yang berkuasa sendiri-sendiri dan bertanggung jawab langsung ke Lissabon. Salah satu ke gubernuran itu ialah bagian Selatan yang meliputi Kepulauan Indonesia, Semenanjung Melayu dan Makao dengan pusatnya Malaka. Bagian ini dipimpin oleh Monitz Bareto dan kepadanya juga diberi pangkat "Gubernur Sumatra" dan dialah yang disertai tugas untuk menaklukkan Aceh yang dianggap selalu mengancam kedudukan Portugis di Malaka.<sup>23</sup> Menurut perhitungan Portugis masa itu, bila Aceh dapat mereka kuasai, maka seluruh Sumatra akan terganggu dalam kekuasaannya. Tetapi Monitz Bareto yang ketika itu bertugas di Goa, tidak pernah datang ke Malaka ke kota mana dia harus pindah untuk melaksanakan tugasnya yang baru dan sekaligus pula sebagai basis penyerangannya ke Aceh. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia menganggap bahwa rencana itu rencana gila yang tidak mungkin dilaksanakan. Meskipun ia tidak mematuhi perintah atasannya, dia ternyata tidak juga diberhentikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Portugis sendiri menginsafi pula bahwa rencana yang telah digariskannya itu, memang tidak mungkin untuk dapat dilaksanakan.<sup>24</sup>

Dalam tahun 1576, raja Portugis merubah rencana tersebut di atas dan memutuskan memberi tugas khusus kepada Mathias de Albuquerque (turunan d'Albuquerque yang menaklukkan Malaka pada tahun 1511) untuk berangkat ke Malaka dengan dua kapal perang, yaitu Santa Catharina dan Sao Yorge, berikut segala tentara dan kelengkapannya dengan tugas mempertahankan Malaka dan menaklukkan Aceh. Dia

---

23. *Ibid.*, hal. 8. Zakaria Ahmad, *ibid.*, hal. 47

24. *Ibid.*, hal. 9.

bersama rombongannya tiba di Malaka pada bulan Desember 1576.<sup>25</sup>

Rupa-rupanya armada Aceh sudah mengetahui tentang kedatangan rombongan Portugis ini. Maka untuk ini mereka telah bersiap-siap mengadakan patroli di perairan Selat Malaka. Tetapi armada Mathias de Albuquerque tidak pernah bersua dengan armada Aceh ini. Baru diketahui setelah mereka tiba di Malaka. Karena itu armada Aceh memburunya ke Malaka. Pada tanggal 1 Januari 1577 armada Aceh yang dipimpin oleh Laksamana Sri Maharaja telah menyampaikan "Selamat Tahun Baru" kepada Portugis dengan melepaskan tembakan-tembakan meriam ke arah di mana Aceh mendapat kabar bahwa Portugis sedang menghimpun kekuatannya. Menurut I.A. Macgregor, kekuatan Aceh yang hendak menggempur pihak Portugis itu ada kira-kira 10.000 tentara dengan jumlah meriam yang cukup banyak.<sup>26</sup> Namun pertempuran kali ini pun belum menghasilkan suatu hasil yang positif bagi Aceh, yaitu mengusir Portugis dari Malaka.

Antara masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah al Kahhar (1537 – 1571) hingga pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah al Mukammil (1587 – 1604), terdapat beberapa kali pergantian Sultan di Aceh. Bagaimana konflik antara Aceh dengan Portugis pada periode ini, tidak banyak yang dapat disebutkan. Namun ketika Aceh berada di bawah Sultan al Mukammil, sikap sultan ini sangat berbeda dengan sikap Sultan-sultan Aceh sebelumnya, khususnya sikap terhadap orang-orang Portugis di Malaka. Sultan ini telah mencoba mengadakan suatu kontak untuk berdamai dengan pihak Portugis di Malaka.<sup>27</sup> Rupa-rupanya

---

25. *Ibid.*, hal. 10 Zakaria Ahmad, *ibid.*,

26. *Ibid.*,

27. C. Wessels S.J., *op.cit.*, hal. 159. Lihat juga P.A. Tiele, *op.cit.* hal. 16.

usaha Sultan al Mukammil ini mendapat sambutan baik pula dari pihak Portugis di Malaka, sehingga tercapai suatu situasi damai antara pihak Aceh dan Portugis, yang belum pernah terjadi dengan Sultan-sultan Aceh lain sebelumnya. Semenjak waktu itu lambat laun hubungan yang normal telah terjadi antara kedua lawan itu; bahkan pada tahun 1600 sebuah delegasi atas nama Raja Portugal telah datang di Aceh untuk mengadakan perundingan-perundingan.<sup>28</sup>

Mengenai sebab-sebab mengapa Aceh dan Portugis mau menjalin suatu hubungan baik, C.R. Boxer menyebutkan bahwa perubahan sikap dari kedua belah pihak yang sebelumnya saling bertentangan itu, sebenarnya adalah disebabkan karena kejemuan atau kejenuhan pada kedua belah pihak, yang terus-menerus telah melibatkan diri dalam perselisihan-perselisihan dan peperangan-peperangan.<sup>29</sup> Portugis ingin memanfaatkan masa damai tersebut untuk beristirahat dan untuk menyiapkan suatu serangan secara besar-besaran terhadap Aceh. Tetapi dari perkembangan situasi selanjutnya pihak Portugis benar-benar telah merubah maksudnya itu. Mereka rupa-rupanya tetap ingin memelihara suatu persahabatan/suasana damai dengan kerajaan Aceh.<sup>30</sup> Hal ini karena ada maksud lain dari pihak Portugis, yakni keinginan mereka untuk mengadakan suatu hubungan dagang dengan kerajaan Aceh, agar dari padanya dapat diperoleh keuntungan bagi pihaknya.

Mula hubungan baik antara kerajaan Aceh dengan Portugis di Malaka dirintis ketika Sultan Aceh (al Mukammil) mengirim seorang utusan ke Malaka. Utusan Aceh ini mem-

---

28. *Ibid.*

29. C.R. Boxer, *op.cit.*, hal. 17-18.

30. *Ibid.*

bawa serta hadiah-hadiah berharga untuk dipersembahkan kepada penguasa Malaka yang pada waktu itu dipegang oleh D. Paulo de Lima.<sup>31</sup> Tujuan utusan Aceh tersebut ialah untuk mengucapkan selamat kepada Portugis yang telah berhasil mengadakan penghancuran atas kerajaan Johor, yang rupa-rupanya juga bermusuhan dengan kerajaan Aceh dan Portugis di Malaka. Selain itu Aceh juga meminta kepada Portugis agar seorang wanita Aceh yang berpangkat, yang sedang ditahan oleh Portugis pada salah satu perahu yang sedang menuju ke Malaka supaya dibebaskan. D. Paulo de Lima, mengabulkan permintaan Aceh yang tersebut terakhir dan juga bersedia mengadakan suatu perjanjian damai dengan utusan Aceh tersebut.<sup>32</sup> Sejak adanya perdamaian tersebut (1587), maka pihak Aceh tidak lagi menyerang kapal-kapal Portugis yang lewat di perairan Aceh dan Selat Malaka, yang sebelumnya sering mereka lakukan. Kemudian kepada orang-orang Portugis oleh Sultan Aceh juga diberi kebebasan untuk datang dan berdagang di Ibu kota kerajaan Aceh, yaitu Bandar Aceh Darussalam. Situasi ini tentu merupakan suatu keuntungan pula bagi kerajaan Aceh, karena perdagangan atau pemasaran hasil-hasil buminya, terutama lada menjadi bertambah ramai.

Situasi damai antara Aceh dengan Portugis tidak berlangsung lama, hingga tahun 1602, saat sudah berdatangnya para pedagang bangsa Barat lainnya ke Aceh (orang-orang Belanda dan Inggris). Sementara para pedagang-pedagang ini berada di Aceh, orang-orang Portugis yang juga berada di sana makin lama makin menunjukkan pengaruhnya di kalangan istana Aceh. Mereka pernah menghasut

---

31. P.A. Tiele, "De Europeers in de Maleische Archipel", *BKI* 37, (1888), hal. 177.

32. *Ibid.*

pedagang-pedagang Belanda kepada Sultan Aceh agar memeringi para pedagang Belanda yang sedang berada di Aceh. Tentang masalah ini akan diuraikan lebih lanjut dalam bab berikutnya. Sultan Aceh mulai menunjukkan kecurigaannya kepada orang-orang Portugis, ketika mereka pada tahun 1602 mengajukan suatu permohonan kepada Sultan, agar mereka diberi suatu tempat, yakni salah satu di antara pulau-pulau yang terletak di depan pantai Aceh. Tujuan mereka adalah untuk mendirikan sebuah benteng di tempat itu, dengan alasan untuk menjamin keselamatan perdagangan mereka di Aceh.<sup>33</sup> Sultan Aceh tidak hanya menolak permintaan tersebut, tetapi juga merasa amat tersinggung karena diajukan dengan sangat angkuh oleh orang-orang Portugis.<sup>34</sup> Sejak saat itulah Sultan Aceh mulai berprasangka kepada orang-orang Portugis yang berada di Aceh dan sekaligus ia mulai merubah kembali sikapnya terhadap mereka.<sup>35</sup> Maka mulai saat itu pula terjadi lagi hubungan yang tidak baik antara kerajaan Aceh dengan pihak Portugis.

Pada bulan Juni 1606 orang-orang Portugis yang sudah tidak berbaik lagi dengan Aceh dibawah pimpinan Martin Alfonso menyerang ibu kota kerajaan Aceh. Pada waktu itu yang memerintah di Aceh adalah Sultan Ali Riayat Syah (1604 – 1607), putera Sultan al Mukammil. Sultan ini mempunyai seorang kemenakan laki-laki yang bernama Darma Wangsa Tun Pangkat. Ketika terjadi penyerangan Portugis itu si kemenakan ini berada dalam tahanan Sultan Ali Riayat yang

---

33. J. Langhout, *Economische Staatskunde in Atjeh*, (Den Haag: N.V. Boekhandel W.P. Stockum & Zoon, 1923), hal. 12.

34. P.J. Veth, *Atchin en Zijne Betrekkingen tot Nederland*, (Leiden: Geralth Kolf, 1887), hal. 71.

35. T. Iskandar, "De Hikajat Atjeh", *VKI* 26, ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1958), hal. 42.

dihukum olehnya karena sesuatu kesalahan. Ketika mendengar adanya penyerangan pihak Portugis terhadap kerajaan Aceh, ia memohon kepada pamannya agar dia dibebaskan dan diperkenankan ikut berperang melawan orang-orang Portugis. Permohonan ini dikabulkan oleh Sultan Aceh. Kemudian Darma Wangsa Tun Pangkat bersama dengan tentara Aceh lainnya melakukan perlawanan dengan menyerang orang-orang Portugis di sebuah benteng Aceh yang telah berhasil direbutnya. Dan rupa-rupanya tentara Aceh berhasil mengusir kembali orang-orang Portugis dari Aceh. Darma Wangsa Tun Pangkat yang telah berjasa karena keikutsertaannya dalam pertempuran-pertempuran dengan pihak Portugis itu, menjadi terkenal dan menarik perhatian orang-orang di kalangan istana Aceh.<sup>36</sup>

Meninggalnya Sultan Ali Riayat Syah menurut *Bustanus Salatin*, terjadi pada hari Rabu, 4 April 1607.<sup>37</sup> Sebagai penggantinya adalah kemenakannya sendiri, yakni Darma Wangsa Tun Pangkat dengan gelar Sultan Iskandar Muda.<sup>38</sup> Di bawah Sultan Iskandar Muda kerajaan Aceh melakukan sejumlah ekspansi ke kerajaan-kerajaan di sekitar dan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Dalam ekspansi yang dilakukan ini, meskipun di dalamnya terkandung suatu kekuatan militer yang bertujuan untuk kepentingan politik, tetapi sebenarnya menjurus untuk kepentingan ekonomis, yaitu untuk mendapatkan monopoli perdagangan di daerah-daerah yang berhasil ditaklukkannya. Hal ini dapat dilihat apabila suatu daerah telah berhasil ditaklukkan, Iskandar Muda menempatkan wakilnya di sana yang ditugaskan hanya untuk

---

36. A.J.A. Gerlach, *Atjih en De Atjinezen*, (Arnhem: Thieme D.A., 1873), hal. 37.

37. Nuruddin Ar Raniri, *Bustanus Salatin*, disusun oleh T.Iskandar, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), hal. 34.

38. R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op.cit.*, hal. 175.

mengawasi perdagangannya saja, sedangkan penguasaan yang bersifat tradisional tetap diserahkan kepada penguasa semula dari daerah-daerah itu.

Selain melakukan ekspansi-ekspansi Iskandar Muda juga melakukan penyerangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Tujuan utama penyerangan ini adalah untuk kepentingan ekonomis. Iskandar Muda ingin menguasai atau memonopoli perdagangan di kawasan Selat Malaka, dan menguasai kerajaan-kerajaan yang berpotensi ekonomi di daerah kawasan itu. Portugis yang berkedudukan di Malaka, juga mempunyai maksud serupa dengan Aceh. Iskandar Muda melihat kedudukan Portugis di Malaka sebagai suatu rintangan bagi keinginannya. Ia khawatir terhadap kekuatan Portugis di Malaka dan kelemahan Sultan-Sultan Melayu dalam menghadapi pihak Portugis. Karenanya Iskandar Muda berusaha mengusir Portugis dari Malaka yang dianggap sebagai penghalang dan saingannya dalam menguasai perdagangan di Selat Malaka.<sup>39</sup> Apalagi pihak Portugis sering mengadakan hubungan untuk mendapatkan barang-barang dagangan dan untuk mencari pengaruh atas kerajaan-kerajaan kecil yang lemah di Semenanjung Tanah Melayu. Kerajaan-kerajaan Melayu yang mengadakan hubungan dagang dengan Portugis di Malaka dimusuhi oleh Aceh, sedangkan kerajaan-kerajaan itu menginginkan agar mereka bebas memperdagangkan barang-barang dagangan kerajaan mereka kepada siapa saja yang mereka anggap lebih menguntungkan. Karena adanya perbedaan kepentingan ini, maka timbullah persaingan yang terus-menerus antara kerajaan Aceh dengan Portugis di Malaka dan dengan kerajaan Melayu di Semenanjung Tanah Melayu.

Dengan alasan karena kerajaan Aceh sebagai kerajaan

---

39. Nugroho Notokusanto, *Sedjarah Dan Hankam*, (Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan, Lembaga Sedjarah Hankam, 1968), hal. 52.

yang telah lama memeluk agama Islam, serta dengan melihat sikap hidup orang-orang Aceh yang hampir menyamai sikap hidup orang-orang Arab yang keras dan bersemangat, maka J. Jongejans dalam bukunya *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*, berpendapat bahwa tujuan peperangan dan ekspansi yang dilakukan Aceh terhadap Malaka Portugis dan kerajaan-kerajaan Melayu di Semenanjung adalah untuk kepentingan agama atau bermotifkan agama.<sup>40</sup> Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kebanyakan kerajaan-kerajaan Melayu yang menjadi sasaran ekspansi Aceh pada waktu itu sudah menganut agama Islam, artinya Sultan-Sultan dari kerajaan itu sudah Islam. Seandainya Aceh melihat dari kepentingan agama, maka Aceh tidak akan menyerang kerajaan-kerajaan Melayu yang Islam itu. Sebaliknya mungkin kerajaan Aceh akan bersahabat dengan kerajaan-kerajaan itu untuk bersama-sama menyerang Portugis di Malaka yang bukan Islam. Kerajaan Aceh menerima secara baik pedagang-pedagang asing yang bukan Islam yang datang berdagang ke Aceh. Pedagang-pedagang Portugis pun mungkin akan diterima secara baik bila mereka datang ke Aceh dengan maksud pula, misalnya untuk berdagang. Dan hal ini sudah pernah terjadi pada masa pemerintahan kakek Iskandar Muda, yakni Sultan Alauddin Riayat Syah al Mukammil. Dengan melihat kenyataan-kenyataan di atas, maka apa yang dikemukakan oleh J. Jongejans di atas adalah masih diragukan. Sehubungan dengan persoalan ini, Brian Marrison salah seorang yang pernah menulis sejarah Asia Tenggara, berpendapat bahwa peperangan yang dilakukan Aceh dengan Portugis, bukanlah peperangan karena Agama, tetapi peperangan untuk mendapatkan kekuasaan perdagangan di perairan

---

40. J. Jongejans, *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*, (Baarn: Hollandia Drukkerij, 1939), hal. 13.

Selat Malaka dan untuk menempatkan kerajaan-kerajaan Melayu di bawah kekuasaannya.<sup>41</sup>

Menurut N.J. Ryan dalam karyanya *Sejarah Semenanjung Tanah Melayu*, penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kerajaan Aceh terhadap kerajaan-kerajaan di Semenanjung Tanah Melayu, dimaksudkan oleh Aceh untuk memudahkan penyerangan yang akan dilakukan secara besar-besaran terhadap Malaka Portugis.<sup>42</sup> Hal ini dimaksudkan Aceh, bila mereka melakukan serangan terhadap Malaka Portugis supaya kerajaan-kerajaan Melayu itu tidak akan membantu pihak Portugis.

Pada tahun 1615 kerajaan Aceh mencoba melakukan suatu serangan terhadap Portugis di Malaka, namun karena sebelumnya Aceh telah terlebih dahulu menyerang Johor dengan armada yang seharusnya untuk menyerang Malaka Portugis, maka rahasia penyerangan terhadap Malaka telah bocor di kalangan pihak Portugis.<sup>43</sup> sehingga Aceh terpaksa membatalkan maksudnya itu. Meskipun demikian, ketika armada Aceh dalam perjalanan pulang ke Aceh sempat juga terlibat dalam pertempuran dengan kapal-kapal Portugis di dekat Malaka.

Penyerangan secara besar-besaran terhadap kedudukan Portugis di Malaka dilakukan oleh Aceh pada tahun 1629, Penyerangan ini dilakukan oleh sebuah armada Aceh yang cukup besar menurut ukuran pada masa itu. Dalam pertempuran dengan pihak Portugis di Malaka itu, pihak Aceh mengalami kekalahan total. Banyak tentara Aceh yang binasa dalam pertempuran itu termasuk Perdana Menterinya, se-

---

41. Brian Harrison, *South East Asia A Short History*, (London: Macmillan & Co Ltd., 1957), hal. 82.

42. N.J. Ryan, *Sejarah Semenanjung Tanah Melayu*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966), hal. 54-55.

43. P.A. Tiele, *op.cit.*, hal. 306-307.

dangkan Laksamana Aceh yang cukup terkenal dalam ekspansi-ekspansi Aceh sebelumnya ke kerajaan-kerajaan di Semenanjung Tanah Melayu dapat ditawan oleh pihak Portugis.

Berikut ini akan digambarkan secara singkat mengenai jalannya peperangan yang sangat menentukan bagi kerajaan Aceh, yaitu peperangan tahun 1629 antara kerajaan Aceh (masa Iskandar Muda) dengan Portugis yang mendapat bantuan dari beberapa kerajaan Melayu di Semenanjung Tanah Melayu.<sup>44</sup>

Rencana Sultan Iskandar Muda untuk menyerang Malaka Portugis pada tahun 1629, mulanya belum disetujui oleh pimpinan armada Aceh pada waktu itu yaitu Laksamananya, yang sudah berpengalaman dalam melakukan ekspansi-ekspansi ke kerajaan-kerajaan Melayu dan dalam berperang melawan Portugis. Menurut Laksamana penyerangan yang akan dilakukan itu belum tepat waktunya. Ia melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bila Aceh benar-benar menyerang Malaka pada waktu itu. Perdana Menteri Aceh pada waktu itu yang bergelar "Maharaja Sri Maharaja" mengajukan kesediaannya kepada Sultan agar dialah yang memimpin armada Aceh dalam penyerangan yang akan dilakukan terhadap Malaka Portugis. Dan rupa-rupanya Sultan Iskandar Muda menyetujuinya. Maka Perdana Menteri diangkat sebagai pimpinan armada laut Aceh, menggantikan tempat laksamana. Meskipun demikian Laksamana diikuti juga dalam rombongan Aceh itu, tetapi dia hanya

---

44. Untuk menguraikan jalannya pertempuran atau peperangan antara kerajaan Aceh dengan Portugis di Malaka pada tahun 1629, kami mendasarkan pada beberapa sumber antara lain dari T.Iskandar, *op.cit.*, hal. 47-48. R.A. Hoessein Djajadiningrat, *op.cit.*, hal. 180-181. Nuruddin Ar Raniri, *loc. cit.*, P.J.Veth, *op.cit.*, hal. 74. Mohammad Said, *Atjeh Sepandjang Abad*, (Medan: diterbitkan oleh pengarang sendiri, 1961), hal. 169-173. R.O. Winstedt, *op.cit.*, hal. 86.

diserahi untuk memimpin sepasukan kecil saja dari tentara darat Aceh. Karena Laksamana merasa disisihkan dan juga sikap Perdana Menteri yang angkuh yang ingin menunjukkan bahwa ia juga dapat memimpin armada laut seperti yang pernah dipimpin oleh Laksamana pada penaklukan-penaklukan ke Semenanjung Tanah Melayu, maka di antara kedua pemimpin Aceh tersebut tidak terdapat suatu kekompakan. Malah sebaliknya antara kedua mereka terjadi perbedaan-perbedaan pendapat.

Dengan kekuatan 250 perahu layar ditambah 47 buah kapal yang besar menurut ukuran masa itu dan dengan sekitar 20.000 tentara berangkatlah armada Aceh menuju ke Malaka. Pada bulan Juli 1629, mereka tiba di perairan Malaka. Dan tidak lama setelahnya armada Aceh ini telah dihadang oleh angkatan laut Portugis. Yang memimpin pertahanan Portugis di Malaka pada waktu itu adalah Diogo Lopez de Fonseca. Dalam pertempuran pendahuluan itu angkatan laut Portugis dapat dikalahkan. Laksamana yang memimpin pimpinan pasukan darat berhasil mengadakan pendaratan ke pinggir kota Malaka. Beberapa tempat di luar benteng kota Malaka dapat dikuasai oleh tentara darat Aceh. Di antaranya, bukit S. Joao (St. John) yang letaknya sangat strategis. Di sini mereka mendirikan perkemahan-perkemahan. Dari sana tentara darat Aceh ini dapat melepaskan tembakan meriam ke arah benteng Portugis yang disebut dengan nama *A Famosa*. Namun pihak Portugis terus dapat bertahan di benteng itu. Perdana Menteri yang memegang pimpinan armada laut mencoba pula mendekati benteng kota Malaka dengan memasuki muara sungai Pongor di sebelah selatan Malaka. Ketika mereka sudah berada di sungai itu dengan tidak disangka-sangka muncullah armada Johor, Pahang dan Patani yang berkekuatan sekitar 2.000 orang tentara

untuk membantu Portugis. Kemudian muncul lagi bantuan dari pihak Portugis sendiri sebanyak 5 buah kapal perang yang dipimpin oleh Michael Pereira Botello. Bantuan kepada pihak Portugis yang datang dari laut dengan tiba-tiba ini tidak diperhitungkan oleh Perdana Menteri Sri Maharaja. Dalam bulan Oktober tahun itu pula tiba lagi armada Portugis dari Goa yang dipimpin oleh Nuno Alvarez Botello. Mereka semua memblokir muara sungai Pongor yang di dalamnya penuh dengan perahu dan kapal dari armada Aceh. Dengan adanya pemblokiran ini pihak Portugis dapat dengan mudah melakukan penyerbuan-penyerbuan terhadap armada Aceh yang berada di sungai tersebut, sedangkan armada Aceh tidak dapat berbuat banyak dan menjadi kacau sehingga banyak di antaranya yang tewas.

Laksamana Aceh yang memimpin tentara darat melihat saja armada Aceh yang sedang terkepung di sungai Pongor. Dia seolah-olah membiarkan saja armada Aceh yang dipimpin oleh Perdana Menteri itu hancur dipukul oleh tentara Portugis bersama dengan sekutu-sekutunya. Botello, meminta agar armada Aceh menyerah saja kepada mereka, tetapi permintaan ini ditolak secara tegas oleh Perdana Menteri. Pada malam hari kadang-kadang armada Aceh mencoba mendobrak blokade orang-orang Portugis dan sekutu-sekutunya di muara sungai Pongor dengan menggunakan kapal-kapal kecil, tetapi tanpa hasil. Setelah terkepung dan bertempur beberapa lama, armada Aceh tambah terpukul. Perdana Menteri mencoba dengan berbagai cara untuk menerobos blokade itu; ia juga menggunakan kapal-kapal yang besar yang dipunyai armada Aceh, di antaranya kapal yang bernama *Tjakra Donya*.<sup>45</sup> tetapi juga tanpa hasil. Ma-

45. Mengenal asal nama *Tjakra Donya* ini lihat misalnya G.L. Tichelman, "Tjakra Donja", *De Indische Gids* 61, (Amsterdam: N.V. Drukkerij en Uitgeverij, 1939). hal. 23-27.

kin lama makin banyak kapal Aceh yang tenggelam dan yang dapat dirampas oleh tentara Portugis, begitu pula tentaranya makin banyak yang tewas. Laksamana yang berada di daerah melihat saja armada Aceh dalam kesulitan, ia tidak dapat berbuat banyak, kecuali mencoba untuk mengadakan suatu perundingan dengan Botello. Pihak Portugis bersedia berunding asalkan tentara Aceh terlebih dahulu mau membebaskan orang penting Portugis yang bernama Pedro de Abreu yang berada dalam tawanan tentara Aceh. Tetapi permintaan ini ditolak oleh Laksamana. Pada akhir Nopember 1629 Perdana Menteri Maharaja Sri Maharaja tewas. Pada saat itu pula datang lagi tentara gabungan dari kerajaan-kerajaan Melayu, yang terdiri dari Johor, Pahang dan Patani dengan sekitar 1000 perahu layar untuk menambah bantuan kepada Portugis. Tentara Aceh tambah terdesak, Pedro de Abreu terpaksa dibebaskan oleh pihak Aceh. Laksamana meminta kelonggaran kepada pihak Portugis untuk mengundurkan diri bersama dengan 3 buah kapal Aceh, agar dia dapat membawa serta sisa-sisa tentara Aceh. Permintaan ini ditolak oleh pihak Portugis dan mereka meminta agar Laksamana dan sisa-sisa anak buahnya menyerah saja kepada mereka. Ini juga ditolak oleh Laksamana. Kemudian dengan sisa anak buahnya dia mencoba melarikan diri melalui daratan, agar dapat terhindar dari tangkapan orang-orang Portugis. Tetapi di daratan mereka dihadang oleh tentara Pahang. Tatkala keadaan benar-benar tidak mengizinkan lagi untuk dipertahankan, Laksamana menyerahkan diri kepada orang-orang Pahang dengan syarat dia tidak akan diserahkan kepada orang-orang Portugis.

Setelah diadakan suatu perundingan antara Sultan Pahang dan orang-orang Portugis di Malaka, maka orang-orang Pahang tidak menepati janjinya kepada Laksamana Aceh. Laksamana diserahkan kepada musuh utamanya, yakni

pihak Portugis. Orang-orang Portugis yang berada di Malaka begitu gembira, dapat menawan Laksamana Aceh yang cukup terkenal karena penaklukan-penaklukan yang pernah dilakukannya. Mereka berniat untuk membawa Laksamana ini ke Lisabon untuk dipertontonkan kepada umum di sana sebagai lambang/symbol kemenangan Portugis terhadap Aceh. Namun dalam perjalanan menuju ke Lisabon, Laksamana Aceh itu meninggal, sehingga maksud Portugis untuk membawa Laksamana sampai ke Lisabon tidak terlaksana.

Dengan meninggalnya Laksamana Aceh tersebut, boleh dikatakan hampir semua tentara Aceh yang ikut serta dalam peperangan itu tewas, kecuali 16 orang yang berhasil menyelamatkan diri dan tiba kembali di Aceh. Namun mereka ini pun sesudah sampai ke Aceh juga dibunuh, karena telah menyampaikan berita yang demikian buruknya kepada Sultan Iskandar Muda.

#### B. Akhir Dari Pada Konflik – Portugis

Dari penggambaran kontak dan konflik Aceh – Portugis di atas, dapat dilihat bahwa kegagalan Aceh dalam melawan Portugis tersebut disebabkan karena pihak Portugis selalu mendapat bantuan pada saat-saat yang diperlukan. Bantuan ini mereka terima baik dari kerajaan-kerajaan Melayu di Semenanjung Tanah Melayu maupun dari pihak Portugis sendiri yang didatangkan dari Goa. Bantuan-bantuan tersebut di atas kurang diperhitungkan oleh pimpinan armada Aceh. Selain itu juga karena tidak ada kekompakan di antara kedua pemimpin Aceh yang disertai tugas untuk memimpin peperangan tersebut oleh Sultan Iskandar Muda.

Sehubungan dengan kekalahan armada Aceh tersebut, Nugroho Notokusanto dalam bukunya *Sedjarah Dan Hankam* berpendapat bahwa kegagalan pihak Aceh dalam pepe-

rangan itu disebabkan karena pihak Aceh kurang memperhitungkan strategi dan taktik yang tepat dari peperangan tersebut. Pada hal kemampuan logistik yang dipunyai tentara Aceh dalam peperangan itu cukup besar.<sup>46</sup>

Mengenal pertempuran tersebut, salah seorang pedagang bangsa Belanda yang berada di Jambi, yakni yang bernama Jan Oosterwijk, menulis surat kepada Direktur Jendral Antonio van Diemen (penguasa VOC yang berkedudukan di Batavia) pada 15 Maret 1930 yang isinya antara lain sebagai berikut:

Vele zijn van opinie dat bijaldien den Atchinder met 3 a 4 van onse jachten waren gesecondeert ge weest (om' tontset wt Goa haer aencomptste en 'tsecours der Jhoristen en Patanjers te beletten) Mallacca sonder twijffel geincorporsert soude hebben.<sup>47</sup>

Tulisan yang senada juga diberikan oleh Gubernur Jendral J. Specx; dalam laporannya kepada para pimpinan *O.I. Compagnie* pada 7 Maret 1631 yang antara lain menulis sebagai berikut:

"De voorige belegeringhe heeft den Coninck (van Atjeh) heel secreet ende buyten onse als der Engelschen kennisse aengevangen, welcke hem zonder t'ontset, naer de bocomon rappolten ende opinien eenigher van daer overgecomen, oock apparent zulcx zoude hebben, 't welck door do ontseth van Goa, daer hun de secoursen van Pahang en Patana bij gevoecht hadden, zoo contrarie is gesuccedeert dat alle zijne navale macht, gescht ende volck geheel verlooren ende in de Portugiesen handen gevallen zijn, van welck ongeval wij hem met onse

---

46. Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 51-52.

47. T.Iskandar, *op.cit.*, hal. 49.

crussende jachten (wanner die maer wat versterck waren geweest) zouden hebben connen bevrijden, zoo den Connick ons zijn voornemen gecomuniceert ende des ver-  
socht hadde, . . .<sup>48</sup>

Dari kedua tulisan orang Belanda di atas, dapat disimpulkan bahwa, seandainya armada laut Aceh juga mendapatkan bantuan dari luar, misalnya dengan beberapa buah kapal saja dari pihak Belanda dan juga pihak Portugis tidak mendapat bantuan dari kerajaan Johor, Patani dan Pahang, mungkin Aceh tidak akan mengalami kekalahan dalam peperangan dengan pihak Portugis tersebut.

Akibat kekalahan dalam peperangan tahun 1629 itu, armada laut Aceh menjadi lemah. Maka dengan sendirinya pengontrolan atas daerah-daerah takluknya seperti di kota-kota pelabuhan pantai Barat Sumatra, di mana Aceh menjalankan sistem monopoli lada juga menjadi lemah. Begitu pula atas kerajaan-kerajaan di Semenanjung Tanah Melayu, Aceh tidak berpengaruh lagi, kecuali di kerajaan Perak. Di sana Aceh masih dapat menguasai perdagangan timahnya. Jadi kekalahan yang diderita Aceh dalam peperangan tahun 1629 itu, betul-betul merupakan suatu pukulan yang berat bagi Aceh. Sehubungan dengan hal ini, Bernad H.M. Vlekke dalam bukunya *Nusantara A History of Indonesia* mengatakan bahwa kekalahan armada laut Aceh dalam peperangan dengan pihak Portugis dan sekutu-sekutunya di Malaka pada tahun 1629, merupakan titik perubahan dalam sejarah Aceh<sup>49</sup>. Semenjak itu berangsur-angsur kegiatan kerajaan Aceh di laut mulai berkurang, sedang sebuah kekuatan baru, yakni pihak Kompeni Belanda mulai nampak keaktif-

---

48. *Ibid.*

49. Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara A History of Indonesia*, 's-Gravenhage: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, 1959, hal. 121.





## BAB II

### PERLAWANAN TERHADAP BELANDA

#### A. Latar Belakang Hubungan Aceh – Belanda

Kontak pertama kali antara Aceh dengan pihak Belanda terjadi pada tanggal 21 Juni 1599<sup>1</sup>, ketika dua buah kapal dagang bangsa Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan saudaranya Frederick de Houtman tiba di pelabuhan ibu kota kerajaan Aceh. Pada mulanya kedatangan kapal-kapal Belanda ini mendapat sambutan baik dari Sultan Aceh (Sultan Alauddin Riayat Syah al Mukammil, 1588 – 1604). Oleh karena dengan kehadiran para pedagang Belanda di Aceh diharapkan pasaran hasil-hasil bumi kerajaan Aceh, khususnya hasil lada akan menjadi bertambah ramai. Hal ini dapat diketahui dari sikap dan tindakan Sultan tersebut yang memberi sejumlah kesempatan kepada para pedagang Belanda untuk dapat dengan bebas membeli sejumlah lada di ibu kota kerajaan Aceh. Namun dalam perkembangannya akibat dari pada hasutan terhadap Sultan Aceh yang dilakukan oleh para pedagang Portugis yang pada waktu itu sedang berada di ibu kota kerajaan Aceh dan sedang berbaik dengan Sultan, maka menjadikan Sultan tidak senang terhadap para pedagang Belanda. Hal ini mengakibatkan adanya ketidak harmonisan hubungan antara pedagang-pedagang Belanda dengan pihak Aceh. Hasutan ini dilakukan oleh orang-orang Portugis karena mereka tidak menyenangi hadirnya pedagang-pedagang Belanda di Aceh yang dianggap sebagai saingannya.

---

1. Lihat laporan perjalanan John Davis yang menjadi nakhoda pada sebuah kapal Belanda ke Hindia Timur dalam tahun 1598, dalam Julius Jacobs, *Het Familie en Kampongleven op Groot Atjeh* II, (Leiden: E.J. Brill, 1894), hal. 180.

Tindak lanjut dari ketidak harmonisan hubungan ini adalah terjadi suatu penyerangan terhadap pedagang-pedagang Belanda di atas kapal-kapalnya oleh pihak Aceh. Akibatnya Cornelis de Houtman,<sup>2</sup> yang menjadi pimpinan Belanda bersama dengan sebagian anak buahnya mati terbunuh. Sedangkan sisanya dan saudaranya Frederick de Houtman tertawan oleh tentara Aceh.<sup>3</sup> Frederick de Houtman menjadi tawanan di kerajaan Aceh selama 2 tahun. Dan dalam masa itu dia telah berhasil menyusun sebuah karya ilmiah yaitu sebuah kamus Melayu – Belanda, yang merupakan kamus Melayu-Belanda tertua di Nusantara ini.<sup>4</sup>

Tidak berapa lama sejak peristiwa de Houtman, pedagang Belanda lainnya yakni Paulus van Caerden dengan memimpin dua buah kapal, setelah menyusuri beberapa pelabuhan di pantai Barat Sumatra, tiba di pantai Aceh pada 21 Nopember 1600.<sup>5</sup> Rupa-rupanya di sana ia dan anak buah kapalnya telah bertindak ceroboh, yaitu telah menenggelamkan sebuah kapal dagang Aceh dengan terlebih dahulu memindahkan segala muatan lada dari kapal itu ke dalam kapal-kapal mereka dan kemudian pergi begitu saja meninggalkan pantai Aceh. Tidak lama sesudah peristiwa di atas, datang lagi rombongan kapal Belanda lainnya di bawah pimpinan Laksamana Jacob van Neck ke ibu kota kerajaan Aceh. Mereka tidak mengetahui apa

---

2. Sebagaimana diketahui Cornelis de Houtman adalah yang menjadi pimpinan dan orang Belanda yang pertama kali menginjakkan kakinya di bumi Indonesia (Bantam 1596).

3. Lihat C. Lekkerkerker, *Land en Volk van Sumatra*, Leiden: E.J. Brill, 1916), hal. 314.

4. Lihat P.A. Tiele, "Frederick de Houtman in Atjeh," *Indische Gids* I, (1881), hal. 146 – 152.

5. F. Valentijn, *Oud en Nieuw Oost-Indie* I, (Amsterdam: Wed. J.C. Kesteven & Zonn, 1862), hal. 87.

yang telah dilakukan oleh Paulus van Caerden sebelumnya terhadap sebuah kapal dagang Aceh. Sewaktu mereka mendarat di ibu kota kerajaan Aceh pada tanggal 31 Juni 1601, mereka memperkenalkan diri kepada Sultan Aceh, bahwa mereka adalah pedagang bangsa Belanda, datang ke Aceh untuk mengadakan perdagangan dan bermaksud membeli sejumlah lada. Ketika Sultan mengetahui bahwa mereka adalah pedagang-pedagang Belanda, maka mereka ditawan dan diperlakukan secara tidak baik. Kepada mereka diberitahukan bahwa dua buah kapal dari bangsa mereka sebelumnya telah datang ke Aceh dan telah melarikan diri setelah menenggelamkan sebuah kapal dagang Aceh dan membawa serta sejumlah lada tanpa dibayarnya. Menurut Sultan sebagai ganti kerugian, Sultan telah memutuskan untuk menawan setiap kapal dan orang-orang Belanda yang datang dan berada di Aceh.<sup>6</sup>

Menjelang tahun 1602, pedagang-pedagang bangsa Belanda lainnya di bawah pimpinan Gerard de Roy dan Laurens Bicker dengan beberapa buah kapal tiba di pelabuhan Aceh. Mereka sengaja datang ke Aceh atas perintah Pangeran Maurits dari negeri Belanda dengan tujuan untuk menjalin suatu persahabatan dengan kerajaan Aceh. Bersama mereka dikirimkan pula hadiah-hadiah berharga dan sepucuk surat untuk dipersembahkan kepada Sultan Aceh. Isi surat tersebut secara garis besarnya adalah, bahwa Pangeran Maurits mengakui betapa baik sambutan yang telah diberikan oleh Sultan Aceh kepada para pedagang Belanda ketika me-

---

6. Kisah mengenai peristiwa ini, dapat dilihat dalam laporan perjalanan Jacob van Neck ke Aceh pada tahun 1600, dalam Julius Jacobs, *op.cit.*, hal. 189 - 198.

7. Surat Pangeran Maurits untuk Sultan Aceh ditulis dalam bahasa Spanyol. Teks lengkap surat tersebut, lihat lampiran No. 1 dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, lampiran No.2.

reka pertama kali tiba di pelabuhan Aceh. Adanya hasutan-hasutan pihak Portugis telah menyebabkan Sultan bertindak yang dirasa oleh pedagang-pedagang Belanda merugikan mereka. Selanjutnya dalam surat itu Pangeran Maurits juga memohon kepada Sultan Aceh untuk tidak mempercayai lagi hasutan-hasutan pihak Portugis tentang para pedagang Belanda di Aceh dan memohon pula agar Sultan membebaskan kembali orang-orang Belanda yang sedang ditawan di Aceh.

Laurens Bicker sebagai salah seorang pimpinan rombongan telah mengemukakan pula rasa menyesalnya atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Paulus van Caerden dan kawan-kawannya atas kapal dagang Aceh. Dia menjanjikan kepada Sultan Aceh akan menuntut kompeni dagang van Caerden karena tindakan-tindakannya itu, sesudah dia sampai kembali ke negeri Belanda. Janji Laurens Bicker itu rupa-rupanya benar-benar ditepati sesudah dia sampai ke negerinya. Karena kemudian sebuah mahkamah di Amsterdam telah menjatuhkan hukuman denda atas kongsi dagang van Caerden, dengan mengharuskan kongsi dagang tersebut membayar denda sebanyak 50.000 rupiah Belanda kepada pihak Aceh. Dan uang sejumlah itu benar-benar telah dibayarkan kepada kerajaan Aceh.<sup>8</sup> Rupa-rupanya pihak Belanda yang dipimpin oleh Laurens Bicker itu telah berhasil meyakinkan Sultan Aceh, karena kemudian Sultan telah bersedia untuk menerima mereka dengan baik di istana Aceh. Dan kepada mereka diberikan izin untuk dapat bebas berdagang di Aceh. Frederick de Houtman yang sebelumnya ditawan bersama dengan pedagang-pedagang Belanda lainnya diberi kebebasan kembali.

---

8. J.K.J. de Jonge, *De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie II*, ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1864), hal. 234.

Suatu peristiwa yang penting pula dikemukakan di sini adalah, bersama dengan kembalinya kapal Laurens Bicker dan Gerard de Roy ke negeri Belanda oleh Sultan Aceh telah dikirim dua orang utusannya untuk menghadap Pangeran Maurits dan Majelis wakil rakyat negeri Belanda.<sup>9</sup> Mereka ini merupakan wakil resmi yang pertama kali dari sebuah kerajaan di Asia yang telah mengunjungi negeri Belanda. Pihak Belanda yang pada waktu itu sedang berperang melawan Spanyol (perang 80 tahun), menerima utusan Aceh itu dalam suatu upacara kenegaraan yang diikuti pula oleh tamu-tamu terhormat dari beberapa negara Eropa lainnya.<sup>10</sup> Salah seorang dari utusan tersebut yang bernama Abdul Zamat (orang-orang Aceh menyebutnya Abdul Hamid) meninggal di kota Middelburg, dan atas biaya dari penguasa Kompeni Hindia Timur (VOC), ia telah dimakamkan di sana.<sup>11</sup> Utusan yang seorang lagi yakni yang bernama Sri Mohammad dapat pulang kembali ke Aceh dengan selamat.

Setelah terjalin hubungan baik ini, pedagang-pedagang Belanda dapat dengan bebas berdagang di Aceh. Kapal-kapal mereka yang memasuki kepulauan Indonesia maupun yang meneruskan pelayarannya ke Indo-Cina, Tiongkok dan Jepang dapat singgah secara leluasa di pelabuhan Aceh. Dapat disebutkan di antaranya adalah kapal yang dipimpin oleh De Meert, van Waerwijk, van Heemskerck, van Spilbergen dan van der Hagen. Yang tersebut terakhir adalah yang memimpin kapal yang membawa pulang kembali utusan Aceh dari negeri

---

9. Mengenai utusan Sultan Aceh ke negeri Belanda ini, dapat dilihat lebih lanjut misalnya dalam, Wap, *Hep Gezantschap van den Sultan van Achin A<sup>o</sup> 1602 aan Prins Maurits van Nassau en de oud Nederlandsche Republiek*, (Rotterdam: H.Nijgh, 1862), hal. 10-31.

10. *Ibid.*

11. Pieter van Dam, *Beschrijvinge van de Oost-Indische Compagnie I*, ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931), hal. 260.

Belanda. Mereka tiba di pelabuhan ibu kota kerajaan Aceh pada tahun 1604.<sup>12</sup>

Pada tanggal 17 Januari 1607, suatu perjanjian mengenai perdagangan dan hal-hal lain telah ditanda tangani antara Kompeni Belanda yang diwakili oleh Laksamana Muda Oliver van de Vivere dengan Sultan Aceh (Sultan Ali Riayat Syah, 1604 – 1607). Ada sebelas ketetapan yang telah dirumuskan dalam perjanjian itu.<sup>13</sup> Isi perjanjian tersebut secara garis besar yaitu, Sultan Aceh membebaskan pajak-pajak yang seharusnya dikenakan kepada pedagang-pedagang Belanda selama mereka berada di Aceh. Selain itu juga Sultan Aceh bersedia memberikan izin untuk membangun sendiri suatu tempat tinggal yang tetap bagi orang-orang Belanda yang tinggal di Aceh. Di tempat itu bila perlu orang-orang Belanda diperkenankan pula membawa ahli-ahli dan para keluarga mereka dari negerinya. Orang-orang berbangsa Eropa lainnya, tanpa izin dari pihak Belanda tidak diperbolehkan berada di tempat itu.<sup>14</sup>

Menurut J.K.J. de Jonge, perjanjian 17 Januari 1607 antara pihak Kompeni Belanda dengan Sultan Aceh merupakan suatu perjanjian yang sangat menguntungkan pihak Kompeni Belanda. Perjanjian seperti itu tidak pernah dijumpai di tempat-tempat lain di Indonesia pada waktu itu. Dan seandainya perjanjian itu benar-benar terlaksana, maka pusat kedudukan dan kegiatan Belanda di Hindia Timur (Indonesia) mungkin tidak pernah didirikan di Batavia tetapi di Aceh<sup>15</sup>. Meskipun demikian perjanjian itu tidak jadi

---

12. Moh. Said, *Atjeh Sepandjang Abad*, (Medan: diterbitkan oleh pengarang sendiri, 1961), hal. 140.

13. Isi perjanjian ini selengkapnya, lihat misalnya J.K.J. De Jonge, III (1865), *op.cit.*, hal. 223-225.

14. Lihat P.A. Tiele, "De Europeers in de Maleische Archipel" *BKI* 32, (1884), hal. 66.

15. J.K.J. de Jonge, *op.cit.*, hal. 51.

terlaksana karena Sultan yang menggantikan Sultan Ali Riayat Syah yakni Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636), membatalkan kembali perjanjian tersebut. Sehingga semua ketetapan yang telah disepakati dalam perjanjian itu tidak jadi terlaksana. Rupa-rupanya tindakan Sultan Iskandar Muda berbeda dengan Sultan sebelumnya. Iskandar Muda menyadari adanya keuntungan-keuntungan yang akan didapat dengan kehadiran pedagang-pedagang bangsa Belanda atau para pedagang asing lainnya ke Aceh sebagai pembeli lada dan barang-barang dagangan lainnya. Iskandar Muda ingin mendapatkan keuntungan dengan kehadiran mereka ke Aceh. Mungkin itulah salah satu sebab mengapa ia tidak mau mengakui perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Sultan sebelumnya dengan pihak Kompeni Belanda.

Meskipun perjanjian tersebut dibatalkannya, tetapi hubungan Iskandar Muda dengan pedagang-pedagang Belanda tetap baik. Hal ini dapat dilihat dari sikap Iskandar Muda yang masih mengizinkan para pedagang Belanda memiliki sebuah kantor dagang di ibu kota kerajaan Aceh, meski untuk itu mereka harus membayar sejumlah pajak kepada pihak Aceh. Namun karena peraturan-peraturan yang tegas dari Iskandar Muda menyebabkan para pedagang Belanda kurang menunjukkan keaktifannya dalam melakukan perdagangan dengan pihak Aceh. Pihak Belanda hampir memutuskan hubungan dagangnya dengan kerajaan Aceh pada waktu itu bila mereka tidak mempertimbangkan bahwa untuk merebut Malaka dari Portugis mereka tidak dapat meninggalkan Aceh begitu saja.<sup>16</sup>

Pada masa Iskandar Muda terdapat beberapa kapal dagang Belanda yang mengunjungi kerajaan Aceh, di antaranya

---

16. A.J.A. Gerlach, *Atjih en De Atjinezen*, (Arnhem: Thieme, DP, 1873), hal. 38.

dapat disebutkan ialah kapal-kapal dagang yang dipimpin oleh Hans de Hase yang tiba di pelabuhan Aceh pada Oktober 1614, kapal-kapal dagang yang dipimpin oleh Hendrick de Hase (Agustus 1615), dan rombongan kapal dagang yang dipimpin oleh Cornelis Comans (1616). Namun karena merasa tidak menguntungkan berdagang di Aceh, ditambah lagi dengan kekerasan dan ketegasan sikap Sultan Iskandar Muda terhadap mereka, maka pada bulan Maret 1616, pihak Belanda terpaksa menutup kantor dagang mereka di Aceh.<sup>17</sup>

Pada tanggal 22 April 1638, Gubernur Jenderal Kompeni Belanda yang berkedudukan di Batavia, yakni Antonio van Diemen mengirim utusannya yang bernama Roelafsen van Deutecom untuk menjumpai Sultan Aceh (Sultan Iskandar Thani, 1637 – 1641).<sup>18</sup> Sewaktu di Aceh, atas nama Kompeni India Timur (VOC) utusan ini mengajukan tiga permintaan kepada Sultan Iskandar Thani. Pertama ia minta kesediaan Aceh untuk membantu pihak Belanda bila mereka mengadakan suatu serangan terhadap Portugis di Malaka. Kedua, pihak Belanda meminta agar kepada mereka diberi hak-hak istimewa dalam melakukan perdagangan di Aceh dan di pelabuhan-pelabuhan pantai Barat Sumatra yang berada di bawah takluk kerajaan Aceh. Ketiga, pedagang-pedagang Belanda yang berdagang di Aceh agar dibebaskan dari bea cukai import dan ekspor terhadap barang-barang yang mereka perdagangkan di kerajaan Aceh. Kedua permintaan yang tersebut terakhir rupa-rupanya diterima oleh Iskandar Thani, sedangkan permintaan pertama pada mulanya juga disanggupi, tetapi karena perkembangan situasi selanjutnya

---

17. P.J. Veth, *Atchin en Zijne Betrekkingen tot Nederland*, (Leiden: Gethal, Kolft, 1887), hal. 75.

18. R.A. Hoesein Djajadiningrat, "Critisch Overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat Atjeh", *BKI* 65. (1911), hal. 185.

permintaan tersebut tidak jadi diterima. Maka melalui utusan Roelafsen van Deutecom, pihak Belanda telah berhasil mendapatkan hak-hak istimewa dalam perdagangan mereka di Aceh. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, kemudian pihak Belanda (pedagang-pedagangnya) dapat dengan leluasa melakukan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan pantai Barat Sumatra,<sup>19</sup> yang berlangsung hingga abad ke XVIII dan pertengahan abad ke XIX. Namun dalam perkembangannya situasi ini berubah lagi setelah pihak Belanda menghendaki agar seluruh pulau Sumatra termasuk wilayah Aceh berada di bawah pengaruh dan kekuasaannya.

## B. Konflik sebelum Perang Belanda – Aceh.

### 1. Pak Neerlandica dan Rencana Penaklukan Aceh.

Sebagaimana telah disinggung di muka hubungan baik antara Aceh dan Belanda yang sudah terbina selama 200 tahun lebih mulai nampak retak sejak pertengahan pertama abad XIX. Hal ini erat kaitannya dengan politik jajahan pemerintah kolonial Belanda sejak awal abad itu. Kalau di masa kompeni (VOC) mereka lebih mementingkan nilai-nilai komersial dari pada tanggung jawab politik, maka semenjak awal abad XIX ke dua faktor itu dilaksanakan secara seiring. Peperangan-peperangan yang secara sistematis dilancarkan terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa VOC lebih ditujukan untuk menguasai perdagangan (monopoli), tetapi setelah organisasi dagang Belanda itu dibubarkan ( $\pm$  1800 M) juga dalam rangka pembentukan Pax Neerlandica di seluruh wilayah Nusantara, termasuk Aceh yang pada waktu itu masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang berdaulat penuh.

---

19. E.B. Kielstra, *De Vestiging van het Nederlandsche Gezag in den Indischen Archipel*, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1920), hal. 108.

Dapat dikatakan titik tolak keretakan itu mulai nampak semenjak ditandatanganinya Traktat Pidie (1819 M) antara Aceh dan Inggeris. Perjanjian kerja sama di bidang politik dan ekonomi (terdiri dari 9 pasal) antara ke dua negara itu diamati oleh Belanda dengan penuh curiga. Menurut penilaian Belanda melalui perjanjian tersebut tidak mustahil pada gilirannya nanti Aceh akan menjadi milik Inggeris. Namun untuk secara langsung Belanda melibatkan diri dalam masalah-masalah Aceh tidak dimungkinkan pada waktu itu, mengingat pasal 6 Traktat Pidie yang menegaskan, bahwa Sultan Aceh tidak mengizinkan warga negara Eropah lainnya tinggal di Aceh dan tidak akan mengadakan hubungan dengan negara-negara Eropah tanpa sepengetahuan Pemerintah Inggeris.<sup>20</sup>

Kesempatan baik bagi pemerintah Hindia Belanda untuk campur tangan dalam masalah-masalah Aceh dalam rangka politik Pax Neerlandica di Nusantara ini – diperolehnya lima tahun kemudian, yaitu setelah ditandatangani Traktat London (1824 M), antara Pemerintah Belanda dan Inggeris. Isi perjanjian tersebut, yang terdiri dari 17 pasal, pada dasarnya adalah mengenai pembagian jajahan di wilayah Indonesia dan Semenanjung Melayu antara kedua negara itu. Ada tiga hal dari isi perjanjian tersebut yang menguntungkan pihak Belanda dalam hubungan dengan rencana penaklukan Aceh, yaitu:

- a. Pengalihan jajahan Inggeris di Sumatera kepada Belanda (pasal 9 dan 11) menyebabkan Belanda lebih dekat de-

---

20. Latar belakang lahirnya Traktat Pidie itu adalah perebutan kekuasaan di ibukota Kerajaan Aceh oleh Syaiful Alam Syah (1815 – 1819). Ini memberi kesempatan kepada Inggeris untuk turut campur tangan. Stamford Raffles (Wakil pemerintah Inggeris) berhasil memulihkan kembali kedudukan Sultan Jauhar Alam Syah (1795 – 1824) yang disingkirkan, tetapi didahului oleh penandatanganan traktat tersebut. Isi pasal demi pasal dan bahasan lebih lanjut, lihat E.S. de Klerck. *De Atjeh-Oorlog*, 1912, hal. 83-91.

ngan Aceh dan akan memudahkannya untuk mengadakan gerakan infiltrasi dan subversi ke wilayah dan/atau daerah pengaruh/perlindungan Kerajaan Aceh Darussalam. Meskipun dalam nota pemerintah Belanda yang mengiringi Traktat London itu ditegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati kemerdekaan Aceh, namun hal itu tidak mengurangi niat pemerintah Hindia Belanda untuk melaksanakan rencana tersebut.

- b. Dalam notanya pemerintah Inggris juga menyatakan, bahwa untuk memenuhi pasal 3 Traktat London, perjanjian yang pernah diadakan dengan Aceh tahun 1819 (Traktat Pidie) segera akan ditinjau kembali. Dan, karena tidak menguntungkan kedua pihak (Inggris – Belanda) sebagaimana dituntut di dalam pasal 3 itu, dengan sendirinya perjanjian tersebut harus dibatalkan.
- c. Dalam pasal 5 disebutkan, bahwa pemerintah Inggris dan Belanda berkewajiban untuk membasmi bajak laut; ini dapat dijadikan tameng oleh Belanda untuk melumpuhkan kapal-kapal Aceh yang terutama hilir mudik di perairan Selat Malaka. Dengan mudah Belanda menuduh kapal-kapal Aceh sebagai bajak laut yang mengganggu pelayaran internasional di selat itu.<sup>21</sup>

Bagaimana dengan ditandatanganinya Traktat London telah menyebabkan Aceh terisolir dari percaturan politik "tiga segi": Aceh, Inggris dan Belanda, terutama di per-

---

21. Pasal-pasal dan bahasan Traktat London dan hubungan dengan Aceh, lihat E.S. de Klerck, *op.cit.*, hal. 97 – 119; Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra*, 1969, hal. 11 - 13.

airan Selat Malaka yang strategis itu. Tampaknya kedua negara Eropah itu secara terselubung, tetapi berencana, berusaha untuk melumpuhkan Aceh, terutama di bidang politik dan ekonomi. Penjaminan kemerdekaan Aceh melalui nota mereka, sebagaimana tampak dari tindakan-tindakan mereka selama abad 19 rupanya lebih bersifat politis, sementara menunggu kesempatan untuk pada suatu waktu Aceh akan dipertaruhkan di antara kedua negara kolonial itu.

Sebagai realisasi lanjutan isi Traktat London pada tahun 1825 Inggeris menyerahterimakan juga Sibolga dan Natal kepada Belanda. Dengan demikian Belanda sudah berhadapan muka secara langsung dengan Kerajaan Aceh, yaitu di daerah perbatasan pantai Barat dan pantai Timur. Kesempatan ini dipergunakan oleh Belanda untuk mengacau wilayah Aceh dengan melalui taktik adu domba antara sultan dengan para uleebalang dan penguasa di daerah takluk/perlindungan Kerajaan Aceh. Selama tahun 1930-an Belanda secara aktif mengadakan gangguan dengan menganeksi wilayah atau daerah pengaruh Kerajaan Aceh di pesisir Barat dan Timur itu. Kegiatan ini lebih ditingkatkan lagi setelah ternyata Inggeris tidak pernah menghubungi Sultan Aceh guna membicarakan masalah Traktat Pidie sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Traktat London. Nampaknya Inggeris enggan untuk membatalkan perjanjian yang telah diadakan dengan Aceh itu; karena ditakuti pengaruh Belanda di Aceh semakin bertambah besar dan hal ini akan membahayakan hubungan dagang yang sudah dibina dengan Aceh. Karena itu Belanda semakin bernafsu untuk mengadakan pengacauan di sana: Daerah-daerah Singkil, Barus, Trumon di pantai Selatan dan daerah-daerah Teumiyang, Deli, Serdang dan Asahan di pantai Timur menjadi korban permainan politik Belanda. Dalam keadaan demikian

seringkali konflik bersenjata antara kedua pihak tidak dapat dihindari.<sup>22</sup>

Selama masa pemerintahan Sultan Ibrahim Mansyur Syah (1857 – 1870) kegiatan pengacauan wilayah Aceh oleh Belanda lebih ditingkatkan lagi, bahkan termasuk juga kegiatan spionase. Missi Courier Dubekart yang dikirim Gubernur Padang, van Swieten, tanggal 8 Februari 1855 sebenarnya lebih diletakkan pada tugas untuk menyelidiki suasana politik, pemerintahan dan militer kerajaan Aceh dari pada misi persahabatan. Laporan Dubekart menyebutkan, bahwa Sultan Aceh sangat marah kepada pemerintah Hindia Belanda karena tindakan-tindakan pengacauan dan pencopetan wilayah Aceh yang dilakukannya selama ini. Berdasarkan laporan tersebut Gubernur Jenderal di Batavia segera mengirimkan lagi sebuah misi yang diketuai oleh van Swieten dengan tugas untuk meredakan ketegangan politik yang terjadi antara kedua negara itu. Adapun hasil yang dibawa van Swieten selama kunjungannya ke Aceh, ialah ditandatanganinya perjanjian persahabatan kembali antara Aceh – Belanda pada tanggal 30 Maret 1857 (Perjanjian tersebut kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal dengan besluit no. 7, tanggal 9 Mei 1857).<sup>23</sup> Tetapi ternyata belum sampai satu tahun perjanjian itu ditandatangani, Belanda telah melanggarnya. Pada tanggal 1 Februari 1858 Belanda menyodorkan/memaksa pula sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Siak kepada Sultan Ismail dari Kerajaan Siak. Isinya, antara lain, dinyatakan bahwa Sultan Ismail sejak ditandatanganinya per-

---

22. Tentang adanya pengacau pihak Belanda dan kegiatan-kegiatan mereka sejak tahun 1830 sampai menjelang agresinya ke Aceh (1873), lihat antara lain, Beknopte Ency. van Nederlandsch Oost – Indie, hal. 21; E.S. de Klerck, *op.cit.*, Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 18-35.

23. Perjanjian ini terdiri dari 9 pasal; isinya secara lengkap, lihat, E.S. de Klerck, *op.cit.*, hal. 438-440.

janjian tersebut bersedia meletakkan kerajaannya di bawah kedaulatan Kerajaan Belanda dan ditegaskan lagi bahwa daerah Sumatera Timur yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil, seperti Asahan, Deli dan lain-lain adalah termasuk kerajaan-kerajaan yang mengakui kedaulatan Siak. Ini berarti pula kerajaan-kerajaan kecil tersebut dengan sendirinya menjadi kerajaan yang bernaung di bawah kedaulatan Belanda, justru induknya sendiri (Siak) telah bernaung di bawah kedaulatan Belanda.

Sebenarnya daerah-daerah yang disebutkan di atas itu adalah termasuk daerah takluk atau setidak-tidaknya daerah yang mengakui/bernaung di bawah kedaulatan Kerajaan Aceh Darusalam.<sup>24</sup> Karena tindakan Belanda demikian itu, maka hubungan antara Kerajaan Aceh dengan Belanda menjadi tegang kembali. Bahkan sebagai akibat dari perjanjian Siak itu timbul pula keretakan antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Siak mengenai masalah daerah perbatasan. Dengan demikian untuk kesekian kali konflik bersenjata antara Belanda dan Aceh tidak terhindarkan lagi, terutama dalam rangka usaha pihak Aceh untuk menegakkan kedaulatannya di sana.

Untuk menghadapi tindakan kesewenangan Belanda di daerah perbatasan itu, Sultan Ibrahim Mansyur Syah pada tahun 1860 mengirim pasukan ke sana di bawah pimpinan Tuanku Hasyim Banta Muda. Perlu ditegaskan, bahwa pengiriman ini adalah untuk ke dua kalinya selama pemerintahan Mansyur Syah; yang pertama pada tahun 1854 sebelum ditandatanganinya perjanjian tahun 1857 di bawah pimpinan Panglima Teuku Husein, dalam kedudukan Ibrahim Mansyur Syah sebagai pemangku Sultan.

---

24. Perjanjian Siak, kegiatan Belanda di Sumatera Timur dan batas wilayah Kerajaan Aceh, lihat lebih lanjut, Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 25-35.

Adapun tugas Tuanku Hasyim di daerah Sumatera Timur itu, ialah:

1. Mengamankan daerah-daerah Teumiyang, Langkat, Deli dan Serdang dari pengacauan Belanda serta membersihkan anasir-anasir yang ingin membantu Belanda.
2. Membangun benteng-benteng pertahanan, yang dalam bahasa Aceh disebut *kuta*, di daerah perbatasan dalam rangka menghadapi kemungkinan serangan tentara Belanda ke wilayah Kerajaan Aceh.

Untuk lebih menguatkan pasukan Tuanku Hasyim, sultan memerintahkan lagi Panglima Perang Daerah Uleebalang Meureudu, Teuku Muda Cut Latif, bersama pasukannya menuju ke sana. Usaha ke dua panglima ini dapat dikatakan berhasil mengukuhkan kedaulatan Kerajaan Aceh kembali di daerah perbatasan di samping berhasil juga membangun dua buah *kuta* pertahanan yang kuat di Pulau Kampai dan Teumiyang. Namun demikian, ini tidak berarti setelah itu Belanda tidak berminat lagi terhadap Aceh. Tindakan pengacauan masih saja tetap dilakukan, apalagi kedudukan Belanda di Tapanuli, Riau dan Sumatera Barat tampaknya semakin kuat, terutama setelah gerakan perlawanan rakyat di sana berhasil dipadamkan.

## 2. Persiapan menghadapi Perang

Tindakan-tindakan Belanda sejak pertengahan abad ke XIX, sebagaimana telah diungkapkan di atas, cukup membuktikan bahwa Belanda sedang berusaha keras untuk menanam kekuasaannya di Aceh. Di situ pihak Belanda mengadakan perjanjian persahabatan dengan Aceh, tetapi di lain pihak Belanda mengadakan pengacauan dan bahkan mengadu domba Aceh dengan daerah takluknya ("Verdeelheid te

wekken tusschen Atjeh en de onderworpen state”).<sup>25</sup> Sultan Ibrahim Mansyur Syah menginsafi benar apa yang sedang dikerjakan Belanda selama ini. Tindakan-tindakannya itu adalah tidak lain untuk mengukur sejauh mana kekuatan Kerajaan Aceh. Sudah dapat diduga, bahwa akhirnya hanya menunggu waktu saja – Belanda akan melancarkan agresinya ke Aceh.

Sadar akan hal ini pemerintah Kerajaan Aceh segera mengambil langkah-langkah dalam rangka menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Rakyat di daerah-daerah mulai disiap-siagakan untuk menghadapi kemungkinan perang. Suasana untuk menghadapi perang juga nampak dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengokohan kembali kekuasaan sultan, baik di bidang pemerintahan (pusat dan daerah), militer, ekonomi maupun diplomasi.

Dalam rangka menguatkan kembali kekuasaan kerajaan yang memang sudah jauh mundur bila dibandingkan dengan abad XVI dan XVII, Sultan Ibrahim Mansyur Syah mengambil langkah-langkah, antara lain, sebagai berikut:

- a. Menggiatkan penarikan pajak (*wasee*) dari daerah-daerah uleebalang untuk mengisi kas negara. Sedang dalam usaha meningkatkan kemakmuran rakyat, Sultan menyerukan pula agar rakyat menggiatkan usaha penanaman lada. Agaknya Sultan Ibrahim Mansyur Syah bercita-cita hendak mengembalikan keadaan ekonomi Aceh seperti pada zaman Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636) dulu, kendati pun dalam hal ini tidak banyak memperoleh hasil.
- b. Mengadakan pengawasan yang ketat di semua pelabuhan Aceh, baik sepanjang pantai Utara dan Timur mau-

---

25. *Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch Oost-Indie*, hal. 21.

pun di sepanjang pantai Barat dan Selatan. Tindakan ini diambil untuk menutup kemungkinan masuknya kapal-kapal dagang, juga tidak mustahil kapal perang Belanda ke daerah-daerah.

- c. Memperkuat pertahanan wilayah dengan mendirikan kuta-kuta pertahanan di daerah-daerah pantai yang dianggap strategis.
- d. Meningkatkan kegiatan hubungan diplomatik dalam rangka mencari bantuan senjata dan dukungan politis luar negeri, meskipun segi perdagangan juga tidak diabaikan.

Sehubungan dengan kegiatan diplomasi di luar negeri, negara pertama yang menjadi pusat perhatian Aceh ialah negara Turki. Karenanya hubungan diplomatik yang memang telah ada sejak pertengahan pertama abad XVI dipererat kembali, meskipun dari negara itu tidak banyak yang yang bisa diharapkan, berhubung kedudukannya pada abad XIX tidak lagi dipandang sebagai negara kuat yang disegani, terutama di Eropah. Perhatian ditujukan ke sini kiranya di dasarkan pada pertimbangan, bahwa antara ke dua negara mempunyai persamaan azas, yaitu sebagai negara Islam.

Pada tahun 1850 Sultan Ibrahim Mansyur Syah mengirim Sidi Muhammad sebagai utusannya ke Turki. Melalui sepucuk surat sultan meminta agar Turki bersedia melindungi Aceh dari rongrongan Ingeris dan Belanda. Sebagai hasilnya Sultan Abdul Majid dari Turki mengeluarkan dua buah pengumuman resmi kerajaan yang berisi kesediaan Turki untuk memenuhi permintaan Sultan Ibrahim dan pengokohnya sebagai Sultan Aceh. Untuk menguatkan pengumuman resminya itu, Sultan Abdul Majid menginstruksikan

pula agar Gubernur Yaman selalu memperhatikan dan mengawasi kepentingan Aceh.<sup>26</sup>

Tampaknya Sultan Ibrahim gembira sekali atas sambutan baik sultan Turki itu, terutama yang berkaitan dengan isi pengumuman ke dua, yang memberi dukungan politis kepada Sultan Ibrahim untuk menjadi Sultan Aceh (perlu diketahui pada waktu itu Ibrahim Mansyur Syah adalah pemangku sultan (1837 – 1857) dan sedang berusaha untuk menggeser kedudukan Sultan Ali Iskandar Syah yang masih di bawah umur). Sebagai imbalannya pada tahun 1855 Sultan Ibrahim mengirim uang sejumlah 10.000 dolar guna membantu Turki yang sedang terlibat dalam Perang Krim (1854 – 1856). Dan untuk membalas jasa, Sultan Turki tidak lupa pula memberikan bintang kerajaan (*Mejidie*) kepada Sultan Ibrahim Mansyur Syah.<sup>27</sup> Namun, mengenai bantuan senjata yang diharapkan sampai pecahnya perang Belanda di Aceh (1873) tidak pernah kunjung tiba dari Turki.

Salah satu negara Eropah yang mempunyai hubungan baik dengan Sultan Ibrahim Mansyur Syah ialah Perancis. Dari negara ini Sultan telah menerima dua buah surat yang pokok isinya ialah Perancis menyatakan sikap bersahabat dengan Kerajaan Aceh, terutama dalam hubungan perdagangan. Surat pertama tertanggal 2 Januari 1843, ditanda tangani oleh Raja Louis Philippe serta Menteri Luar Negeri Guizot.<sup>28</sup> Surat kedua dikirim oleh Napoleon III yang dibawa pulang oleh Sidi Muhammad pada tahun 1853. Bersama dengan surat itu Napoleon III mempersembahkan sebilang pedang kehormatan yang tampaknya diterima oleh sultan dengan suka cita.<sup>29</sup>

---

26. Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 84.

27. *Ibid.*,

28. Salinan surat tersebut selengkapnya, lihat E.S., de Klerck, *op.cit.*, hal. 435.

29. Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 21, 84.

Keberhasilan yang diperoleh di Eropah pada waktu itu erat hubungannya dengan kecekatan Sidi Muhammad, yang di samping bertugas sebagai utusan Aceh di Turki, juga telah bersedia untuk menjadi duta keliling di Eropah (1851 – 1853). Di kota-kota yang dikunjungi ia selalu mengemukakan tentang adanya praktek-praktek pelanggaran teritorial yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap Kerajaan Aceh. Apa yang dikemukakan oleh Sidi Muhammad kemudian hari juga dibenarkan oleh seorang Italia, Cesar Moreno, yang lama tinggal di Aceh (1859 – 1862) dan kenal baik dengan Sultan Ibrahim. Di Eropah dan Amerika, Moreno banyak membela kepentingan Aceh.<sup>30</sup>

Dalam situasi konflik politik dengan Belanda yang tampaknya semakin meningkat, pada tahun 1870 Sultan meninggal dunia. Sebagai penggantinya dinobatkan Sultan Mahmud Syah II (1870 – 1873) yang masih di bawah umur (sekitar 14 tahun). Karena itu dengan persetujuan para pembesar kerajaan ditunjuk Habib Abdurrahman Az-Zahir sebagai pemangku sultan dan merangkap sebagai menteri luar negeri (Mangkubumi yang juga melaksanakan urusan-urusan luar negeri).

Tugas sultan baru dalam kaitan dengan persiapan untuk menghadapi kemungkinan serangan Belanda adalah melanjutkan usaha-usaha yang telah dirintis selama ini. Untuk kali ini kegiatan diplomasi dipercayakan kepada Habib Abdurrahman dan Panglima Tibang (Syahbandar Pelabuhan Bandar Aceh Darussalam). Pengiriman ke dua tokoh ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka cukup mampu untuk pekerjaan tersebut, meskipun sebagaimana ternyata kemudian tidak memperoleh hasil seperti yang diharapkan, terutama dalam memperoleh bantuan senjata luar negeri. Ketidak berhasilan

---

30. *Ibid.*, hal. 85 – 6.

Habib dan Tibang erat kaitannya dengan watak pribadi mereka masing-masing. Ke dua tokoh ini sebenarnya lebih merupakan avonturir politik dari pada tanggung jawabnya kepada negara. Tindakan-tindakan mereka selama berada di Aceh, seperti perlombaan perebutan pengaruh di kalangan istana yang telah menyebabkan timbul keretakan di antara para pemimpin Aceh (golongan Habib dan golongan Tibang), pengkhianatan Tibang pada permulaan agresi Belanda (1873) dan penyerahan Habib tahun 1878 cukup membuktikan hal itu. Mereka adalah pendatang dari luar yang mendapat kedudukan baik di Aceh.<sup>31</sup>

Habib meninggalkan Aceh pada awal Januari 1873 dengan tujuan negara-negara Turki, Mesir, Mekah dan Eropa. Kalau ditilik dari kecakapan dan identitas yang dimiliki (*Habib*, keturunan Nabi Muhammad SAW) kiranya ia tidak akan banyak menemui kesulitan dalam mengadakan kontak dengan negara-negara Islam. Tetapi ternyata, setelah satu tahun berkeliling di sana, hasil yang diperoleh dapat dikatakan tidak ada, dari segi politik dan militer missinya yang gagal. Habib tidak segera kembali ke Aceh; ia tinggal di Penang selama dua tahun. Untuk menutupi kegagalannya ia bekerja sama dengan Dewan Delapan (suatu organisasi orang Aceh di Penang) bagi kepentingan perjuangan rakyat Aceh.

Panglima Tibang berangkat ke Singapura September 1872 dengan tugas membeli kapal perang. Ternyata ia tidak segera ke sana, tetapi di Riau karena terpengaruh oleh saran seorang Belanda, van Akkere.<sup>32</sup> Dan agaknya dari sini pangkal mula perobahan sikap Tibang untuk memihak kepada Belanda. Dalam hubungan ini peranan Residen Riau, Schiff,

---

31. Riwayat hidup ringkas Habib Abdurrahman dan Panglima Tibang, lihat antara lain, *Ibid.*, hal. 81-3.

32. E.S. de Klerck, *op.cit.*, hal. 377.

besar artinya. Dengan perantaraan Tibang, Schiff menyampaikan permohonan kepada Sultan Aceh untuk sudi menerimanya dalam rangka menyelesaikan masalah perampokan kapal Gipsy yang telah menyebabkan makin meruncingnya hubungan Aceh – Belanda (kapal Aceh yang dirampok Belanda di perairan Selat Malaka).

Dalam perjalanan pulang, Tibang singgah di Singapura, dan di sini ia berkenalan dengan Muhammad Arifin, seorang pembantu setia W.H.M. Read, konsul Belanda di Singapura. Arifin yang pernah lama menetap di Aceh nantinya termasuk seorang yang besar jasanya kepada Belanda dalam mengungkapkan rahasia diplomasi Aceh di kota tersebut.<sup>33</sup>

Panglima Tibang tiba kembali di Aceh (November 1872) tanpa membawa hasil apa-apa, selain dari pada pesan Schiff. Namun berdasarkan pertimbangan politis pada waktu itu permintaan Schiff ditolak dan untuk menyampaikannya sekali lagi Tibang di utus ke sana untuk selanjutnya ke Singapura (Tiba di Singapura Januari 1873).

Di Singapura Tibang mengadakan perundingan dengan konsul Amerika dan Italia yang dengan cermat diikuti oleh kawan dekatnya Muhammad Arifin (apakah Tibang tidak mengetahui gerak-gerik Arifin atau sengaja membiarkannya ikut dalam perundingan, tidak jelas diketahui; dan bahkan Tibang seringkali mengikuti petunjuk yang diberikan Arifin dalam sidang-sidang yang diadakan di sana).

Konsul Amerika, Mayor Studer, menyambut baik permohonan bantuan sultan Aceh dalam rangka menghadapi agresi Belanda dan untuk ini telah dipersiapkan konsep perjanjian bilateral untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sedang konsul Italia telah menjanjikan dua buah

---

33. Mengenai siapa Muhammad Arifin itu, lihat lebih lanjut, Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 91; kegiatan Tibang di Riau, lihat, E.S. de Klerck, *op.cit.*, hal. 377-79.

kapal untuk segera diberangkatkan ke Aceh.<sup>34</sup> Tetapi hasil perundingan ini segera dilaporkan oleh Muhammad Arifin kepada konsul Belanda, Read, yang segera pulang mengawatkan ke Batavia dan Den Haag. Berdasarkan laporan itu Pemerintah Belanda meminta kepada pemerintah Amerika dan Italia agar menghentikan kegiatan konsulnya di Singapura, sehingga untuk ke dua kali misi Tibang menemui kegagalan.

Suatu kegiatan diplomasi yang juga besar artinya dalam menghadapi agresi Belanda ialah yang dilakukan oleh para pemimpin Aceh yang bertempat tinggal di Penang. Mereka itu antara lain, ialah: Teuku Paya, Teuku Ibrahim dan Nyak Abbas. Atas inisiatif mereka sejak bulan Agustus 1872 telah berhasil dikirim ke Aceh sebanyak 15.000 pucuk senjata dengan 5.000 peti pelurunya.<sup>35</sup> Dan untuk lebih terkonsolidasi kegiatan mereka didirikan pula sebuah organisasi yang disebut: Dewan Delapan. Anggota-anggotanya pada waktu didirikan ialah: Teuku Paya (ketua), Teuku Ibrahim, Syekh Ahmad, Nyak Abu, Panglima Perang Haji Yusuf, Gullahmeidin, Umar, dan Syekh Kassim.<sup>36</sup> Organisasi ini mempunyai arti penting bagi perjuangan rakyat Aceh, yakni sebagai pos terdepan untuk hubungan luar negeri dan sebagai penyalur perbekalan perang ke Aceh.

Selain kegiatan yang telah kita sebutkan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah II, suasana menghadapi perang di dalam negeri ditandai pula dengan kegiatan-kegiatan memperkuat pertahanan wilayah. *Kuta* pertahanan di sepanjang pantai Aceh Besar, seperti Kuta Meugat, Kuta Pohama, Kuta Mosapi dan lain-lain diperkuat kembali. De-

---

34. Kegiatan Tinang di Singapura, lihat, *Ibid.*, hal. 387 - 90; Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 91 - 4.

35. M.H. Szekely - Lulofs, *Tjoet Nja Din*, terjemahan A.Moeis Chailan Sjamsoe, Djakarta, 1954, hal. 47.

36. Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 131.

mikian juga Gunongan, istana (*Dalam*) dan Mesjid Raya Baiturrahman. Tegasnya semua tempat-tempat yang strategis telah disiap siagakan, termasuk kuta-kuta pertahanan di daerah-daerah, seperti Kuta Asan di Pidie yang sejak sepeinggal Iskandar Muda tidak pernah diperhatikan lagi. Sehubungan dengan ini Sidi Tahil, seorang juru bahasa yang menjadi penghubung antar Belanda dan Sultan Aceh, beberapa hari menjelang pecahnya perang melaporkan, bahwa menurut penilikannya pada tanggal 22 Maret 1873, yaitu sewaktu ia membawa surat Nieuwenhuijzen kepada Sultan, ada sekitar 300 orang pasukan yang bertugas menjaga pantai sejak dari Kuala Aceh sampai ke Tibang di ujung pesisir Utara. Demikian juga laporan Teuku Ne' Meuraksa (seorang uleebalang yang memihak kepada Belanda) kepada Komisaris Pemerintah Hindia Belanda itu, bahwa sekitar istana (*Dalam*) telah disiap siagakan sejumlah pasukan yang cukup kuat.<sup>37</sup>

Demikianlah gambaran singkat mengenai situasi Daerah Aceh sampai menjelang pecahnya perang Belanda tahun 1873. Adanya konflik politik, ekonomi dan militer dengan Belanda sejak pertengahan pertama abad XIX menyebabkan rakyat Aceh mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan perang. Namun, keadaan politik dalam negeri dapat dikatakan tidak menguntungkan. Di satu pihak kelihatan pemerintah pusat yang lemah dalam kekuasaan dan kewibawaan; bahkan pada saat-saat menghadapi musuh itu timbul keretakan dalam lembaga pemerintahan kerajaan (pertentangan antara Habib Abdurrahman dan Panglima Tibang) yang dapat melemahkan kekuatan perjuangan. Tetapi dilain pihak terdapat pula daerah-daerah uleebalang yang kuat; bebas ber-

---

37. Lihat lebih lanjut, E.S. de Klerck, op.cit., hal. 428.

tindak sendiri, terutama dalam rangka memperluas daerahnya masing-masing. Namun adanya kebebasan daerah untuk memperbanyak senjata besar artinya dalam menghadapi perang Belanda nanti.

Berlainan dengan situasi politik adalah situasi kemasyarakatan. Masyarakat Aceh adalah masyarakat Islam yang dapat bersatu dengan keyakinannya itu. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila rakyat Aceh dengan semangat tinggi mempersiapkan diri untuk menghadapi perang dengan Belanda yang dihayatinya sebagai musuh Islam. Bagaimana reaksi Belanda terhadap kesiap-siagaan rakyat Aceh itu, akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian berikut; tetapi yang jelas sikap Belanda tetap tidak berubah, yakni bertekad bulat untuk memasukkan Aceh sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda dalam rangka perwujudan Pax-Neerlandica yang dicita-citakannya.

### **C. Masa Perang 1873 – 1912.**

#### **I. Realisasi Penaklukan Aceh**

Sejalan dengan usaha perwujudan Pax-Neerlandica itu, maka sejak tahun 1870 tampaknya Belanda makin bernafsu untuk menaklukkan Aceh. Ada dua faktor yang menyebabkannya, yakni: yang pertama; sejak tahun itu dikeluarkan Undang-undang Agraria yang berarti prinsip-prinsip liberalisme mulai dipraktekkan di Indonesia, tetapi tetap tidak terlepas dari kaitan untuk tujuan penjajahan. Dengan keluarnya undang-undang tersebut, maka usaha swasta dari berbagai bangsa mulai menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi "asing" ini bersama dengan investasi kolonial Belanda sendiri mulai mengeruk hasil kekayaan Indonesia secara lebih intensif lagi. Sedang bangsa Indonesia dipaksakan bekerja sebagai buruh/kuli kontrak dalam perusahaan mereka. Dengan

demikian zaman imperialisme moderen mulai muncul di Indonesia menggantikan zaman imperialisme kuno.

Belanda, sebagai tuan rumah tanah jajahan, harus memikirkan segenap faktor penampungan kegiatan modal asing yang sedang berlangsung; mereka harus mampu memberikan fasilitas-fasilitas istimewa. Untuk ini wilayah Indonesia yang masih merdeka perlu segera dimiliki. Mulailah ekspansi secara lebih intensif dilancarkan lagi pada akhir abad XIX; dan tampaknya Pulau Sumatera adalah merupakan prioritas pertama dari rencana ekspansi tersebut, sedang penaklukkan Aceh termasuk rencana utama dari prioritas itu.<sup>38</sup>

Pemilihan Belanda dengan meletakkan Pulau Sumatera sebagai prioritas pertama dari rencana ekspansi itu mengandung beberapa pertimbangan dasar, yakni, antara lain ialah faktor-faktor ekonomis dan geografis pulau tersebut cukup memungkinkan untuk tercapainya tujuan penjajahan yang telah digariskan; dari segi politis, khususnya Kerajaan Aceh selama ini adalah merupakan penghambat utama dari gerak perluasan kekuasaan Belanda di sepanjang pesisir Timur dan Selatan pulau tersebut. Selain itu modal dari berbagai bangsa Barat yang sedang ditanam terutama di daerah Sumatera Timur juga memerlukan jaminan keamanan dan salah satu cara yang paling tepat adalah dengan menundukkan Kerajaan Aceh, sebab selama kerajaan itu belum ditundukkan selama itu pula serangan akan selalu ditujukan terhadap kekuasaan Belanda di sana.

Sebagai faktor ke dua yang menyebabkan Belanda semakin berambisi untuk menaklukkan Aceh adalah dibuka Terusan Suez pada tahun 1869 M. Pembukaan terusan itu

---

38. Brian Harrison, *South East Asia a short History*, Mac Millan & Co Ltd, London, 1960, hal. 202.

telah mengakibatkan dunia mengalami perubahan besar, terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial. Lalu lintas internasional antara Timur dan Barat semakin bertambah ramai; dan karenanya ekspansi perdagangan dan penjajahan Barat juga menunjukkan skala menaik di seluruh Asia. Dalam keadaan demikian suatu kompetisi internasional antara bangsa Barat itu tidak bisa dihindari, terutama dalam memenangkan perdagangan dan memperebutkan tanah jajahan.<sup>39</sup>

Aceh suatu negara merdeka yang berdaulat penuh di pintu gerbang masuk Selat Malaka, sebenarnya juga turut memikul tanggung jawab pengamanan, meskipun hal itu sukar dipenuhi, mengingat persenjataannya yang lemah bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa Barat yang sedang terlibat dalam kompetisi antara mereka sendiri. Tetapi sebagai pintu gerbang masuk, semakin kelihatan pula pentingnya kedudukan Aceh di bidang politik, ekonomi dan militer bagi bangsa Barat.

Posisi strategis Aceh demikian menyebabkan Belanda semakin khawatir akan kemungkinan Aceh jatuh kepada salah satu negara Barat lainnya. Hal ini mendesak Belanda untuk cepat-cepat meninggalkan strategi lama dalam menaklukkan Aceh (hanya terbatas dengan menganeksi, mencopot atau mengacau wilayah Aceh sebagaimana telah dijelaskan di muka).

Tetapi, bagaimanapun, dalam hubungan dengan perang terbuka Belanda belum berani bertindak mengingat keterikatannya dengan Traktat London tahun 1824 M. Keterbatasan bidang gerakannya itu telah mendorong Belanda berusaha untuk memperbaharui perjanjiannya dengan Inggris. Pada

---

39. Lihat lebih lanjut, *Ibid.*, hal. 197 – 198.

tanggal 2 Nopember 1871 ke dua negara itu berhasil memperbaharui Traktat London dengan menandatangani perjanjian baru yang dikenal dengan Traktat Sumatera. Isinya yang penting, sehubungan dengan keinginan Belanda untuk meluaskan kekuasaannya di Pulau Sumatera, termasuk Aceh, adalah pemberian kebebasan bertindak bagi Belanda di pulau tersebut.<sup>40</sup> Dengan demikian bagi Belanda hanya tinggal pelaksanaan teknis saja untuk melancarkan penyerangan langsung terhadap Aceh.

Sehubungan dengan pelaksanaan teknis itu, langkah yang diambil adalah lebih menggiatkan gerakan subversif dan pengintaian untuk mengetahui kekuatan Aceh. Selain itu tindakan blokade dan intimidasi juga tidak diabaikan. Tahun 1871 — sedang Traktat Sumatera dalam proses pengesahan di Majelis Rendah — Kolonel Kroesen diperintahkan ke Aceh untuk menyelidiki sejauh mana kekuatan yang telah dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan perang. Selanjutnya tempat yang strategis untuk pendaratan pasukan perlu diteliti. Tugas ini dibebankan kepada E.R. Kraijenhoff yang segera menuju ke Aceh dengan alasan untuk membawa surat resmi kepada Mangkubumi Habib Abdurrahman.<sup>41</sup> Hasil penyelidikan mereka dapat disimpulkan, bahwa Aceh jauh lebih lemah — mungkin yang dimaksudkan persenjataan bila dibandingkan dengan masa yang lalu.

Pengangkatan James Loudon sebagai Gubernur Jenderal baru di Indonesia pada awal Januari 1872 menunjukkan bahwa penyerangan ke Aceh akan segera direalisasikan. Ini dapat diketahui dari kata-kata Loudon sendiri yang menyatakan bahwa Aceh harus segera diserang, meskipun kata-kata itu

---

40. Isinya yang terdiri dari 4 pasal dalam bahasa Belanda dan Inggris, lihat E.S.de Klerck, *op.cit.*, hal. 457 — 59.

41. Lihat lebih lanjut, Paul Van't Veer, *de Atjeh Oolog*, Amsterdam, 1969. hal. 39.

pada hakekatnya lebih menunjukkan ambisi pribadinya untuk memperoleh jabatan tersebut (diucapkan sebelum ia diangkat menjadi Gubernur Jendral). Seiring dengan pengangkatan Loudon, Menteri Tanah Jajahan van de Putte menginstruksikan agar penyerangan Aceh tidak perlu ditunda lebih lama lagi.

Untuk memenuhi instruksi Menteri Tanah Jajahan itu, tanggal 2 Maret 1873 Loudon mengadakan sidang khusus Dewan Hindia Belanda. Keputusan sidang yang dibesluitkan oleh Gubernur Jenderal tanggal 4 Maret 1873 adalah sembilan pasal tentang pengaturan secara teknis pelaksanaan penyerangan ke Aceh.<sup>42</sup> Ditetapkan dalam keputusan itu F.N. Nieuwenhuijzen, Wakil Ketua Dewan Hindia Belanda adalah sebagai Komisararis Pemerintah untuk Aceh; dan diharapkan sudah dapat berangkat ke sana sekitar tanggal 7 Maret 1873. Kapal-kapal yang dipersiapkan untuk mengangkut rombongan, perbekalan dan pasukan, ialah Citadel van Antwerpen, Siak, Coehorn dan Marnix. Pelaksanaan penyerangan seharusnya diawali dengan surat menyurat dan apabila Sultan menolak untuk menyerah baru diikuti dengan pernyataan perang dan penyerangan.

Sementara itu Menteri Tanah Jajahan, van de Putte memberikan laporan kepada Majelis Rendah di Den Haag. Adanya tantangan keras dari beberapa anggota Majelis terhormat itu, terutama dari anggota Partai Liberal, rupanya tidak mengurangi niat pemerintah Belanda untuk menyerang Aceh. Demikian juga dengan himbauan Multatuli, yakni, apakah pemerintah Belanda dengan begitu mudah dapat melupakan pengakuan de facto dan de jure yang diberikan oleh kerajaan Aceh melalui missinya tahun 1602 kepada kerajaan Be-

---

42. Salinan besluit Gubernur Jenderal itu selengkapnya, lihat, E.S. de Klerck, *op.cit.*, hal. 470 - 2.

landa yang pada waktu itu sedang gigih mempertahankan kemerdekaannya dalam perang 80 tahun (1568 – 1648) dengan Spanyol.<sup>43</sup> Tindakan pemerintah Belanda selama ini dengan mencopot dan menganeksi wilayah Aceh di daerah perbatasan pesisir Timur dan Selatan sebenarnya sudah cukup menjatuhkan nilai kemanusiaan Bangsa Belanda, apalagi dengan melancarkan perang terbuka terhadap suatu kerajaan yang telah berjasa kepada Kerajaan Belanda, justru di saat-saat yang paling dibutuhkannya.

Selanjutnya permohonan Sultan Aceh untuk memperoleh bantuan senjata dan kapal kepada konsul Amerika dan Italia, seperti telah dikemukakan di muka, telah mendorong pihak Belanda untuk mempercepat proses peperangan. Untuk ini Jenderal Mayor Kohler segera diperintahkan ke sana untuk memimpin penyerangan.

Sehubungan dengan rencana tersebut, tanggal 22 Maret 1873 kapal Citadel van Antwerpen yang membawa Komisaris Nieuwenhuijzen telah berlabuh di perairan Bandar Aceh Darussalam. Sebuah surat yang berisi permintaan agar sultan mengakui kedaulatan Belanda disampaikan melalui juru bahasa Sidi Tahil. Dalam surat itu dinyatakan berbagai alasan sehubungan dengan permintaan tersebut, termasuk tuduhan bahwa Aceh telah melanggar pasal-pasal perjanjian 30 Maret 1857 (perjanjian yang lebih dahulu, yaitu sejak tahun 1858 telah dilanggar oleh pihak Belanda sendiri, seperti telah diuraikan). Surat balasan dari Sultan yang bertanggal 23 Maret 1873 ternyata sama sekali tidak menyinggung apa yang dikehendaki oleh Belanda. Karena itu surat Nieuwenhuijzen yang kedua menyusul pula untuk menegaskan lagi isi surat-

---

43. Misi itu terdiri dari Abdul Hamid dan Sri Muhammad. Abdul Hamid meninggal di sana dan dikuburkan di Middleburg; Lihat juga, de Graaf, *Geschiedenis van Indonesie*, van Hoeve, Bandung, 1949, hal. 300.

nya yang pertama. Tetapi jawaban sultan tetap pada pendiriannya, yaitu dengan tegas dinyatakan tidak dapat memenuhi ajakan Belanda. Demikian juga melalui surat-surat yang susul-menyusul berikutnya.<sup>44</sup>

Sikap Sultan Aceh yang tegas dan pasti itu telah mendorong Belanda untuk segera menyatakan perang terbuka. Maka pada tanggal 1 April 1873 Komisariat Pemerintah Hindia Belanda untuk Aceh, Nieuwenhijzen, dengan resmi mengumumkan *Oorlogsverklaring* yang bertanggal 26 Maret 1873. Sebagai alasan utama yang disebutkan dalam pengumuman perang itu adalah untuk terjaminnya keamanan di bagian Utara Pulau Sumatera.<sup>45</sup> Suatu alasan yang terlampau berlebihan, sebab ketidakstabilan keamanan di jalur pelayaran internasional itu, terutama lebih diperankan oleh pihak mereka sendiri.

Beriringan dengan dikeluarkannya ultimatum tersebut pemerintah Hindia Belanda juga telah mempersiapkan pasukannya dengan kekuatan tidak kurang dari 3360 orang.<sup>46</sup> Dan pada tanggal 5 April 1873 pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor J.H.R. Kohler mulai mendarat di pantai Pantee Ceureumen (arah ke Timur pelabuhan Ulee Lheue, kira-kira 5 Km. dari ibu kota Banda Aceh Darussalam).

Dengan demikian suatu perang kolonial dalam rangka perwujudan Pax-Neerlandica di daerah ujung Barat Laut kepulauan Indonesia secara resmi telah dimulai. Peperangan yang telah menghabiskan waktu lebih dari 40 tahun itu, dan

---

44. Salinan surat-menyurat tersebut selengkapnya, lihat, E.S. de Klerck, *op.cit.*, hal. 475 - 480.

45. *Oorlogsverklaring* itu selengkapnya, lihat, *Ibid.*, hal. 477.

46. Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 296.

bahkan menurut Van't Veer dapat disamakan dengan perang 80 tahun (1568 – 1648) di negeri Belanda.<sup>47</sup> Diperkenalkan oleh pihak Belanda dengan nama "Perang Atjeh"; sedang rakyat Aceh sendiri lebih mengenalnya dengan nama "Perang Beulanda", sebab Belandalah yang melancarkan agresi terhadap rakyat Aceh. Bagaimana jiwa kepahlawanan rakyat Aceh menghadapi perang Belanda itu akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian berikut.

## 2. Perang Rakyat Semesta sebagai Sumber Kekuatan

Sebelum perang dimulai, Belanda telah memperhitungkan bahwa Aceh akan dapat ditaklukkan dalam waktu sesingkat mungkin; tetapi kenyataan tidak demikian. Rupanya hasil penyelidikan spionase selama tahun-tahun yang lalu tidak tepat. Ketidak tepatan perhitungan itu disebabkan oleh sasaran penyelidikan Belanda yang telah dititik beratkan pada segi-segi politik, militer dan ekonomi saja, yang memang Aceh pada waktu itu jauh lebih mundur bila dibandingkan dengan abad 17 misalnya. Missi Kraijenhoff yang sampai tiga kali datang ke Aceh (antara tahun 1871 – 1872 atas nama missi persahabatan) hanya melihat pada situasi pemerintahan kerajaan Aceh yang lemah dan perlengkapan militer yang jauh lebih tidak berarti bila dibandingkan dengan yang dimiliki Belanda. Mereka tidak dibandingkan dengan yang dimiliki Belanda. Mereka tidak mendalami hakekat kehidupan masyarakat Aceh dari segi agama dan nilai sosial budaya yang mendasari aksi perlawanan pada waktu itu. Padahal jika suatu peperangan hendak dimenangkan unsur-unsur kekuatan ini sa-

---

47. Paul Van't Veer, *op.cit.*, hal. 1. Ia membagi perang Belanda di Aceh atas 4 periode, yaitu: de Eerste Atjeh-Oorlog (1873); de Twede Atjeh-Oorlog (1874 – '80); de Derde Atjeh-Oorlog (1884 – '96) dan de Vierde Atjeh-Oorlog (1896 – 1942).

ngat menentukan juga di samping perlengkapan militer lainnya.

Telah dikemukakan bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat Islam; nilai sosial budaya yang meliputi segi-segi kehidupan dan dihayati mereka umumnya bersumber pada Al-Quran dan Hadist Nabi atau setidaknya sejauh yang tidak bertentangan dengan apa yang termaktub dalam kedua sumber yang menjadi pedoman hidup muslim tersebut. Ini tidak berarti bahwa semua orang Aceh akan melaksanakan suruhan agamanya dengan taat dan patuh; ada saja di antara mereka – sekalipun tetap dihayati mulia dan wajib ditunai-kan – yang sewaktu-waktu meninggalkan shalat atau tidak melaksanakan ibadah puasa umpamanya.<sup>48</sup> Namun suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari adalah, bahwa apabila mereka berhadapan dengan hal-hal yang dipandang membahayakan kelangsungan hidup agama Islam dan tanah airnya, mereka akan menghadapinya dengan semangat persatuan yang tinggi dan dalam keadaan yang demikian mereka hanya mengenal alternatif syahid atau menang. Hal ini sejalan dengan perintah agama, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an: Pergilah olehmu di jalan Allah mereka yang memerangi kamu. Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah (Surat Al-Baqarah: 190 dan At Taubah: 41). Tetapi ini tidak berarti pula bahwa berdasarkan perintah agama yang dianutnya itu, rakyat Aceh sebagai orang-orang yang suka dan menganjurkan perang, sebab perintah itu diikuti dengan peringatan: Jika mereka tidak menggangumu dan tidak memerangimu, serta menawarkan perdamaian, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka (Surat An Nisaa: 90). Prinsip-prinsip ini

---

48. Bandingkan dengan, Yongeyans, *Land en Volk van Atjeh, Vroeger en Nu*, Baarn, 1939, hal. 292.

tampaknya dipegang teguh oleh rakyat Aceh, sebagaimana terlihat dari perjanjian-perjanjian damai yang pernah diadakan dan dari aksi perlawanan yang dilancarkan terhadap Belanda, setelah pemerintahnya secara resmi mengumumkan perang terhadap Aceh.

Dari apa yang telah diutarakan itu dapat diambil kesimpulan, bahwa kekuatan sosial agama (religius social force) adalah termasuk salah satu potensi yang paling menentukan dalam menggerakkan aksi perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Dan karenanya mudah dipahami, apabila dikatakan oleh Zentgraaff,<sup>49</sup> rakyat Aceh berperang seperti singa yang sedang mengamuk (vochten als leeuwen) dan tidak akan pernah tunduk seluruhnya kepada pemerintah Belanda, sehingga tidaklah berlebihan-lebihan apabila van den Berg dan kawan-kawannya menulis, bahwa: "Dalam tjinta tanah air tidak kalah orang Atjeh dengan bangsa apa pun di dunia ini yang menjunjung tinggi kemerdekaan bangsa dan nusa-nya."<sup>50</sup>

Watak rakyat Aceh demikian telah menjadikan mereka dalam menghadapi musuh negara, bangsa dan agama sebagai barisan sukarelawan yang tangguh, yang di samping bekerja mencari nafkah hidup sehari-hari, juga mereka berperang dengan gagah berani di medan pertempuran. Seluruh lapisan masyarakat (Sultan, uleebalang, ulama dan rakyat biasa) turut ambil bagian dalam perjuangan ini. Mobilisasi umum dalam arti sesungguhnya berhasil digerakkan.

Para pejabat pemerintahan (sultan bersama stafnya dan uleebalang) adalah para pemimpin yang mengatur taktik dan strategi perlawanan sejalan dengan daya mampu yang dimiliki pada waktu itu. Tetapi bersama rakyat di medan pertempur-

---

49. H.C.Zentgraaf, *Atjeh, De Unie*, Batavia, tanpa tahun, hal. 8 dan 20.

50. H.J.van den Berg, et.al., *Asia dan Dunia sejak 1500* Djakarta, 1954, hal. 283.

an, mereka juga sebagai pemegang komando penyerangan di garis depan. Tidak sedikit dari mereka yang gugur dalam pertempuran atau pun dibuang, dipisahkan dari rakyat yang sedang dipimpinya.

Para ulama mempertaruhkan jiwanya — sebagaimana ditulis Zentgraaff sampai kesudahan yang sepahit-pahitnya ("to the bitter end").<sup>51</sup> Alim ulama sebagai kelompok cendekiawan dalam masyarakat Aceh adalah esensi potensial lahir batin dalam perjuangan tersebut. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas mereka sebagai waris Ambiya. Dengan demikian sebagai motor penggerak kebangkitan massal mereka menduduki posisi utama. Secara batiniah mereka dekat dengan rakyat biasa di samping dengan lapisan atas (bangsawan). Di kalangan masyarakat gampong (desa) para ulama berperan dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan; mereka dihormati, disegani dan dituruti oleh masyarakat setempat. Di sini mereka menjadi penggerak rakyat gampong (desa) baik untuk basis pertahanan garis belakang maupun untuk basis pertahanan garis depan. Tegasnya sebagai pemegang komando jihad fisabilillah, para ulama (yang di Aceh dikenal dengan sebutan Teungku Chiek) merupakan urat nadi kelangsungan perjuangan. Dapat dikatakan tidak diketemukan di antara mereka yang kembali dari medan perang; umumnya mereka gugur dalam pertempuran atau meninggal karena sakit dan tua, namun hampir tidak kedengaran mereka menyerah kepada Belanda.

Di pihak lain para wanita menduduki tempatnya tersendiri. Mereka tidak saja sebagai pemain yang pasif di balik layar, sebagai penyiap makanan di dapur umum, ataupun sebagai pendorong suami dan anaknya untuk bertempur, bahkan lebih dari pada itu. Kesatrian wanita Aceh,

---

51. H.C. Zentgraaff, *op.cit.*, hal. 8.

demikian tulis Zentgraaff, melebihi wanita-wanita lain, terutama dalam mempertahankan cita-cita kebangsaan dan keagamaannya; mereka rela menanggung hidup di medan perang dan melahirkan anaknya di sana; mereka tidak pernah menakuti suaminya, tetapi sebaliknya mereka berperang bersama-sama suaminya, kadang-kadang di sampingnya, bahkan tidak jarang juga di depannya. Wanita Aceh berjuang demi jalan Allah; mereka adalah juga pemimpin perlawanan.<sup>52</sup> Wanita pejuang itu tidak saja berasal dari kelompok bangsawan dan ulama, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang datang dari kalangan rakyat biasa.

Dan para remaja/anak-anak juga mempunyai peranan tersendiri selama berlangsungnya aksi perlawanan. Mereka dalam batas-batas kemampuannya, ikut menyiasati sejauh mana kekuatan patroli Belanda yang sedang atau akan beroperasi pada suatu waktu di tempat tertentu; dan tidak jarang pula mereka terlibat dalam suatu pertempuran. Adakah sukar untuk dibayangkan dalam suatu pertempuran yang terjadi di Kuto Reh (Aceh Tenggara sekarang) pada tahun 1904, dari 561 orang pejuang Aceh yang gugur, 59 orang di antaranya terdiri dari anak-anak (perinciannya: 313 orang laki-laki, 189 wanita dan 59 anak-anak).<sup>53</sup>

Dengan demikian jelaslah, pembentukan kekuatan perjuangan rakyat Aceh melalui persatuan yang dijiwai semangat keagamaan (Islam) yang dianutnya telah menjelmakan aksi perlawanan massal yang sungguh menyulitkan pihak Belanda dalam menghadapinya. Kenyataan ini semua telah menempatkan perang kolonial Belanda di Aceh itu sebagai perang rakyat semesta (volks-Oorlog) dalam pengertian yang sesungguhnya. Dan ini juga sekaligus merupakan modal utama

---

52. *Ibid*, dikutip secara bebas dari halaman 63 – 78.

53. Paul Van't Veer, *op.cit.*, hal. 256 b.

untuk mengatasi roda sejarah Aceh yang sedang berputar menurun sejak sepeninggal Iskandar Muda.

Manifestasi dari jiwa ke Islamanan yang telah menjelmaan perang rakyat semesta (volks-oorlog) di seluruh Aceh itu tergambar seluruhnya dalam karya besar Teungku Chiek Pante Kulu, Hikayat Prang Sabi.<sup>54</sup> Dalam hikayat itu dengan indah sekali dinukilkan tentang nilai hakiki hidup muslim dalam pandangan kekinian dan keabadian hidup serta hubungannya dengan berjuang di jalan Allah untuk memeringi *kaphee Beulanda*. Penggambaran secara puitis keharusan untuk memeringi kaphee Beulanda itu serta imbalannya surga jannatunna'in telah membangkitkan semangat putra-putri Aceh untuk bertempur sampai pertimbangan-pertimbangan rasional tenggelam dalam emosi yang tidak terkendali. Banyak pemuda – demikian tulis Zentgraaff – maju ke medan pertempuran disebabkan emosinya yang meluap di bawah pengaruh yang sungguh besar dari hikayat ini.<sup>55</sup>

Alunan suara hikayat Prang Sabi itu tampaknya telah berhasil menempa kelangsungan semangat jihad fisabilillah yang melekat pada tiap pribadi rakyat Aceh, sehingga karenanya semangat perjuangan untuk menentang penjajahan pun tidak pernah mencapai titik akhir sampai Belanda meninggalkan daerah Aceh. Hal ini akan dipaparkan lebih lanjut dalam bagian-bagian berikut.

### 3. Proses Kelangsungan Perang sampai 1912

Kalau dilihat dari uraian yang telah dikeemukakan di atas, sudah dapat diperkirakan betapa besar konsekwensi

---

54. Mengenai Hikayat Prang Sabi, terdapat beberapa versi; Teungku Chiek Tiro diperkirakan juga pernah menulis. Besar kemungkinan Teungku Chiek Pantee Kulu, di samping ikut menulis hikayat tersebut, juga sebagai penyunting. Salah satu naskahnya, lihat, H.T. Damste, BKI 84, 1928, hal. 545 – 609; lihat juga, Anthiny Reid, *op.cit.*, hal. 204; 252.

55. Zentgraaff, *op.cit.*, hal. 244.

yang akan diterima Belanda untuk merealisasikan penjajahannya di Aceh. Berbagai taktik dan strategi harus dipikirkan untuk mematahkan kekuatan rakyat: demikian juga sejumlah besar dana dan daya perlu dikerahkan untuk memenangkan perang. Namun seperti ternyata kemudian penetrapan penjajahannya di Aceh lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan. Sementara itu gubernur militernya yang ditempatkan di sana perlu pula diganti dalam batas-batas waktu yang singkat. Sedang kelumpuhan di bidang kemiliteran rupanya juga tidak terelakkan; ini terjadi sejak permulaan pendaratannya di Aceh.

Agresi pertama yang dilancarkan pada tanggal 5 April 1873 itu ternyata telah mengalami kegagalan total. Tentara Belanda tidak mampu menghadapi perlawanan lasykar rakyat yang demikian sengit. Dalam pertempuran memperebutkan Mesjid Raya Baiturrahman tanggal 14 April 1873, pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Imeum Lueng Bata berhasil menewaskan Jenderal Kohler. Tiga hari setelah itu tentara Belanda terpaksa mundur kembali ke pantai; dan pada tanggal 29 April 1873, setelah memperoleh izin dari Batavia, seluruh pasukan kembali ke pulau Jawa. Di pihak Belanda jatuh korban 37 bawahan dan 8 perwira mati tertembak, 405 orang luka-luka (termasuk 32 orang perwira) dan 30 orang dari padanya juga meninggal. Sedang dari pihak Aceh diperkirakan telah jatuh korban sebanyak 900 orang tewas.<sup>56</sup>

Kekalahan Belanda itu merupakan pukulan berat tidak saja bagi pihak Belanda tetapi juga bagi bangsa-bangsa Barat lainnya, justru selama ini ada anggapan dari pihak mereka seakan-akan bangsa Timur dengan mudah dikalahkannya. Karena itu tidak mengherankan apabila timbul reaksi keras yang bernada menentang kebijaksanaan pemerintah Belanda

---

56. Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 296.

mengenai penyerangan ke Aceh, baik dari mass-media dalam dan luar negeri (Javabode, Morning Pos, The Times, dan lain-lain), maupun dari beberapa anggota Majelis Rendah Belanda, dan bahkan juga dari pemerintah Inggris.<sup>5 7</sup>

Adanya kritikan-kritikan pedas dari berbagai pihak menyebabkan Belanda menjadi lebih emosional untuk melancarkan penyerangan kembali terhadap Aceh. Maka pada tanggal 9 Desember 1873 agresi ke dua dilancarkan dengan kekuatan lebih dari dua kali lipat dari agresi pertama (8500 militer dan 4300 pekerja kasar yang umumnya terdiri dari orang-orang hukuman).<sup>5 8</sup> Kali ini di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. van Swieten, pensiunan Panglima Pasukan Hindia Belanda, tokoh yang telah pernah menyodorkan perjanjian damai kepada Aceh tahun 1857 (masa Ibrahim Mansyur Syah). Pendaratan pasukan dilakukan di Kuala Lheue, kira-kira 20 km arah ke Timur Ibukota Banda Aceh Darussalam.

Dalam menghadapi serangan tentara Belanda ke dua kalinya ini, tampaknya lasykar rakyat Aceh lebih bersemangat. Hal ini di samping disebabkan oleh kemenangannya yang diperoleh pada penyerangan Belanda pertama dulu, juga disebabkan banyaknya bantuan yang mengalir dari daerah-daerah uleebalang. Dari daerah Uleebalang Meureudu dan Pidie masing-masing didatangkan kira-kira 500 orang pasukan. Demikian juga dari pantai Barat, terutama dari daerah arah ke Utara Meulaboh yang telah mendatangkan hampir setengah dari jumlah penduduknya ke ibukota Bandar Aceh yang sedang menghadapi Belanda. Sedang Tuanku Hasyim Banta Muda yang pada waktu yang lalu berada di Su-

---

57. Sehubungan dengan reaksi tersebut, lihat, al. Paul Van't Veer, *op.cit.* bagian de Tweede Atjeh-oorlog, passim; Athony Reid, *op.cit.*, 73-8; 254-5.

58. Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 110; 296.

matera Timur, sekarang telah kembali dengan lasyarknya sejumlah 900 orang turut bertempur mempertahankan istana (*dalam*) dan Masjid Raya Baiturrahman. Dalam suasana sengitnya pertempuran juga Panglima Sagi XXII Mukim tanggal 4 Januari 1874 telah mengerahkan pasukan tambahan sejumlah 500 orang.<sup>59</sup>

Pertempuran sengit terjadi di Masjid Raya Baiturrahman yang dipertahankan dengan gigih oleh lasykar Aceh. Namun mesjid ini berhasil direbut oleh Belanda setelah dihancurkannya (dibakar) pada tanggal 6 Januari 1874. Tujuan selanjutnya yang paling utama ialah istana (*dalam*) dan Belanda baru berhasil merebutnya pada tanggal 24 Januari 1874; ini pun setelah dikosongkan oleh pihak Aceh sejak tanggal 15 Januari 1874. Sultan dan rombongannya menuju ke Leueung Bata untuk seterusnya ke Pagar Ayee (kira-kira 7 km dari ibukota Bandar Aceh). Di sana pada tanggal 28 Januari 1874 Sultan Mahmud Syah II meninggal dunia akibat wabah kolera.

Dengan direbutnya istana (*dalam*) Belanda memperhitungkan, bahwa Kerajaan Aceh telah berhasil ditaklukkan. Untuk itu pada tanggal 31 Januari 1873 van Swieten mengumumkan sebuah proklamasi dan dinyatakan juga bahwa Aceh Besar menjadi milik Belanda (Aceh Besar adalah daerah yang diperintah langsung oleh Sultan, sedang daerah uleebalang di luar Aceh Besar adalah daerah-daerah yang berdiri sendiri diperintah secara tidak langsung).

Tetapi kenyataannya proklamasi tersebut tidak mempunyai nilai politis yang menentukan. Seiring dengan proklama-

---

59. T.Ibrahim Alfian, "Sejarah Singkat Perang Di Aceh", dalam 'A.Sartono Kartodirdjo (ed), Anthony Reid, op.cit., hal. 109. Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 197, hal. 242.

si van Swieten itu para pemimpin Aceh mengangkat Tuanku Muhammad Daud Syah sebagai sultan baru (cucu Sultan Ibrahim Mansyur Syah yang sebelumnya gigih menentang Belanda sebagaimana telah dijelaskan di muka). Berhubung Muhammad Daud masih di bawah umur ditunjuk pula Tuanku Hasyim Banta Muda sebagai pemangku Sultan (sampai tahun 1884). Dan dalam rangka untuk lebih mudah mengggerakkan rakyat berperang melawan Belanda, maka pusat pemerintahan dipindahkan ke Indrapuri ( $\pm$  25 km arah Tenggara ibukota lama, termasuk dalam wilayah Sagi XXII Mukim, masih dalam daerah Aceh Besar yang dinyatakan oleh Belanda telah menjadi miliknya – suatu pukulan politis bagi Belanda yang menunjukkan kelihaihan pihak lawannya). Dengan kejadian tersebut, maka sejak waktu itu di Aceh terdapat dua pusat pemerintahan, yaitu pusat Pemerintahan Kerajaan Aceh di Indrapuri – kemudian tahun 1884 dipindahkan lagi ke Keumala, Pidie – dan yang satu lagi pusat pemerintahan kolonial Belanda di Kutaraja (bekas ibukota Bandar Aceh Darussalam). Keadaan ini baru berakhir setelah 30 tahun kemudian, yaitu tahun 1903 ketika Sultan Muhammad Daud Syah terpaksa menyerah kepada Belanda.

Berhasilnya agresi Belanda yang dilancarkan pada akhir tahun 1873 itu terutama disebabkan oleh taktik penyerangan frontal dengan jumlah tentara yang hampir seimbang, namun tidak seimbang dalam persenjataan. Selain itu pada lokasi pendaratannya pihak Belanda lebih dahulu menghancurkan dua kuta pertahanan rakyat Aceh, yaitu Kuta Pohama dan Kuta Musapi sebelum bergerak maju ke ibukota Bandar Aceh. Sedang dalam pendaratannya yang pertama, 5 April 1873, Belanda setelah menghancurkan Kuta Pantee Ceureumen langsung menyerang Bandar Aceh tanpa menghancurkan Kuta Meugat yang terletak tidak seberapa jauh (mungkin

tidak diketahui oleh pihak Belanda) dari Pantee Ceureumen ( $\pm$  3 km).

Setelah berhasil menduduki daerah seluas tidak lebih dari 25 km persegi, van Swieten yang pensiunan itu menganggap tugasnya telah selesai. Pada tanggal 16 April 1874 ia kembali ke Batavia. Sebelum meninggalkan daerah ini menjanjikan kepada rakyat Aceh bahwa mesjid yang telah dibakarnya segera akan dibangun kembali oleh pemerintah Hindia Belanda (suatu cara untuk mengambil hati rakyat Aceh dan baru diwujudkannya pada tahun 1881).<sup>60</sup>

Sebagai pengganti van Swieten ditunjuk Kolonel (kemudian Jenderal) J.L.J.H. Pel. Untuk membendung serangan lasykar Aceh yang tampaknya semakin meningkat ke ibukota, Pel membangun pos-pos pertahanan di sekeliling Kutaraja, Krueng Aceh dan Meuraksa (sebanyak 36 buah). Dan untuk menutup kemungkinan hubungan Aceh dengan luar negeri, dengan seizin Gubernur Jenderal di Batavia, Pel juga merebut daerah Krueng Raba dan Krueng Raya di pantai Utara Sagi XXVI Mukim. Namun usaha-usahanya untuk memutuskan jalur hubungan Aceh dengan luar negeri pada waktu itu dapat dikatakan lebih banyak menemui kegagalan; pihak Aceh selalu berhasil menembus blokade Belanda di sepanjang pesisir Selat Malaka.

Rencana Belanda selanjutnya adalah menaklukkan daerah-daerah uleebalang di luar Aceh Besar. Belanda menyadari sepenuhnya arti dari pada daerah uleebalang sebagai sumber kekuatan perlawanan rakyat Aceh. Sejak tahun 1874 Belanda telah bergerak menuju daerah-daerah Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat dan Aceh Selatan. Daerah-daerah yang telah berhasil ditaklukkan dipaksakan untuk

---

60. Mengenai Mesjid Raya Baiturrahman, lihat J.Staal, "De Misigat Raija in Atjeh," *De Indische Gids*, 1882.

menandatangani perjanjian sederhana yang terdiri dari enam pasal, kemudian setelah tahun 1876 dengan perjanjian panjang yang terdiri dari delapan belas pasal, karena disadari perjanjian pertama tidak berhasil menjadikan daerah uleebalang taat kepada pemerintah Belanda<sup>61</sup> Tetapi dalam kenyataannya perjanjian yang terakhir itu pun hampir tidak membawa pengaruh. Sebagai salah satu contoh dapat ditunjukkan kasus penahanan kapal milik Inggris, Nisero, oleh uleebalang Teunom, Teuku Imuem Muda. Peristiwa itu telah menggemparkan pemerintah Belanda dan juga telah menimbulkan konflik politik dengan pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris mengirim kapal Pegagus ke Teunom untuk mengadakan perundingan dengan Teuku Imueum Muda, sedang Belanda terpaksa membiarkan saja kejadian itu. Baru pada bulan September 1884 Pemerintah Belanda dapat menyelesaikannya dengan uang tebusan 100.000,— ringgit kepada uleebalang Teunon yang dikatakannya telah mengaku takluk kepada Belanda sejak tahun 1877<sup>62</sup> Atas kenyataan-kenyataan inilah, maka van Heutz sejak tahun 1898 memaksakan kembali penandatanganan *Korte Verklaring* (perjanjian pendek) kepada uleebalang-uleebalang yang telah ditaklukkan di seluruh Aceh.<sup>63</sup>

Sementara itu serangan rakyat Aceh terhadap pos-pos Belanda tidak semakin berkurang; demikian juga patroli Belanda selalu tidak luput dari hadangan pihak Aceh. Meskipun dari segi persenjataan, rakyat Aceh dapat dikatakan

---

61. Lihat selanjutnya, "The Acehnese-Dutch War and its Eff on the Acehnese Leople: Their Land, Customs and Institutions", dalam *Conference on Modern Indonesian History*, Juli 18-19, 1975, Center for Southeast Asian Studies University of Wisconsin, Madison.

62. Uraian lebih lanjut tentang peristiwa tersebut, lihat, Anthony Reid, *op. cit.*, hal. 218 - 249.

63. *Ibid.*, hal. 278 - 283.

kurang berarti bila dibandingkan dengan pihak Belanda, namun mereka memiliki modal kekuatan lain yang sangat sukar dipatahkannya, yaitu jiwa ke-Islaman sebagaimana telah dijelaskan di muka. Umumnya dalam menghadapi perang lasykar Aceh memusatkan kekuatannya dalam *kuta-kuta* pertahanan yang tersebar di seluruh daerah Aceh. Kuta-kuta tersebut dipertahankan habis-habisan oleh lasykar Aceh, kadang-kadang sampai terbakar seluruhnya atau mereka sendiri tewas semuanya di dalam kuta (Kuta Aneuk Galong dalam pertempuran sengit tahun 1896 terbakar habis, sedang dalam mempertahankan Kuta Batee Iliek tahun 1901 semua pejuang Aceh gugur di dalamnya, demikian juga Kuto Reh tahun 1904).<sup>64</sup> Ini berarti pula kuta pertahanan termasuk salah satu unsur kekuatan pokok rakyat Aceh bila dilihat dari segi strategi militer, di samping kekuatan pokok lainnya, yaitu kekuatan sosial agama dan struktur pemerintahan kerajaan Aceh (dimaksudkan di sini adalah daerah-daerah uleebalang yang harus ditaklukkan satu persatu oleh Belanda).

Semenjak Jenderal Pel digantikan oleh Jenderal Mayor G.B.T.van Kerchem (Pel meninggal 24 Pebruari 1876) tampaknya kedudukan Belanda di Aceh semakin bertambah sulit. Kerchem kurang mampu menghadapi lasykar Aceh yang sering menembus pos-pos di sekeliling Kutaraja dan bahkan menyerang daerah-daerah yang telah ditaklukkannya (biasanya di daerah-daerah tersebut ditempatkan sepasukan tentara untuk mengamati gerak-gerik pemimpin dan rakyat Aceh setempat). Karena itu belum sampai satu tahun Kerchem diganti dengan Jenderal Mayor A.F.E.Diemont (6 Nopember

---

64. Beberapa pertempuran di kuta pertahanan, lihat Zertgraaf, *op.cit.*, hl. 20; 190. Mengenai Batee Iliek, lih., C.Nieuwenhuis, *De Expeditie naar Samalanga*, alih bahasa, Aboe Bakar, PDIA, A.Aceh, 1973.

1876). Tetapi dengan kebijaksanaan yang ditempuh itu (penggantian gubernur militer dalam jangka waktu singkat) menjadikan rakyat Aceh semakin bersemangat, perlawanan semakin tidak dapat dibendung, sedang daerah-daerah uleebalang semakin berani. Karena itu daerah-daerah seperti Simpang Ulim, Tanjong Seumantok, Samalanga, Meureudu kembali di serang oleh Belanda sekitar tahun 1876 – 1877. Umumnya daerah-daerah tersebut di saat-saat mereka tidak mampu lagi bertahan, mereka menyatakan tunduk kepada Belanda, tetapi di belakangnya, daerah-daerah tetap setia kepada perjuangan untuk mengusir kaphee Beulanda. Hal ini dipahami oleh Belanda dan membuatnya cukup kewalahan, namun cara yang tepat untuk membuat daerah tunduk sepenuhnya belum diketemukan, sedang biaya perang yang telah dikeluarkan sampai awal tahun 1877 telah mencapai angka 60 juta gulden.

Karena gencarnya serangan lasykar Aceh sejak tahun 1877, maka pasukan Belanda ditambah lagi menjadi 9420 orang dan antara tahun 1878 – 1879 naik menjadi 10.000 orang lebih.<sup>65</sup> Dalam pada itu gubernur militernya juga silih berganti, karena dianggap oleh Batavia kurang cakap untuk menyelesaikan perang di Aceh. Dan Biaya perang sampai tahun 1880 naik menjadi 115 juta gulden dan akhir tahun 1884 mencapai angka 150 juta gulden.<sup>66</sup>

Setelah sebelas tahun berperang, Belanda semakin nampak tidak berdaya. Maka untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih besar lagi dan ditakuti Belanda harus mundur dari Aceh seperti telah terjadi pada agresi pertama dulu, pada tanggal 16 – 17 Juni 1884 diadakan sidang rahasia Staten General. Dalam sidang itu diputuskan suatu kebijaksanaan per-

---

65. Angka-angka secara terperinci mengenai jumlah pasukan Belanda di Aceh sejak tahun 1873 – 1914, lihat Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 296.

66. T.Ibrahim Alfian, *op.cit.*, hal. 248 – 251.

tahanan di Aceh yang disebut Stelsel Konsentrasi dan pelaksanaannya di mulai sejak bulan Maret 1885. Bentuknya ialah pada tanah seluas 50 km persegi di sekitar Kutaraja dibangun 16 pos penjagaan. Tiap-tiap pos dibatasi oleh lapangan kosong tanpa pohon dan rumah sejauh 1000 meter dan semua pos-pos tersebut dihubungkan melalui telepon ke Kutaraja.<sup>67</sup>

Di pihak Kerajaan Aceh sampai tahun 1884 pemangku-an sultan telah berlangsung selama 10 tahun. Berhubung Tuanku Muhammad Daud Syah sudah cukup dewasa, maka pada akhir tahun itu juga Tuanku Hasyim Banta Muda menyerahkan kembali pemerintahan yang dipangkunya selama ini. Dalam suatu upacara resmi di Mesjid Indrapuri, Tuanku Muhammad Daud dinobatkan menjadi Sultan Aceh yang ke 32 dengan gelar Sultan Ala'ud-din Muhammad Daud Syah. Bersamaan dengan itu, mengingat Aceh Besar kurang aman lagi sebagai pusat pemerintahan, ibukota kerajaan dipindahkan ke Keumala di Pidie (kira-kira 25 km arah Selatan kota Sigli).

Pada waktu upacara penobatan sultan di mesjid Indrapuri, para pemimpin Aceh, seperti Tuanku Hasyim, Panglima Polem Ibrahim Muda Kuala, Tengku Chiek Di Tiro dan lain-lain, telah mencetuskan "*Ikrar Prang Sabi*" – perang di jalan Allah melawan kaphee Beulanda. Pada hakekatnya ikrar semacam ini sama saja dengan yang telah dicetuskan di istana tempo dulu, pada waktu menjelang pendaratan Belanda yang pertama (surat-surat sultan yang tegas menolak tawaran Belanda untuk menyerah adalah hasil musyawarah dan ikrar para pemimpin). Demikian juga dengan yang dimusyawarahkan di Garot ( $\pm$  6 km dari kota Sigli) pada bulan Januari 1897. Hanya waktu, tempat dan irama bahasa saja yang ber-

---

67. *Ibid.*,

lainan sesuai dengan suasananya masanya masing-masing; tujuannya ialah untuk memperbaharui kembali semangat berjuang. Dengan ikrar ini pula selama perang berlangsung telah melahirkan banyak pejuang yang umumnya mereka tewas di medan pertempuran. Di antaranya yang cukup dikenal, ialah Teuku Imeumi Lueng Bata, Teuku Ibrahim Lamnga (suami pertama Cut Nyak Dhien, tewas 1878), Tuanku Hasyim Banta Muda, Panglima Polem Mahmud Cut Banta, Panglima Polem Ibrahim Muda Kuala, Teungku Chiek Di Tiro Muhammad Saman, Teungku Chiek Muhammad Amin Tiro, Teuku Panglima Nyak Makam (dipenggal kepalanya, 1896), Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Cut Nyak Meutia, Teungku Fakinah dan masih banyak lagi.<sup>68</sup>

Demikian juga karena adanya ikrar tersebut, sehingga sejak tahun 1899 Belanda tidak ada pilihan selain dari melancarkan serangan secara besar-besaran terhadap rakyat Aceh. Masa sepuluh tahun sejak waktu itu (1899 – 1909), sebagaimana disebutkan oleh Van't Veer, adalah merupakan masa sepuluh tahun berdarah ("*Tien Bloedige Jaren*") di Aceh yang telah merengut tidak kurang dari 21.865 jiwa rakyat Aceh (kira-kira 4% dari jumlah penduduk pada waktu itu).<sup>69</sup>

Di atas telah dikemukakan bahwa stelsel konsentrasi yang mulai dipraktekkan Belanda sejak bulan Maret 1885,

---

68. Dari 478 pejuang Aceh yang berhasil dikumpulkan oleh Seminar Perjuangan Aceh sejak 1873 s/d Kemerdekaan Indonesia, yang diadakan di Medan 22 – 25 Maret 1976, sebagian besar adalah para pejuang selama perang Belanda di Aceh; khusus mengenai perjuangan Teungku Chiek Di Tiro, Lihat. Ismail Jakub, Teungku Tjhik Di Tiro (Muhammad Saman) Pahlawan Besar dalam Perang Aceh (1881 – 1891), Bulan Bintang, Djakarta, 1960; mengenai Cut Nyak Dhien, lihat, Szekely – Lulofs, *op.cit.*, atau Hazil, *Teuku Umar dan Tjut Nja' Din*, sepasang Pahlawan Perang Aceh, Djambatan, 1955, mengenal Cut Nyak Meutia, lihat, Zakaria Ahmad et al, *Pahlawan Nasional Cut Nyak Meutia*, Dep. P dan K Jakarta, 1978/1979.

69. Paul Van't Veer, *op.cit.*, hal. 260.

bertalian erat dengan kenyataan semakin meningkatnya perlawanan rakyat, sedang di pihak Belanda pada waktu itu tidak berdaya untuk mengatasinya. Hal ini terutama disebabkan oleh karena pemerintah Hindia Belanda tidak mampu memenuhi kebutuhan biaya operasi militer yang semakin meningkat; demikian juga dengan tenaga personil militer yang setiap waktu perlu ditambah jumlahnya. Kalau dilihat dari kedua faktor yang disebutkan itu, stelsel konsentrasi memang dapat menguntungkan. Biaya dapat ditekan serendah mungkin dan pasukan militer dapat dikurangi berhubung mereka telah dipusatkan dalam linie konsentrasi. Tetapi apabila tetap dipertahankan dalam jangka waktu panjang, daerah seluas kira-kira 50 km persegi di sekeliling Kutaraja itu, dapat dipastikan tidak akan mempunyai nilai politis dan ekonomis yang menguntungkan. Hal ini disadari oleh Pemerintah Belanda.

Maka, dalam rangka mencari jalan penyelesaian perang yang lebih efektif, pada tahun 1891 seorang orientalis, Dr.C. Snouck Hurgronje dikirim ke Aceh. Ia tinggal di sana sejak bulan Juli 1891 sampai dengan Pebruari 1892. Pada bulan Mei 1892 Snouck menyelesaikan laporannya yang berjudul: "Verslag Omtrent Religieus – politieke Toestanden in Atjeh" – Laporan Keadaan Politik Agama di Aceh – yang kemudian menjadi kerangka dasar bukunya De Atjehers (dua jilid) yang terkenal itu.

Menurut Snouck, dalam laporannya itu, rakyat Aceh yang taat beragama Islam tidak mungkin mau menyerah kepada Belanda sebelum mereka ditundukkan dengan kekerasan. Tegasnya lagi sikap menunggu dalam garis konsentrasi dan kompromi seperti yang dilaksanakan selama ini tidak akan membawa hasil. Karena itu jalan satu-satunya yang paling tepat ialah menyerang mereka; Keumala, ibukota kerajaan Aceh, harus direbut dan kekuatannya dipatahkan.

Atas dasar rekomendasi Snouck Hurgronje itu, maka pada tahun 1896 Stelsel Konsentrasi yang sudah berjalan 11 tahun lebih, mulai dilepaskan. Sejak waktu itu gerakan ofensif ke daerah-daerah digerakkan lagi secara lebih efektif. Dan pada masa pemerintahan Gubernur Militer van Heutsz (1898 – 1904) gerakan tersebut semakin lebih ditingkatkan, terutama setelah pasukan militer pada tahun 1899 diperkuat dengan korps *Marechausee*.<sup>70</sup>

Agresi Belanda ke tiga itu mengambil titik tolak Kuta-  
raja dengan tujuan pertama membersihkan daerah-daerah di  
sekitar Aceh Besar (terutama daerah pedalaman). Kemudian  
tahun 1898 gerakan ofensif tersebut menuju ke Pidie; di dae-  
rah ini, di samping berhasil menguasai sebagian besar daerah  
uleebalang, juga berhasil dihancurkan Keumala, ibukota ke-  
rajaan. Dalam tahun berikutnya (1899) pasukan digerakkan  
ke Aceh Barat; di sana satu demi satu kekuatan daerah dapat  
dilumpuhkan, sedang Teuku Umar gugur dalam tahun itu  
juga. Dan tahun 1900 van Heutsz sudah berada kembali di  
daerah perbatasan Pidie dan Aceh Utara; daerah-daerah ulee-  
balang Meureudu, Samalanga, Peusangan berhasil ditakluk-  
kan kembali (sebelumnya daerah-daerah tersebut telah me-  
nandatangani perjanjian takluk kepada Belanda).

Jadi jelaslah, bahwa gerakan cepat van Heutsz telah ber-  
hasil menguasai sebagian besar daerah uleebalang di Aceh.  
Taktik peperangan frontal yang dilancarkan itu, sejalan de-  
ngan nasehat Snouck Hurgronje, memang telah menyebabkan  
rakyat Aceh tidak mampu – namun tidak patah untuk meng-  
hadapi senjata moderen Belanda.

Rencana van Heutsz selanjutnya ialah menangkap Sultan  
atau setidaknya ia bersedia menyerah. Telah disebutkan

---

70. Mengenai peranan korps *Marechausee* dalam menaklukkan Aceh, lihat,  
Doup, *Korps Marechausee Atjeh*, Deli Courant, Medan, 1930.

di atas pada akhir tahun 1898 Keumala berhasil direbut oleh Belanda. Kemudian sultan menyingkir ke Tangse yang juga terus diikutinya. Karena itu sultan menuju ke Sawang dan pada tahun 1900 sultan bertahan di kuta Batee Iliék. Tetapi pada bulan Pebruari 1901 kuta ini pun berhasil dihancurkan oleh Belanda, sehingga sultan menyingkir lagi ke daerah Gayo. Pada tahun berikutnya Belanda menangkap isteri sultan, Pocut Murong. Akhirnya karena tekanan Belanda yang terus menerus itu, pada bulan Januari 1903 Sultan Muhammad Daud Syah terpaksa menyerah. Beberapa bulan kemudian, akibat dari praktek Belanda menangkap isteri para pemimpin perjuangan, Panglima Polem dan Tuanku Raja Keumala juga mengikuti jejak sultan. Dengan demikian berakhir pula masa pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam yang telah berlangsung lebih kurang 400 tahun lamanya (didirikan tahun 1514 oleh Sultan Ali Mughayat Syah).

Penyerahan para pemimpin Aceh itu, di samping akibat tekanan Belanda yang keras dengan taktik penangkapan keluarga mereka juga mempunyai pertimbangan lain. Setelah ibukota Keumala berhasil dihancurkan Belanda akhir tahun 1898 roda pemerintahan kerajaan praktis tidak berjalan lagi. Sejak saat itu sultan bersama para pemimpin lain melanjutkan perjuangan dengan taktik perang gerilya. Akan tetapi dipertimbangkan juga, bekerja sama sambil mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjuangan kiranya akan lebih berhasil daripada perang gerilya yang serba kekurangan. Hal ini terbukti seperti yang dilakukan oleh sultan sejak tahun 1906; sultan secara diam-diam mengadakan hubungan dengan para pejuang di pedalaman dan juga dengan Jepang, melalui konsulnya di Singapura. Tetapi kegiatannya itu diketahui oleh Belanda sehingga pada tanggal 21 Agustus 1907 sultan ditangkap dan dengan ketetapan pemerintah Belanda no.22

tanggal 24 Desember 1907 ia dibuang ke Ambon (kemudian tahun 1918 dipindahkan ke Batavia dan meninggal di sana pada tanggal 6 Pebruari 1939).

Dengan penyerahan sultan dan pengasingannya itu dapatkah dikatakan perang Belanda di Aceh berakhir. Faktanya pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan, bahwa peperangan tidak bertambah reda. Sultan tidak pernah mengajak rakyatnya untuk menyerah, bahkan ia sendiri masih meneruskan perjuangan setelah menyerah sampai ia dibuang. Para pengganti van Heutsz (sejak tahun 1904 ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Batavia) masih harus menghadapi gerilyawan muslimin yang bergerak di seluruh daerah Aceh.

Gerakan pembersihan yang dilancarkan van Daalen tahun 1904 terutama ke daerah Gayo dan Alas, menunjukkan bukti adanya perlawanan rakyat yang semakin memuncak. Dan di Aceh Besar uleebalang Mukim Baeit, Teuku Ali, masih meneruskan perjuangan sampai tahun 1907. Dan Kolonial-Verslag tahun 1908 menyebutkan adanya penyerangan terhadap kedudukan Belanda di sekitar Kutaraja, seperti di Kuta Alam, Peuniti, Lam Baro dan lain-lain.

Di Pesisir Barat dan Selatan Cut Nyak Dhien dan Pocut Baren terus melanjutkan perjuangan sampai tahun 1906. Demikian juga Teuku Keumangan bersama saudaranya Teuku Johan dan Teuku Ben Blang Pidie (ia baru menyerah tahn tahun 1908).<sup>71</sup>

Di Daerah Pidie, sejumlah besar ulama tetap meneruskan perlawanan, antara lain, Teungku Mahyidin Tiro bersama isterinya, Teungku di Buket Tiro, Teungku Ma'at Tiro, Teungku Cot Cicem, Teungku Cot Plieng, Teungku Alue

---

71. Mengenai perlawanan rakyat di daerah ini secara lebih mendetil, lihat, Muhammad Ibrahim, et al, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Proyek IDKD, Dep. P dan K, Jakarta, 1978/1979, hal. 79 - 96.

Keutapang, Teungku Di Ribee, Teungku di Lamcut dan masih banyak ulama, termasuk di Pidie yang berhasil ditewaskan oleh pihak Belanda. Tetapi perjuangan tetap diteruskan sampai mereka tewas atau ditangkap; dan ulama Tiro terakhir yang dapat berperang, Teungku Ma'at Tiro (umur 16 tahun) ditembak Belanda tahun 1911 di daerah pegunungan Tangse. Di daerah ini juga Teungku Fakinah, seorang ulama wanita Aceh Besar meneruskan perlawanan sampai ia menyerah tahun 1910.<sup>72</sup>

Di pesisir Utara dan Timur Aceh, masih banyak para pemimpin adat dan ulama yang berperang melawan Belanda. Di antara yang perlu kita sebutkan di sini, antara lain: Teuku Sabe Silang, Teuku Ben Pirak (ayah Cut Nyak Meutia), Teuku Chiek Tunong (suami Cut Nyak Meutia), Cut Nyak Meutia, Pang Nanggro (suami Cut Nyak Meutia setelah gugur Teuku Chiek Tunong), Teungku Di Barat bersama isterinya dan masih banyak lagi. Cut Nyak Meutia dan suaminya Pang Nanggro gugur tahun 1910, sedang Teungku Di Barata bersama isterinya Cutpo Fatimah gugur tahun 1912.<sup>73</sup>

Barulah setelah tahun 1912 perlawanan massal yang bergelora di seluruh Aceh menjadi reda. Namun secara keseluruhan perlawanan belum lagi terhenti. Pertempuran-pertempuran lokal masih saja terjadi di mana-mana dan tidak kalah juga hebatnya dengan perlawanan massal yang telah berlangsung selama tidak kurang dari 40 tahun (1873 – 1912). Tentang perang yang terjadi antara tahun 1912 – 1942 yang oleh Paul Van't Veer diistilahkan dengan 'perang kecil'<sup>74</sup> akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian berikut ini.

---

72. *Ibid.*,

73. *Ibid.*,

74. Paul Van't Veer menyebutkan, menurut angka resmi pihak Belanda, antara tahun 1899 – 1914, jatuh korban pihak Aceh, 23.198 jiwa. Dan ditegas-

#### D. Beberapa Kasus Perlawanan Hingga Jepang Masuk

Sebagaimana telah diutarakan dalam sub bab di atas bahwa Perang Belanda di Aceh dapat dianggap berakhir pada tahun 1912,<sup>1</sup> tetapi perlawanan-perlawanan bersenjata terhadap Belanda pada tempat-tempat dan saat-saat tertentu masih terus berlangsung. Seperti apa yang disebutkan oleh Paul van't Veer<sup>2</sup> bahwa peperangan Belanda di Aceh harus dianggap sebagai sebuah peperangan besar dan dahsyat yang berlangsung terus-menerus sejak tahun 1873 sampai saat Belanda mengundurkan diri dari Aceh untuk selamanya dalam tahun 1942. Peperangan itu tidak berakhir pada tahun 1913 atau 1914, namun dari tahun 1914 hingga ke tahun 1942 (saat Jepang masuk) terbentang seutas benang merah, sederet jejak-jejak pembunuhan dan pemukulan mulai dari perlawanan di bawah sampai ke atas tanah.<sup>3</sup>

Adapun ciri perlawanan pada periode itu (1912 – 1914) dapat disebutkan pertama, yang dilakukan secara berkelompok dan sporadis, kedua, sebagai gejala bunuh kafir yang

---

kan lagi bila diperhitungkan seluruh korban jiwa (dari pihak Aceh dan Belanda) dalam 'perang kecil'.

dalam 'perang kecil', selama 15 tahun itu, jumlahnya hampir sama dengan yang jatuh dalam 'perang besar' yang terjadi sebelumnya, padahal waktu yang dihabiskan untuk yang disebutkan terakhir hampir tiga kali lipat lamanya. (Paul Van't Veer, *op.cit.*, 260; catatan dan keterangan pada halaman 311, memperinci jumlah korban jiwa sampai tahun 1914.

1. Belum ada suatu keseragaman pendapat di antara parapenulis sejarah Aceh tentang kapan berakhirnya perang ini. T.Ibrahim Alfian seorang sejarawan Indonesia asal Aceh dalam karyanya "Perang Di Jalan Allah, Aceh 1873 – 1912" (Yogyakarta Universitas Gadjah Mada, 1981 Ph.D. Thesis yang belum diterbitkan) menyebutkan bahwa perang itu berakhir tahun 1912. Sementara itu seorang penulis Belanda, Paul van't Veer, *De Atjeh Oorlog*, (Amsterdam: N.V. Uitgeverij De Arbeiders, 1969), menyebutkan bahwa Perang Belanda di Aceh, berakhir dalam tahun 1942.

2. Paul van't Veer, *ibid.*, hal. 293.

3. *Ibid. Perang Belanda Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan: Daerah Istimewa Aceh, 1977), hal. 367. Terjemahan Aboe Bakar Bsf.

umumnya dilakukan secara perseorangan, yang oleh pihak Belanda disebut dengan nama *Atjeh Moorden* (pembunuhan-pembunuhan Aceh). Kedua ciri perlawanan ini sangat dijiwai oleh sistem nilai dalam agama yaitu ajaran dari perang sabil. Khusus mengenai pembunuhan-pembunuhan Aceh atau ciri yang tersebut terakhir merupakan perlawanan nekad yang dilakukan baik secara berkelompok maupun secara perseorangan terhadap orang-orang yang dianggap kafir, terutama orang-orang Belanda. Cara perlawanan seperti ini sangat meresahkan dan membingungkan orang-orang Belanda, sehingga menjadikan kata Aceh sebagai sebuah kata pembawa sial bagi orang-orang Belanda di seluruh kepulauan Nusantara. Akibatnya mereka segan dan ogah untuk bertugas ke Aceh. Hampir setiap pegawai atau aparat pemerintah Belanda, merasa amat takut bila mereka memperoleh berita tentang kepindahannya ke Aceh. Dan jika hal ini terjadi umumnya mereka berusaha secepat mungkin untuk mengirimkan isteri dan anak-anaknya ke negeri Belanda, karena mereka juga mendengar bahwa di antara para korban serangan-serangan pembunuhan Aceh itu banyak juga terdapat wanita dan anak-anak.<sup>4</sup>

Tidak ada suatu cara bagi pihak Belanda untuk memberikan suatu jawaban atau perlawanan balasan terhadap pihak Aceh atau si pelaku penyerangan. Oleh karena pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan secara perseorangan dan si pelaku memang bermaksud mencari kematian dalam penyerangan itu bagi dirinya. Dan agar matinya itu mati syahid dan tidak sia-sia maka dia harus membunuh musuh atau orang kafir, dengan harapan pula ia akan dapat masuk ke Surga. Maka tidak mengherankan dengan adanya gejala perlawanan seperti ini, pada tahun 1920 dan 1921 pihak Belanda mulai meng

---

4. *Ibid.*, hal. 370.

mengadakan penyelidikan-penyelidikan tentang masalah *Atjeh Moorden* itu.

Hasil penyelidikan pada peringkat awal tentang latar belakang timbulnya hal itu, pihak Belanda dengan begitu mudah menyatakan bahwa perlawanan yang berupa pembunuhan-pembunuhan tersebut adalah dilakukan oleh mereka yang tidak sehat jiwa atau ingatannya. Mereka berpendapat demikian dengan alasan yang dicari-cari, karena motif yang sebenarnya belum sanggup mereka ungkapkan. Pihak Belanda tidak habis mengerti, mengapa sampai ada orang-orang senekad itu untuk membunuh musuh dan sekaligus mencari kematian bagi dirinya sendiri. Dalam perkembangannya berdasarkan penyelidikan yang lebih mendalam yang dilakukan oleh R.A. Kern (salah seorang penasihat pemerintah Belanda yang berkenaan dengan urusan-urusan bumi-putera dan Arab), tentang masalah itu, dalam laporannya mengenai latar belakang timbulnya pembunuhan-pembunuhan Aceh (*Atjeh Moorden*) menyebutkan bahwa hal itu sebenarnya dilatar belakangi oleh kebencian yang meluap-luap terhadap orang-orang yang dianggap kafir dan adanya hasrat untuk mati syahid atau ingin menjadi pahlawan agama yang terkandung dalam setiap benak si pelaku pembunuhan-pembunuhan itu. Dalam hal ini peranan nilai-nilai agama dan hikayat perang sabil sebagai sumber motivasi bagi si pelaku adalah sangat besar. Selain itu juga karena adanya perasaan ingin *tung bila* (semacam balas dendam) terhadap mereka yang telah membunuh keluarganya ataupun kepada mereka yang telah membuat malu keluarga atau dirinya.<sup>5</sup> Pada bagian lampiran dari laporannya itu R.A. Kern mencantumkan se-

---

5. Collectie R.A. Kern, *Kern Papieren*. "Strukken betreffende de Atjehmoorden te Koeta Tjane, afdeeling Alaslanden 1921" (Leiden: Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land en Volkenkunde). 1921. H. 797 - 159.

jumlah data-data tentang peristiwa-peristiwa itu termasuk proses verbal pengadilan yang mengadili mereka yang terlibat atau yang berhasil ditangkap dalam *Atjeh Moorden* atau pembunuhan-pembunuhan Aceh itu. Adapun jumlah peristiwa/kejadian dan korban yang jatuh dalam kaitan pembunuhan khas Aceh itu antara tahun 1910 hingga tahun 1921 terdapat 79 kali serangan terhadap orang-orang Belanda, dengan 99 orang korban yang jatuh, yakni 12 orang yang meninggal dan 87 orang yang mengalami luka-luka berat. Sedangkan dari pihak pelaku serangan (pihak Aceh) jatuh korban 49 orang.

Secara kronologis peristiwa pembunuhan Aceh ini sejak tahun 1910 hingga tahun 1921 adalah sebagai berikut; dalam tahun 1910 yaitu 2 kali terjadi di Bireun, 1 kali di Kutaraja, 2 kali di Pidie, 2 kali di Tapaktuan, 1 kali di Serbodjadi dan 1 kali di Alaslander (negeri Alas). Selanjutnya dalam tahun 1911, 4 kali terjadi di daerah Pidie, 1 kali di Bireun, dan 1 kali di Idi. Dalam tahun 1912, 2 kali di Pidie, 2 kali di Bireun, 1 kali di Calang, 1 kali di Meulaboh, 1 kali di Tapak Tuan dan 1 kali terjadi di Sabang. Dalam tahun 1913, 4 kali di Pidie, 2 kali di Meureudu, 2 kali di Bireun, 1 kali di Idi dan 2 kali di Tapak Tuan. Dalam tahun 1914, 1 kali di Kutaraja, 3 kali di Pidie, 1 kali di Bireun, 1 kali di Calang, 1 kali di Tapak Tuan, dan 1 kali di Alaslanden (negeri Alas). Pada tahun 1915, 2 kali di Pidie, 2 kali di Lhok Sukon, 2 kali di Idi, 1 kali di Takengon dan 1 kali di Alaslanden (negeri Alas). Tahun 1916, 3 kali di Pidie, 1 kali di Lhok Seumawe, dan 1 kali di Tapak Tuan. Tahun 1917, 1 kali di XXII moekim (Aceh Besar), 5 kali di Lhok Seumawe, 2 kali di Lhok Soekon, 1 kali di Langsa, 1 kali di Tapak Tuan dan 1 kali di Alaslanden (negeri Alas). Tahun 1918, 1 kali di XXII moekim (Aceh Besar), 2 kali di Lhok Seumawe, 1 kali di Lhok Soekon, 1 kali di Idi dan 1 kali di Meulaboh. Tahun 1919, 1 kali

di Kutaraja, 1 kali di Biereuen, dan 1 kali di Alaslanden (negeri Alas.) Tahun 1920, hanya 1 kali di Simeuloe. Tahun 1921, 2 kali di Lhok Soekon dan 1 kali di Alaslanden (negeri Alas)<sup>6</sup> Dengan melihat lokasi atau tempat peristiwa itu terjadi, maka dapat disebutkan bahwa pembunuhan-pembunuhan khas Aceh itu terjadi merata di seluruh *afdeeling* yang terdapat di Aceh.

Ciri perlawanan dengan pembunuhan-pembunuhan khas Aceh ini tidak berhenti pada tahun 1921 itu saja, tetapi terus berlanjut hingga tahun 1942. Dan jumlah kejadian atau serangan terhadap orang-orang Belanda serta korban yang jatuh juga menunjukkan angka yang semakin meningkat. Dapat disebutkan dari tahun 1922 hingga tahun 1937 terjadi 82 kali serangan.<sup>7</sup> Di antara korban yang jatuh dan tewas pada periode ini dapat disebutkan seorang perwira Belanda (berpangkat Kapten) yang bernama C.E. Schmid. Ia menjadi sasaran pembunuhan Aceh ini pada tanggal 10 Juli 1933 di Lhok Soekon (Aceh Utara).<sup>8</sup> Dan si pelaku serangan adalah bernama Amat Leupon yang dapat ditawan tidak lama setelah ia berhasil menyanjatkan rencongnya ke dada Kapten C.E.Schmid. Dapat pula disebutkan pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. Terhadap wanita misalnya terjadi pada bulan Agustus 1933 di depan bivak Belanda di Bakongan dan terhadap anak-anak pada akhir Nopember 1933 di Kutaraja.<sup>9</sup>

Selain ciri perlawanan seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam periode 1912 – 1942 terdapat pula perlawan-

---

6. *Ibid.*, lampiran II.

7. Lihat J. Jongejans, *Land en Volk van Atjeh Vroeger Nu*, (Baarn: Hollandia Drukkerij, 1939), hal. 331.

8. *De Deli Courant*, 10 Juli 1933.

9. Lihat Politiek Politieel Verslag betreffende het Ge west Atjeh en Onderhoorigheden gederunde het Jaar 1933. *Mailr.* no. 374 geh./34.

an yang dilakukan secara berkelompok yang terkoordinir secara baik dan mempunyai pemimpin. Dan ciri perlawanan ini dapat dikategorikan sebagai perang gerilya. Dapat disebutkan misalnya pada tahun 1925 timbul gerakan melawan Belanda di Aceh Selatan di bawah pimpinan Cut Ali yang dianggap oleh Belanda sebagai seorang pemimpin yang berinisiatif dan mempunyai otak yang cerdas.<sup>10</sup> Cut Ali adalah tokoh pejuang yang sejak awal abad ke XX telah menjadi seorang Panglima dalam barisan perlawanan yang dipimpin oleh Teuku Ben Mahmud Blang Pidie di daerah Aceh Selatan. Perlawanan atau gerakan Cut Ali ini, pada 3 April 1926 berhasil menewaskan seorang kapten Belanda bernama J. Paris beserta 2 orang kadet dan 3 orang marsose, sedangkan 12 orang marsose dan 1 orang hukuman luka parah.<sup>11</sup>

Laporan politik Belanda tahun 1926 menyebutkan bahwa pada tanggal 15 April sepasukan brigade Belanda yang dipimpin oleh Letnan Batte dalam perjalanan dari Bakongan ke Trumon (Aceh Selatan) telah mendapat serangan dengan kelewang yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Cut Ali.<sup>12</sup> Sayang dalam laporan itu tidak disebutkan jumlah korban yang jatuh di pihak Belanda. Menurut berita kelompok gerakan perlawanan Cut Ali di Kluet berjumlah 60 orang, sementara di udik Bakongan berjumlah 14 orang. Kelompok ini selalu merepotkan pihak Belanda dengan penyerangan-penyerangan yang dilakukan, baik terhadap bivak-bivak maupun terhadap patroli-patroli Belanda. Perlawanan Cut Ali baru berakhir tahun 1927, ketika dia gugur dalam suatu pertempuran dengan pihak Belanda. Tetapi perjuangannya masih dilanjutkan oleh sebahagian para pengikutnya. Di Bakongan dan sekitarnya perlawanan dipimpin oleh Teuku Raja Angka-

---

10. *Mailr.* 1142/27.

11. *Ibid.*

12. *Ibid.*

sah. Dalam pada itu seorang tokoh perlawanan terhadap Belanda bernama Dato Nyak Mi, telah menjadi pemimpin sebuah kelompok gerakan anti Belanda di Trumon, ia memiliki 22 orang pengikut.<sup>13</sup>

Berdasarkan laporan tentang keadaan politik dalam Gubernurnemen Aceh dan daerah-daerah takluknya selama pertengahan pertama tahun 1927, disebutkan bahwa anggota-anggota yang melawan Belanda dalam wilayah kenegerian-kenegerian bahagian selatan Aceh, masih juga mempunyai pemimpin-pemimpin mereka seperti Teuku Bugeh, Pang Paneu', Habib Meulaboh, Teungku Kalam dan Teungku Abdul Karim,<sup>14</sup> Walaupun yang disebut terakhir dikatakan sebagai seorang lemah, tetapi namanya sebagai putera Teuku Ben Blang Pidie yang terkenal, masih saja mempunyai pengaruh yang besar di wilayah itu. Di kenegarian Manggeng, selama bulan Januari 1927 sebuah kelompok perlawanan terhadap Belanda yang terdiri dari 50 orang, telah melakukan "demonstrasi" dengan menaikkan bendera "muslimin" di atas sebuah bukit dekat sebuah bivak Belanda. Aksi ini sebagai tantangan terhadap kedudukan Belanda di bivak tersebut. Pimpinan kelompok ini bernama Guru Cebe. Dan menurut laporan Belanda pada bulan Pebruari 1927 ia bersama dengan seorang pengikutnya berhasil ditewaskan oleh patroli Belanda.<sup>15</sup> Selain itu laporan Belanda juga menyebutkan bahwa perlawanan yang dipimpin oleh Teuku Raja Tampok dan Pang Karim masih merupakan bahaya besar untuk ketentraman dan ketertiban di wilayah itu.<sup>16</sup> Begitu pula pada tahun 1928 muncul gerakan Teungku Amin, Teuku Karim dan kawan-kawan antara lain Pang Barat, Nyak Hat, Si Usen dan

---

13. *Mailr.* 1142 *geh.* /27.

14. *Ibid.*

15. *Ibid.*

16. *Mailr.* 853/28.

Si Molot juga dikenegerian Tapak Tuan Aceh Selatan. Perlawanan mereka diakui oleh Belanda sebagai suatu perlawanan yang hebat yang menyulitkan pihak Belanda untuk mengatasinya. Menurut laporan Belanda, selama perlawanan Teuku Karim dan kawan-kawannya ini, telah jatuh korban di pihak Belanda 32 orang tewas, tiga di antara perwira sedang yang luka-luka seorang perwira dan 3 orang perajurit. Dan di pihak pejuang-pejuang Aceh telah gugur 152 orang.<sup>17</sup> Kemudian juga perlawanan yang dipimpin oleh Teuku Raja Tampo' di daerah Aceh Barat yang sudah berlangsung bertahun-tahun, dan hingga akhir tahun tiga puluhan masih tetap merupakan momok bagi Belanda di Aceh. Selain itu juga perlawanan yang diberikan oleh kelompok Bidin di Samarkilang (Belanda menyebut *De Samarkilangbende*), Aceh Tengah sejak tahun 1917 hingga 1935.<sup>18</sup> gerakan Teungku di Jamee di atas Teunom, Calang Aceh Barat yang muncul sejak tahun 1925, gerakan Totok Dai di kenegerian Siemelu dan perlawanan rakyat di Lhong dan di Leupung (Aceh Besar) yang masing-masing terjadi pada tahun 1933 dan 1937. Perlawanan rakyat di Lhong erat sekali hubungannya dengan gerakan "perang sabil" yang terjadi secara stereotip itu.<sup>19</sup> Menurut laporan sebab musabab yang telah mendorong perlawanan rakyat di daerah itu ialah dorongan semangat yang mudah sekali untuk memerangi kafir, sementara ledakan "perang sabil" yang setiap saat bisa muncul dalam benak orang-orang yang berkehendak untuk melawan kafir. Dalam aksi rakyat di Lhong ini telah berhasil menewaskan seorang perwira Belanda

---

17. Memorie van overgave dari O.M. Goudhart, aftredend Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden, 30 Mei 1929, hal. 54. *Mailr* no. 134/29.

18. Memorie van overgave van A. Ph. Van Aken, aftredend Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden. *Mailr*. 504/36.

19. "De Oorzak van het verzet in Lhong" dalam *De De Courant* 17 Maret 1934.

yaitu kapten Haga dan beberapa serdadu Belanda lainnya.<sup>20</sup>

Lebih lanjut dapat pula disebut peristiwa perlawanan yang terjadi di Seulimum (Aceh Besar), yaitu pembunuhan berrencana yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang terhadap J.C. Tiggelman yang pada waktu itu menjabat sebagai *Controleur di Onderafdeeling* Seulimum. Peristiwa ini terjadi pada malam tanggal 23 Pebruari 1942. Dan pada hari berikutnya 24 Pebruari 1942 terjadi pula pembunuhan atas diri kepala urusan kereta api Aceh yang bernama Graaf U.Bernstroff von Sperling di dekat Keumireu juga termasuk dalam wilayah Seulimum. Kedua peristiwa yang tersebut terakhir ini terjadi di daerah *sagi XXII mukim* dan koordinasi perlawanan ini dipimpin sendiri oleh kepala *sagi XXII mukim*, Teuku Panglima Polem Muhammad Ali,<sup>21</sup> dan Teungku Abdul Wahab seorang ulama terkenal dari daerah itu. Gerakan mereka ini sebenarnya terjadi pada tanggal 12 Pebruari 1942. Pada tanggal itu beberapa orang penduduk di sekitar Seulimum yang dikoordinir oleh kedua tokoh di atas, melancarkan serangkaian sabotase terhadap Belanda di Seulimum, seperti mengadakan pengrusakan jembatan, rel kereta api, dan kawat telepon agar Belanda yang berkedudukan di Seulimum menjadi terisolir. Dalam perkembangannya gerakan rakyat di Seulimum ini, diikuti pula oleh rakyat di tempat-tempat lain, seperti di sekitar Kutaraja dan di Lhok Nga. (Aceh Besar). Dan kemudian menjalar ke seluruh Aceh yang umumnya dikoordinir oleh pemimpin-pemimpin organisasi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), dan oleh sebahagian

---

20. *Mailr.* no. 374 *geh.*/34.

21. Teuku Muhammad Ali Panglima Polem, *Memoires van Teuku Muhammed Ali Panglima Polem*, (Haarlem: diterbitkan oleh J.H.J. Brendgen, 1978), hal. 4-5. Terjemahan ke dalam bahasa Belanda oleh J.H.J. Brendgen.

*uleebalang* seperti *uleebalang sagi XXVI mukim* (Aceh Besar), Teuku Nyak Arah.

Semua peristiwa ini (perlawanan rakyat Aceh tahun 1942), merupakan rentetan perlawanan rakyat Aceh dalam rangka untuk mengusir Belanda menjelang kedatangan bala tentara Jepang.



## BAB IV PERLAWANAN TERHADAP JEPANG

### A. Selayang Pandang Latar Belakang Situasi Aceh Menjelang Kehadiran Jepang

Menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh yaitu sekitar tahun 1941 dan di awal 1942, rasa kurang senang rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda semakin memuncak. Walaupun Belanda telah berusaha untuk mencoba menaruh simpati, namun rasa kemarahan rakyat sukar untuk dibendung. Gejala semacam ini akan terlihat dari penampilan dan aktivitas rakyat yang bertujuan untuk menentang kehadiran dan pendudukan Belanda.<sup>1)</sup> Perjuangan rakyat Aceh dalam mengusir pemerintahan kolonial Belanda bukan saja secara diplomasi politik, bahkan ia juga dalam bentuk perlawanan fisik dengan mempergunakan senjata. Wajah perjuangan rakyat Aceh yang menelan waktu sedemikian panjang, pada umumnya dipelopori oleh para Ulama Ulebalang. Kedua golongan itu sangat berpengaruh di dalam masyarakat Aceh.

Perjuangan dalam bentuk politik, misalnya dengan mengadakan rapat-rapat rahasia untuk menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi Belanda dan mengadakan hubungan dengan luar negeri untuk memperoleh bantuan. Kesemua jaringan usaha yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan

---

1. Untuk melihat lukisan peta perjuangan rakyat Aceh mengusir Pemerintah kolonial Belanda di Aceh, baca Teuku Ibrahim Alfian *Perang Di Jalan Allah*, (Disertasi Ph D), Yogyakarta, 1981, selanjutnya untuk melihat uraian yang lebih mendalam juga mengenai kompetisi antara Inggeris, Belanda dan Siak dengan kerajaan Aceh, lihat Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Aceh*, Aceh lihat Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Aceh, The Netherlands and Britain 1853 - 1898*. (London: Oxford University Press, 1966), B.Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, (Bandung: van Hoeve Ltd) The Hague, 1955) hal. 50 - 64.

kembali kemerdekaan yang sudah begitu lama didambakan. Salah satu rapat penting yang diselenggarakan ialah dalam rangka menyusun strategi menghadapi suasana perang yang berlangsung antara Jepang dan Belanda, telah dilangsungkan di rumah Teuku Njak Arief (sebagai Kepala Sagi XXVI *Mukim*) pada bulan Desember 1941. Rapat itu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat baik di pihak ulama maupun di kalangan Ulebalang. Di antara tokoh atau para senior yang hadir adalah Tengku Muhammad Daud Beureuh dan Abdul Wahab Seulimun. Kedua tokoh itu mewakili Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Adapun tokoh cendikiawan bangsawan di antaranya Teuku Njak Arief (Panglima Sagi XXVI Mukim), Teuku Panglima Polem Muhammad Ali (Panglima Sagi XXII), Teuku Ahmad (Ulebalang Jeunib). Adapun isi keputusan penting dalam musyawarah yang diselenggarakan itu, yaitu dikeluarkannya sebuah pernyataan sumpah setia mereka terhadap agama Islam, bangsa dan tanah air serta menyusun pemberontakan bersama melawan pendudukan Belanda dan bekerja sama dengan pemerintahan Jepang.<sup>2</sup>

Selain mengadakan rapat seperti yang dikemukakan di atas, PUSA juga aktif dalam menjalin hubungan kerja sama dengan pihak Jepang yang telah berada atau berhasil menduduki semenanjung Malaysia (ketika itu bernama Malaya). Kelompok tokoh masyarakat Aceh yang moderat yang tergabung ke dalam PUSA di antaranya Said Abu Bakar dan Syekh Ibrahim, dikirim sebagai duta atau orang yang menjadi utusan khusus ke Malaya dengan tujuan untuk merintis dan menjajaki kemungkinan masuknya Jepang ke Aceh

---

2. M. Joenoes Jamil, *Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan) di Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial, Aceh, 1975), hal. 4-5, Jabaran uraian lainnya lihat lagi buku Anthony Reid, *The Blood of The People: Revolution and The End of traditional Rule in Northern Sumatra*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979) hal. 84 - 9.

dengan maksud agar supaya secepat mungkin dapat mengusir Belanda.<sup>3</sup> Usaha perjuangan yang bersifat politik lainnya adalah berupa suatu tuntutan yang disampaikan oleh Teuku Nyak Arief dalam pertemuan residen Aceh (pada waktu itu J.Pauw) dengan para panglima-panglima Sagi dan Ulebalang-Ulebalang, yang bertempat di Kutaraja (Sekarang Banda Aceh).

Dalam rapat yang dikemukakan di atas berbagai gagasan dan usaha telah diajukan oleh Teuku Njak Arief kepada residen Belanda. Salah satu ide yang ditampilkannya agar supaya pemerintahan diserahkan terimakan ke tangan rakyat Aceh sendiri. Seterusnya Teuku Njak Arief juga mengemukakan gagasannya menyiapkan rakyat Aceh agar mampu melindungi dan mempertahankan tanah airnya dan dapat membela diri sendiri bila terjadi ancaman dari pihak luar (pemerintahan asing). Ia juga mengharap kepada rakyat agar mampu mengatur pemerintahan sekiranya Belanda mengalihkan kekuasaan kepada rakyat. Petisi tuntutan ini ditolak oleh residen Pauw, sehingga mulai saat itu Teuku Njak Arief jarang mengadakan hubungan dengan pemerintahan kolonial Belanda.<sup>4</sup>

Sejalan dengan kemajuan-kemajuan awal yang dicapai oleh pihak tentara Jepang dalam menghadapi sekutu pada perang Asia Timur Raya yang disiarkan melalui pelbagai media massa, telah menumbuhkan semangat dan harapan di dalam diri orang Aceh untuk membebaskan diri mereka ter-

---

3. Nazaruddin Sjamsuddin, *The Course of The National Revolution In Aceh, 1946 - 1949*, Thesis yang tidak diterbitkan, Monash University, 1974 hal. 34, lihat juga referensi A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 1, Bandung: disjarah AD dan Angkasa, 1977), hal. 93 - 4.

4. A.H. Nasution, *Op. Cit.*, Hal, 94 - 95.

hadap kungkungan penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh para elite politik menyadari bahwa suasana perang yang sedang berlangsung merupakan kesempatan yang cukup berharga untuk melakukan tekanan terhadap pemerintahan Belanda. Hal ini bukan saja dari sudut politik, malahan juga adanya indikator tentang tekanan yang dilakukan, dapat dibuktikan pada serangkaian tindakan yang mereka laksanakan pada penghujung waktu kekuasaan Belanda di Aceh.

Salah satu fenonema (gejala) yang ditampilkan rakyat yang merugikan Belanda ialah peristiwa pada tanggal 19/20 Januari 1942. Pada saat itu rakyat Seulimun Aceh Besar telah melakukan sabotase dengan cara merusakkan kawat-kawat telepon dan rel kereta api. Manifestasi lain dari tindakan kekerasan yang ditunjukkan oleh rakyat Aceh Besar terlihat pada gejala berupa pembunuhan terhadap controleur Belanda yang bernama Tigelman di sekitar daerah Seulemum. Rentetan tindakan lain yang bukan bersifat laten di luar kawasan Aceh Besar adalah terjadinya perlawanan-perlawanan fisik pada tanggal 25 Januari 1942 di Sigli. Insiden ini mengakibatkan terbunuhnya asisten residen Sigli Van den Berg. Peristiwa berdarah bukan hanya terjadi di kawasan Aceh Besar dan Pidie, namun ia beruntun sampai menjalar ke daerah pantai Barat. Di daerah Aceh Barat dibawah pimpinan Teuku Sabi Lageuen juga melakukan tindakan protes dan penyerangan terhadap asrama tentara Belanda di Lageuen dan kantor pemerintah di Calang. Sabotase dan perlawanan fisik terjadi pula di Blangsidi dipimpin oleh T. Diwa.<sup>5</sup>

---

5. Peristiwa-peristiwa yang dilancarkan oleh rakyat Aceh menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh, secara lebih luas dapat dilihat misalnya, dalam Muhammad Ibrahim (Ketua), *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*.

(Banda Aceh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1978/1979, hal. 137 - 47.

Dalam suasana yang panas ini tentara Jepang mulai merampas dan melakukan pendudukan terhadap wilayah-wilayah Hindia Belanda. Di daerah teritorial Aceh, pasukan Belanda dipimpin oleh kolonel G.F.V. Gosenson sebagai komando pimpinannya. Secara nyata titik awal pendaratan Jepang di Aceh pada tanggal 12 Maret 1942. Pendaratan dilakukan pada tiga tempat, yaitu masing-masing di Krueng Raya (Aceh Besar), Sabang (Pulau Weh) dan Peureulak (Aceh Timur).<sup>6</sup> Pendaratan Jepang di Aceh berlangsung dengan sukses yaitu tanpa mendapat rintangan baik dari pemerintahan Belanda maupun di pihak rakyat Aceh. Malahan yang lebih mengherankan adalah kedatangan tentara Jepang, disambut dengan baik oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena Jepang sudah melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan jalan menciptakan suasana politik yang menguntungkan, yaitu mengadakan kontak langsung dengan para pemimpin PUSA, yang sebahagian besar mempunyai kharisma dan kepercayaan di hati rakyat, sehingga dengan demikian awal kedatangannya (Jepang) tidak mendapat perlawanan rakyat.<sup>7</sup>

Sejak saat tentara Jepang mendarat di Aceh, mereka bersama-sama dengan rakyat yang bergabung barisan "F" (Fujiwara) terus melakukan serangan gencar terhadap pasukan Belanda. Kontak persenjataan antara Jepang dan Belanda yang berusaha untuk mempertahankan lapangan udara Lhok Nga yang dianggap vital kedudukannya. Dalam persaingan ini, Belanda mengalami kekalahan, sehingga mereka mundur dan lari ke pantai barat dan selatan sampai ke Lae Butar untuk bergabung serta mempertahankan diri dengan kelompok mereka yang sudah ada di wilayah itu. Selama

---

6. M.Joenoed Jamil, *Op.Cit.*, hal. 76.

7. Paul Van't Veer, *De Atjeh-Oorlog* (Perang Belanda di Aceh) alih bahasa Aboe Bakar, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, 1977), hal. 374.

proses pengunduran diri tentara Belanda telah terjadi serangkaian konflik persenjataan dengan para pejuang di pantai Barat Aceh.<sup>8</sup>

Pengejaran tentara Belanda oleh pasukan Jepang dan pejuang-pejuang rakyat Aceh melintasi juga daerah Aceh Besar dan Pidie. Di daerah Pidie Belanda melarikan diri ke daerah Tangse dan Geumpang yang merupakan daerah benteng pertahanan Belanda. Garis lintas pengejaran Belanda oleh Jepang dan rakyat juga membentang sampai ke daerah Aceh Tengah yaitu Takengon dan wilayah tanah Karo/Kuta Cane. Tekanan yang dilancarkan oleh Jepang secara terus-menerus menyebabkan Gosenson terpaksa menyerah di Blang Keujeuren pada 28 Maret 1942. Dengan demikian berakhirilah kekuasaan Belanda secara resmi di daerah Aceh.

Dengan berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh, maka mulailah dilakukan perubahan-perubahan struktural pemerintahan. Perubahan tersebut tidak bersifat fundamental sekali, hal ini tampak pada pola struktur pemerintahan Belanda yang hanya ditukar sebutannya saja. Warisan struktur birokrasi pemerintahan kolonial Belanda seperti afdeling, onder afdeling, zelfbestuur dan gampong masih tetap diteruskan, hanya istilah nama mengalami transformasi. Istilah afdeling diganti dalam bahasa Jepang yaitu *bunshu*, *gun* untuk onderafdeling, *son* pengganti uleebalangschaap, *ku* untuk kemukiman, dan *kumi* sebagai pengalihan kata gampong.<sup>9</sup>

Dalam menempatkan jabatan pimpinan pemerintahan, Jepang masih tetap meneruskan gaya tradisi sebelumnya yaitu memilih elite bangsawan untuk menduduki jabatan-jabatan itu. Namun demikian ada sikap lunak yang dipunyai

---

8. M. Joences Jamil, Op.Cit., hal. 56 - 7.

pemimpin Jepang jika dibandingkan dengan pendahulunya. Hal semacam ini ditunjukkan dari gambaran sikap Jepang atas dilepaskannya jabatan *guncho* yang dahulu dipegang oleh seorang Belanda, sekarang jabatan tersebut diberikan kepada bumi putera.<sup>10</sup>

Perlu diketengahkan pula di sini bahwa sesudah pemerintahan Jepang melakukan pendudukan di Aceh, mereka melakukan tindakan pula berupa tekanan terhadap organisasi-organisasi dan partai-partai yang ada yang tampak mulai berkembang lagi. Tindakan ini menurut anggapan mereka untuk menjaga stabilitas sebagai dalih suasana masih dalam keadaan perang. Perlakuan semacam ini berakibat organisasi-organisasi dan partai-partai politik yang sudah ada, seperti Taman Siswa, PUSA, Parindra, dan Muhammadiyah menjadi lumpuh dan mengalami pasang surut.<sup>11</sup> Sebagai bukti misalnya organisasi Taman Siswa, dibubarkan oleh Gunseibu. Gejala yang serupa juga dialami oleh organisasi Parindra, PUSA dan Muhammadiyah yang mengalami rintangan sehingga aktifitasnya berkurang, walaupun kemudian pada tahun 1943 diaktifkan kembali, namun para pemimpinnya sudah disibukkan oleh tugas-tugas rutin dalam birokrasi pemerintahan Jepang.<sup>12</sup>

9. Sebutan bagi kepala wilayah administrasi itu juga disesuaikan dengan bahasa Jepang, yaitu *Bunshucho* bagi kepala *bunshu*, *Guncho* bagi kepala *gun*, *soncho* bagi sebutan kepala *son*, *kucho* panggilan kepala *ku* dan *kumicho* untuk kepala kumi.

10. Sebelumnya jabatan kontroler atau *guncho* dijabat oleh orang Belanda. Hanya beberapa orang *guncho* yang bukan dari elite uleebabalang. Di antaranya yaitu Sayid Abu Bakar dan Marah Husen yang menjadi *gunchor* di Bakongan dan Sinabang, Daftar *Guncho* di Aceh, lihat A.J. Piekaar, *Atjeh en De Oorlog met Japan*, (Bandung: W. Van Hoeve, 1949), hal. 339 - 43.

11. Lihat A. Arief, *Bingkisan Kenang-kenangan Kongres Besar PUSA dan Pemuda PUSA. Tinjauan Sejarah Pergerakan di Aceh*, (Seksi Penerangan Panitia Kongres Besar PUSA Kuta Raja, 1950), hal. 15 - 6.

12. H.J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun. Indonesian Islam under the Javanese Occupation, 1942 - 1945*, (Den Haag: Uitgeverij W. Van Hoeve, 1958), hal. 274.

Pengaruh dari gejala yang dikemukakan di atas, menyebabkan para simpatisan Jepang, terutama dari pihak golongan PUSA, yang mana pada sebelumnya menaruh simpati, mulai mengalami erosi. Akibat rasa kurang senang, maka hubungan para elite politik dengan pemimpin pemerintahan menjadi dingin dan mengalami kerenggangan.<sup>13</sup>

## B. Perlawanan Rakyat Aceh terhadap Jepang

Pada bahagian terdahulu telah disajikan bahwa pernah terjadi keretakan hubungan antara ulama yang tergabung dalam PUSA dengan Jepang. Keretakan ini menimbulkan hubungan yang kurang simpatik mereka kepada pemerintahan Jepang. Selain dari pada itu tindakan dan perlakuan yang kurang wajar dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat menimbulkan semakin tajamnya arus kebencian mereka. Tenaga rakyat diperas secara lebih leluasa untuk mengerjakan pekerjaan besar maupun kecil seumpama pembuatan jalan, lapangan terbang dan lain sebagainya. Penggunaan tenaga rakyat untuk kepentingan Jepang baik untuk kepentingan militer/pertahanan dan untuk kepentingan ekonomi, menyebabkan rakyat kurang mampu atau tidak sempat lagi mengerjakan kepentingan pribadi mereka. Hal ini membawa kepada keadaan sosial ekonomi rakyat yang semakin sulit dan menyedihkan. Tenaga rakyat hanya dipusatkan dan di arahkan untuk mengerjakan proyek-

---

13. Adanya hubungan renggang antara tokoh PUSA dengan Jepang kiranya disadari oleh para pemimpinnya, maka karena mereka (Jepang) mengetahui bahwa elite ulama berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Aceh, timbullah usaha mereka lagi untuk menjinakkan para pemimpin PUSA. Salah satu usahanya adalah menarik elite ulama ke dalam orbitnya. Usaha lain untuk mewujudkan rencana itu, pemerintah membentuk lembaga majelis Agama Islam untuk kemakmuran Asia Timur Raya (MAIBKATRA) di Aceh pada tahun 1943 yang ketuanya ditunjuk Tuanku Abdul Aziz. Lihat A.J. Piekaar, *Op.Cit.*, hal. 23-4, 201 dan 205.

proyek besar yang dibangun pemerintahan Jepang. Di antara proyek besar yang dibangunnya yang memerlukan tenaga Romusya secara besar-besaran adalah proyek jalan raya Takengon – Blang Keujeran dan Proyek pertahanan gunung Setan di Tanah Alas. Proyek ini dimulai pada tanggal 1 Januari 1944 dan selesai pada awal Juli 1944. Romusya yang dikerahkan tersebut ditarik dari pelbagai daerah Aceh yang dilakukan oleh sebuah badan yang bernama "perkumpulan pekerja-pekerja untuk umum di Aceh untuk pembinaan Asia Timur Raya."<sup>14</sup>

Kebencian yang mendalam terhadap Jepang semakin mengendap. Endapan kebencian lambat-laun menimbulkan luapan perasaan yang tidak dapat dikendalikan lagi yang akhirnya tercetus dalam bentuk perlawanan fisik berupa konflik terbuka. Perlawanan berupa insiden kecil yang dilakukan rakyat maupun *Gyu-Gun* yang telah mereka latih terjadi pada 1943 di daerah Blang Ara.<sup>15</sup> Perlawanan *Gyu-Gun* yang lainnya pecah di daerah Meureudu yang dipelopori oleh T. Abdul Hamid salah seorang perwira *Gyu-Gun*. Ia kemudian melarikan dua pleton *Gyu-Gun* ke gunung, tetapi kemudian terpaksa menyerah setelah Jepang menawan semua keluarga sebagai sandera.<sup>16</sup>

Adapun perlawanan rakyat yang tidak dapat dilupakan kurun waktu kehadiran dan pendudukan Jepang di bumi Aceh adalah perlawanan Bayu (disekitar Lhok Seumawe) tahun 1942 dan Pandrah (Jeunieb) menjelang tahun 1945.<sup>17</sup> Tentu saja bilamana ditinjau dari motor penggerak yang

---

14. *Medan Area, Op. Cit.*, hal. 699.

15. *Dua Windu Kodam -I/Iskandar Muda*, Jarahdam-I/Iskandar Muda, 1972, hal. 75.

16. *Medan Area, Op. Cit.*, hal. 64.

17. *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Jawatan Penerangan Republik Indonesia) hal. 19.

dapat menimbulkan gerakan perlawanan yang disebutkan di atas, maka penyebabnya adalah faktor perlakuan yang kurang wajar oleh Jepang, tetapi ia juga disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan baik dalam hal etnis, agama maupun perbedaan yang lainnya yang kesemuanya ini ikut menunjang berlangsungnya perlawanan. Di sini perlu diketengahkan sekedar ilustrasi kedua perlawanan tersebut (Perang Bayu dan Perang Pandrah).

### Perang Bayu

Kira-kira tujuh bulan sesudah masuknya Jepang ke Aceh, terjadilah insiden pertama sebagai perlawanan rakyat terhadap Jepang dibawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Sejak kecil ia telah sering membaca Hikayat Perang Sabil, sehingga mengakibatkan tumbuhnya kebencian yang mendalam kepada penjajah. Propaganda-propaganda yang dilancarkan oleh pemerintahan Jepang serta PUSA dan barisan-barisan Fujiwara Kikan tidak banyak mempengaruhi beliau. Ia boleh dikatakan kurang sependapat dengan para ulama yang tergabung di dalam PUSA yang memprakarsai pemasukan dan penerimaan Jepang di Aceh.<sup>18</sup>

Oleh karena memang Teungku Abdul Jalil sudah bersifat antipati yang mendalam terhadap Jepang, maka tidaklah mengherankan ia terus mengkampanyekan dalam berbagai pidatonya menjelaskan kepada masyarakat tentang hal-hal yang akan timbul akibat masuknya Jepang. Dia juga menganjurkan kepada rakyat, bahwa melawan Jepang merupakan *Fardhu Ain*. Pada suatu malam dalam bulan Juli 1942 Teung-

---

18. Sjamaun Gaharu, *beberapa catatan tentang Perjuangan menegakkan Kemerdekaan di Aceh Sejarah Proklamasi sampai dengan pengakuan Kemerdekaan Indonesia*, (Medan: Prasaran pada seminar Perjuangan Aceh sejak 1873 sampai dengan Kemerdekaan Indonesia, 1976) hal. 8.

ku Abdul Jalil diundang untuk memberikan dakwah di kampung Krueng Lingka Kecamatan Baktiya Aceh Utara. Dalam dakwahnya dia mengecam Jepang dan membentangkan hal-hal yang membahayakan agama dan keadaan rakyat yang makin lama makin buruk ekonominya dan hak-hak kemanusiaan yang tidak diperdulikan. Oleh karena itu dia menganjurkan untuk berjihad fisabilillah demi untuk membela agama dan rakyat dengan melawan Jepang.<sup>19</sup>

Akibat pidato yang disampaikan oleh Teungku Abdul Jalil itu, maka retaklah hubungannya dengan pemerintahan Jepang, sehingga dia berkali-kali dipanggil untuk menghadap ke polisi di Lhok Seumawe, namun panggilan tersebut tidak diindahkannya. Untuk menghadapi ancaman Jepang ini, dia mulai menyiapkan diri dan waspada terhadap setiap kemungkinan bahaya. Adapun persiapan-persiapan yang dilakukannya adalah melatih cara-cara menggunakan pedang, tombak, kelewang dan rencong. Bertindak sebagai pelatihnya adalah Teungku Muhammad Taib, Teuku Tjahi, dan Teuku Tjot Rameh, kesemuanya ini merupakan saudara-saudaranya. Oleh karena dia seorang Teungku (alim) dan lagi pula sebagai pemimpin atau guru pada pelbagai dayah, maka dia juga mempunyai pengikut yang diperkirakan tidak kurang dari 400 orang. Hasil musyawarah yang diadakan di Dayah Cot Plieng semua pengikut berjanji bersumpah setia untuk melawan Jepang serta benar-benar bertekad fisabilillah apabila tentara Jepang datang untuk menyerang dan menangkapnya.<sup>20</sup> Atas sikap keras Teungku Abdul Jalil ini, Jepang berusaha untuk membujuk dan melunakkannya, namun usaha-usaha itu boleh dikatakan belum berhasil bahkan mengalami kegagalan.

---

19. *Sejarah Pertempuran Cot Plieng Bayu Lhue simpang Pandrah melawan Pasisme Jepang*, Laporan hasil penelitian Kabin Kebudayaan Departemen P dan K Kabupaten Aceh Utara, 1974, hal. 2.

20. *Ibid.*, hal. 3.

Sebagai akibat kejadian yang dijelaskan di atas, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan penyerangan terhadap benteng pertahanan mereka ke komplek dayah Cot Plieng. Pada tanggal 7 Nopember semua pasukan dikerahkan baik dari Bireun, Lhok Seumawe dan Lhok Sukon yang dibekali dengan persenjataan lengkap. Dalam pertempuran yang berlangsung selama empat jam (mulai jam 12.00 sampai dengan jam 16.00) telah mengalami banyak korban. Sesudah tentara Jepang dapat menguasai komplek dayah Cot Plieng maka mulailah mereka membakar bangunan dayah, mesjid dan sebelas rumah rakyat yang berdekatan dengan dayah, termasuk rumah Teungku Abdul Jalil sendiri. Dalam pertempuran ini juga gugur 86 orang pengikut Teungku Abdul Jalil.<sup>21</sup>

Tengku Abdul Jalil dan pengikut-pengikutnya mengundurkan diri serta menyingkir ke Mesjid Paya Kombok, Kecamatan Meurah Mulia. Dalam perjalanan mereka di gampong (desa) Neuheun terjadi lagi pertempuran yang kedua kalinya. Pada pertempuran 8 November 1942 ini gugur sebanyak 4 orang laki-laki dan 2 orang wanita.<sup>22</sup>

Sesudah melakukan perjalanan selama 2 hari, bertempat di Meunasah Blang Buloh Gampong Teungoh terjadilah pertempuran yang terakhir. Peristiwa ini berlangsung sesudah sembahyang Jum'at di mana tokoh pimpinan perang Bayu Teungku Abdul Jalil gugur di medan pertempuran tersebut.

### Perang Pandrah

Perang Pandrah berlangsung ketika beberapa bulan lagi Jepang meninggalkan bumi Aceh. Faktor motivasi pendorong terjadi perang, selain sebab perjuangan yang bersifat mem-bela agama, juga faktor ekonomi dalam mempertahankan

---

21. *Ibid.*, hal. 4.

22. *Ibid.*,

hak milik dari perampasan-perampasan yang terus menerus dilakukan oleh rejim pemerintahan Jepang.

Pertama-tama sebelum dilaksanakan penyerangan ke tangsi militer di Lheueu Simpang, terlebih dahulu mereka menyiapkan persiapan dan perbekalan guna menghadapi serangan Jepang. Pada 24 April 1945 Keucik Lheue (Kepala Kampung Lheue) yang bernama Usman telah mengadakan rapat guna mengadakan perlawanan terhadap Jepang.

Penyerangan yang pertama terjadi pada tanggal 8 Mei 1945 dibawah pimpinan Keucik Djohan dan Panglima Perang Teuku Jacob. Penyerangan ke tangsi Pandrah dilakukan pada malam hari sewaktu pasukan Jepang sedang tidur nyenyak. Tentara Jepang yang berdinas jaga pada waktu itu hanya tiga orang dan di antaranya satu orang sempat lolos melarikan diri serta melapor ke asrama Jeunieb. Berita penyerangan diteruskan ke pusat militer Bireun, Lhok Semawe, Sigli dan Banda Aceh. Usaha pemberitaan yang cepat itu dimaksudkan agar supaya kejadian semacam peristiwa di Bayu tidak akan terulang kembali.

Untuk menanggulangi peristiwa Pandrah ini, pihak Jepang pada 5 Mei 1945 telah didatangkan sebanyak satu kompi tentara Jepang dari Bireun dan Sigli. Namun demikian tokoh yang melakukan penyerangan tidak ditemui karena telah pergi ke Gle Bangkalang sebuah hutan tempat markas pertahanannya.

Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 1945 pasukan Muslimin yang bermarkas di Gle Bangkalang mengadakan penyerangan ke tempat pemusatan pasukan Jepang di daerah kampung Lheue Simpang, dibawah pimpinan Teuku Ibrahim Peudada. Gerakan perlawanan yang digerakkan Teuku Ibrahim Peudada juga bersifat jihad fisabilillah, artinya dengan mengumandangkan azan, takbir dan zikir pasukan Muslimin melakukan perjuangan secara serentak. Mereka membacok/menebas

orang-orang Jepang, sehingga menimbulkan korban dari kedua belah pihak. Adapun yang gugur dari barisan Kaum Muslimin diperkirakan sebanyak 43 jiwa di antaranya seorang kaum wanita. Perempuan yang gugur itu bernama Siti Aminah yang sedang dalam keadaan hamil tua.<sup>23</sup> Kesemua anggota pejuang Aceh yang gugur disemayamkan di kampung Lheue Simpang. Tempat lokasi penguburan tersebut dinamakan dengan kuburan *peuet plooh peuet* (empat puluh empat), karena yang gugur di sana berjumlah 44 orang yaitu ditambah seorang bayi yang dikandung. Di pihak tentara Jepang yang meninggal dalam pertempuran diperkirakan lebih banyak lagi yaitu mencapai 200 orang korban yang kesemua jenazahnya dibawa pulang ke Pandrah. Dampak peristiwa Pandrah mengakibatkan banyak anak-anak dan kaum wanita yang berasal dari kampung Lheue Simpang dijadikan tawanan dan sandra walaupun kemudian dilepaskan kembali. Selain dari pada itu pengejaran terhadap kaum muslimin yang belum menyerah terus dilakukan. Yang tertangkap dibawa ke Bireun untuk diperiksa, bilamana ada yang bersalah di antaranya ia terus dibawa ke Pematang Siantar untuk diadili serta diberikan ganjaran hukuman mati.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah merupakan titik akhir perjuangan rakyat Aceh terhadap Belanda maupun Jepang. Proklamasi hanya merupakan keputusan politik pengesahan kemerdekaan. Di mana-mana masih jelas kelihatan usaha pemerintahan asing (Belanda, Jepang dan bangsa-bangsa lainnya) untuk berusaha bercokol di bumi Indonesia termasuk Aceh. Oleh karena hal yang demikian, timbullah usaha-usaha pemimpin Aceh untuk membentuk organisasi pertahanan dan keamanan rakyat guna mempertahankan kemerdekaan.

---

23. Muhammad Abdul Muthalib, *Riwayat Prang Pandrah Masa Jidug Jepang 1945*, (Kuta Raja: Martabah Aceh Raya, jilid 11) hal. 17.

Dengan terbentuknya Angkatan Pemuda Indonesia (API), Tentara Pelajar Islam (PTI), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Mujahiddin dan organisasi-organisasi rakyat yang lainnya di Aceh, maka usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan semakin sempurna. Kegiatan-kegiatan untuk merampas senjata Jepang tampak tumbuh di berbagai daerah. Di Kota Bakongan (Aceh Selatan) sudah disembunyikan sebanyak 12 pucuk senjata beserta 6000 peluru atas inisiatif Abdullah Sjarief. Dalam hubungan ini juga di Calang atas prakarsa A.K. Djailani beserta kawan-kawannya telah menemui dan menyimpan sejumlah 2 senapan mesin, 4 bren dan 50 pucuk kerabin.<sup>24</sup> Selanjutnya akibat serangan rakyat yang gencar tentara Jepang terpaksa menyerah di Daerah Seulimum (25 November 1945). Kepungan ini mengakibatkan penyitaan sejumlah 180 pucuk senjata, 3 pucuk meriam dan 3 gudang amunisi.

Perjuangan rakyat untuk mengusir Jepang menjalar sampai ke daerah pantai barat dan selatan. Salah satu usaha serangan yang tidak dapat diabaikan serta dilupakan adalah penyerangan terhadap tangsi atau asrama militer Jepang di Meulaboh. Gerakan ini berlangsung sampai 7 hari lamanya, yang dipelopori oleh Mohammad Daoed, Daryah Raja Syang dan juga tokoh-tokoh bekas Giugun dan Tokobetsu lainnya. Walaupun tingkat persenjataan relatif sederhana yang hanya menggunakan senjata-senjata bekas sitaan namun serangan rakyat yang gencar itu mengakibatkan Jepang terpaksa meninggalkan asrama dan melarikan diri melalui jalan laut. Dari semua ilustrasi yang dikemukakan di atas dapatlah dikatakan bahwa serangan dan perlawanan rakyat untuk mengusir Belanda dan Jepang telah menunjukkan usaha yang

---

<sup>24</sup> Jarahdam I/Iskandar Muda, *Dua Windu Kodam - I/Iskandar Muda* (1972), hal. 103.

begitu militan dan bersemangat sampai mereka terusir dari bumi Aceh.

# Serenissimo y Potentissimo Rey y Principe.

El año pasado de noventa y ocho partieron dos navios

de Mexico los por mi orden de estas Provincias para hazer su viaje en las YNDIAS OCCIDENTALES, y boluieron a quinze d'Agosto del presente Dando me relacion del buen recibimiento y noticias que via MAJESTAD les ha hecho a su venida en las Reynos de Vsta d'icha Ma<sup>d</sup> y que confiado se en aquella amistad proseguieron su viage con todo lealdad y acatamiento segun el natural y costumbre de las de esta nacion Mas que los Portugueses subditos del Rey de España y enemigos de Vstos Reinos entendido que los dichos Navios es tanu asegurado y amparados de hazer de la palabr del Rey de Vsta

ciudad lo a entender falsedades avia d'icha Ma<sup>d</sup> y engañandole con mentiras acusandole los dichos Mercaderes como Coyacates, y que auian venido para robar las uillas y subditos de Vsta Ma<sup>d</sup> que auian sido causa que Vsta Ma<sup>d</sup> auia detenido en sus puertos a FADRIQ y FIDELI

de Vsta Ma<sup>d</sup> y otros de los dichos Navios con algunos Portugueses de que he recibido pesadumbre

Ma<sup>d</sup> tengo esperanca que los vna mandado buen uiaje como han sido los que han venido de aquellos Reynos, y incluyan agora con entera libertad lo que yo quisiera que sea por tanto tambien a los dichos presos que alla quedarian.

Yo mande que se libere a los dichos Portugueses que se hallan en las d'ichas Provincias por mandado del Rey de España, y que se les libere su libertad y ponellos en subditos como a costumbre como lo han pretendido de hazer en estas Provincias por el espacio de mas de treinta años

continuos lo que DIOS n. ha querido. Mas antes les he mes resuelto con fuerza de armas como un lo hazeremos de continuo.

Yo PORTUQ. Suplico a Vsta Ma<sup>d</sup> que no sea por los dichos Portugueses. Y para que Vsta Ma<sup>d</sup> no tenga de mi mas ocasion de alboroto, yo suplico de los que quedan aqui veniesen a tratar en sus Reynos.

He dado orden y provision para que se libere a los dichos presos que son quatro Capitanes cuyos nombres son CONRADO BASTIEN, JUAN DE TOLEDO, MARTIN ANTONIO y JUAN DE

TOLEDO, y se libere a los dichos presos que son quatro Capitanes cuyos nombres son CONRADO BASTIEN, JUAN DE TOLEDO, MARTIN ANTONIO y JUAN DE

TOLEDO, y se libere a los dichos presos que son quatro Capitanes cuyos nombres son CONRADO BASTIEN, JUAN DE TOLEDO, MARTIN ANTONIO y JUAN DE

TOLEDO, y se libere a los dichos presos que son quatro Capitanes cuyos nombres son CONRADO BASTIEN, JUAN DE TOLEDO, MARTIN ANTONIO y JUAN DE

TOLEDO, y se libere a los dichos presos que son quatro Capitanes cuyos nombres son CONRADO BASTIEN, JUAN DE TOLEDO, MARTIN ANTONIO y JUAN DE

## LAMPIRAN II

### TERJEMAHAN SURAT PRINS MAURITS KEPADA SULTAN ACEH

Pada tahun 1598 berangkat, atas perintah beta, dua buah kapal dagang dari propinsi-propinsi ini untuk berdagang di Hindia Timur dan pada tanggal 15 Agustus tahun ini mereka telah pulang kembali. Pedagang-pedagang itu melaporkan kepada beta mengenai penerimaan yang baik atas perkenan Seri Paduka dan bukti keramahan yang telah mereka temui, ketika mereka sampai dalam kerajaan Seri Paduka. Di samping itu mereka mengisahkan kepada beta, bahwa mereka, berangkat kembali dalam suasana persahabatan, menjalankan perdagangan dengan segala kejujuran dan dengan kebulatan demikian, sebagaimana yang ditemui orang dalam watak dan kebiasaan bangsa kami.

Tetapi orang-orang Portugis, rakyat dari raja Spanyol dan musuh-musuh negeri kami, setelah mengetahui kapal-kapal tersebut di atas mendapat bantuan dan perlindungan dengan titah Seri Paduka, mereka telah pun berbohong kepada Seri Paduka, dan dengan dustanya mereka hendak mempersat Seri Paduka, dengan mengatakan bahwa pedagang-pedagang Belanda sebagai bajak-bajak laut, dan kedatangan mereka untuk merampas negeri dan merompak rakyat Seri Paduka; akibatnya Frederick de Houtman, pemimpin kapal-kapal tersebut di samping beberapa awak kapal, telah Seri Paduka titahkan untuk ditawan, hal mana telah menyedihkan hati beta.

Walaupun demikian, percaya akan sikap yang adil dan belas kasihan Seri Paduka, perkenankanlah beta mengharap sudi kiranya Seri Paduka menitahkan agar mereka diperlaku-

kan dengan baik, sebagaimana juga telah berlaku terhadap mereka yang telah kembali dari kerajaan Seri Paduka, pulang dengan penuh kebebasan; beta percaya bahwa kepada tawanan-tawanan tersebut, yang telah tinggal di sana akan mendapat perlakuan yang serupa.

Demikian juga mereka telah memberitahukan kepada beta mengenai peperangan Seri Paduka yang dilancarkan oleh Portugis terhadap kerajaan Seri Paduka atas perintah raja Spanyol, berusaha merampas kemerdekaan penduduk-penduduk dan menjadikannya sebagai budak, sebagaimana mereka telah berusaha melaksanakannya lebih dari tiga puluh tahun di negeri kami. Tetapi Tuhan yang Mahakuasa tidak mengizinkannya. Sebaliknya kami telah melawan dengan kekuatan senjata, seperti yang terus menerus sedang kami lakukan.

Oleh karena itu beta bermohon kepada Seri Paduka agar tidak melimpahkan kepercayaan kepada orang-orang Portugis itu; dan semoga Seri Paduka berkenan, sejak hari ini ke masa yang akan datang, berkenan tidak akan menaruh curiga kepada mereka yang datang dari negeri beta untuk berniaga dalam kerajaan Seri Paduka, maka beta telah men-tahkan dan memberi kuasa penuh kepada mereka yang membawa surat ini, yakni: kepada empat orang nakhoda, dengan nama Cornelis Bastidause, Jan Tonneman, Matthys Antonisse, dan Cornelis Adriaansz dan sebanyak itu pula utusan yang nama-namanya adalah: Gerard de Roij, Laurens Begger, Jan Jacobsz dan Nicolass van der Lee – yang berangkat lagi dengan empat kapal dan atas nama beta, berunding dengan Seri Paduka untuk dapat memberikan bantuan yang mungkin diperlukan oleh Seri Paduka.

Demikian pula beta telah menugaskan mereka, untuk mempersembahkan bingkisan ke hadapan Seri Paduka sesuai dengan adat kebiasaan negeri kami, sebagai tanda idam-idaman beta untuk mengulurkan tangan persahabatan ke

hadapan Seri Paduka. Beta mohon semoga Seri Paduka berkenan di hati menerimanya sebagaimana juga halnya beta mempersembhkannya.

Dan dengan ini beta berdoa kehadiran Tuhan yang Mahakuasa semoga Seri Paduka mendapat perlindungan Illahi dan bertambah luas kerajaan sesuai dengan harapan beta. Dari Den Haag di Holland pada 11 Desember tahun 1600.

Cium Tangan Seri Paduka  
dari perhamba

Maurice de Nassau

Diterjemahkan oleh:

T.Ibrahim Alfian, berdasarkan dari buku Wap, *Het Gezantschap van den Sultan van Achin A° 1602 aan Prins Maurits van Nassau en de oud Nederlandsche Republiek*. Rotterdam: H.Nijgh, 1862.

Disalin dari:

*Bahan-bahan Sejarah dalam Anjungan Aceh, Proyek Taman Mini Indonesia Indah*. Stensilan, Kantor Perwakilan Gubernur Daerah Istimewa Aceh di Jakarta, 1975.-



Tempat-tempat pendaratan pasukan Belanda yang pertama dan kedua di Aceh, masing-masing pada bulan April dan Desember 1873.

Sumber: Perang Kolonial Belanda di Aceh, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977.

## BUITENGEWOON NUMMER

DER

## JAVASCHE COURANT



OFFICIEEL NIEUWSBLAD

De prijs van inloopkoning op deze COURANT  
is f 125 - voor een jaar,  
f 12.50 voor een halfjaar.

De prijs der ABONNEMENTEN is 50 Cent voor  
elke vier maanden of daar beneden, buiten  
de expeditie en bezendingen.

DONDERDAG 3 APRIL

## NEDERLANDSCH-INDIË.

Batavia. — Van den Gouvernements Kommissaris voor *Afjeh*, den Vice-Président van den Raad van *Nederlandsch-Indië*, P. H. Niessen-Keizer, is, via *Fransje*, per telegram het bericht ontvangen, dat hij den 15ten Maart j. voor *Afjeh* is aangekomen en, na het inremsal toe aan den Sultan, onder voorhoeding der tegen hem bestuude prieren, ontrent zijn verdedelijk geding, te vergeefs opbeidering te hebben gevraagd, den 15ten te kort, bij het aangevend manifest, hem den eerlijk verhoord heeft.

De Kommissaris van het Gouvernement van *Nederlandsch-Indië* voor *Afjeh*:

Overzigtende:

dat op het Gouvernement van *Nederlandsch-Indië* de verplichting rust, om de algemeene belangen van handel en scheepvaart in den *Oost-Indischen archipel* tegen belemmeringen te bevalligen;

dat die belangen door de onderlinge geschillen en vijandschappen tussen der een der rijk van *Afjeh* onderhoorje staatje, waarvan welk het bij berking de bevrachting van het *Nederlandsch-Indië* Gouvernement hebben ingespannen, bij voorziedering zijn guchtaad;

dat de herhaalde verzoeken van de rijkje van dat Gouvernement, om een noodnigje te stand van einde te maken, en omne goed berevedigje verstandhouding van *Afjeh* het betrefte in het leven te brengen, steeds zijn afgewat op den wille en de verdelgen overrethilligheids van de bestuunders van *Afjeh* de raad en oede naar eisch te handhaven;

dat de jongere omange welke zijn beest, oed met verregaande trouwloosheid op een vijdelje, dat het *Nederlandsch-Indië* Gouvernement met de meest verwillende bevelingen zich in andere verhouding met *Afjeh* heeft gesteld;

dat de Sultan van *Afjeh*, doorwege onderdelijk om opbeidering gevraagd, naar op het manifest van Kommissaris van den 15ten Maart, en daarna bij dat van 24 daernaangevande, niet alleen geheel is gehele is gebleven, die te verschaffen, maar zelfs de tegen hem ingebrachte prieren niet heeft verwezen en daerbeneden er toe is overgegaan, zich toe in het ongeschikt mogelijk ten strijde toe te zetten, dat daaraan geen andere betrekking kan worden toegevoerd, dan dat *Afjeh* het Gouvernement van *Nederlandsch-Indië* onwillig heeft gehand, en zich op het daardoor ingespannen vijandsch standpunt vermaakt te handhaven;

dat de bestuunders van dat rijk zich daardoor hebben onschuldig gemaakt aan schennis van het tusschen betrefte en het *Nederlandsch-Indië* Gouvernement op den 15ten Maart 1872 gesloten traktaat van handel, vrede en vriendschap, en het misdaden overtuigd is gebleven, dat geen staat kan worden gemaakt op de goede trouw van die bestuunders; dat het der Regering van *Nederlandsch-Indië* onder deze omstandigheden niet langer mogelijk is, omne krachtadigje middelen, omzevel maar het algemeere handelsverkeer als de rijkje van hare eigen veiligheid in noordelijk *Suweste* grondverden staat van maken te verzoegen;

Verklaart mit kracht van de magt en bevoegdheid, aan hem door de Regering van *Nederlandsch-Indië* verleend, in naam van die Regering, den oorlog van den Sultan van *Afjeh*, van, na hij over geen bij dat misdaden mededeeling doet mit *Afjeh*, vint zelfs omge wargaan, en omne legelijk zandochig macht aan alle mogelijke daardoor voortvloeyende gevolgen en aan de verplichtingen, welke in verhouding op andere landen tussen van den Staat rusten.

Geleden aan hand van Zijner Majesteits staatsrecht *Orde* van *Lotepoes*, Hoge van *Siam-Afjeh*, op heden, Verandering den 15ten Maart 1873.

NIEUWENHUIJZEN.

BATAVIA, TER LANDSDRUKKERIJ

## LAMPIRAN V.

### KORTE VERKLARING ( MODEL UMUM ) +

#### SOERAT IQRAR

Bahwaninilah iqrar saja mengakoe tiga perkara yang terseboet dibawah ia itoe:

Fatsal jang pertama: bermoela iqrar saja bahwa sesoeng-goehnja. . . djadi soeatoe bahagian dari pada Hindia Nederland, maka ta'loeklah. . . itoeaka pada keradjaan Belanda, maka wadjiblah atas saja selama-lamanja bersetia kepada Baginda Sri Maharadja Belanda dan kepada Wakil Baginda, ia itoe Sri Padoeka jang dipertuan besar Goebernoer Djendral Hindia Nederland, maka oleh Sri Padoeka jang dipertoean besar Goevernoer Djendral dikoerniakan kepada saja djabatan pemerintahan didalam. . . .

Fatsal jang kedoea: bahwa mengakoelah dan berdjandjilah tiada akan membitjarakan soeatoe apa dari hal ichwal saja dengan Radja-Radja jang asing, melainkan moesoeh Baginda Sri Maharadja Belanda itoe moesoeh saja, begitoe djuga charbar Sri Maharadja Belanda itoe cahabat saja adanja.

#### VERKELARING

Ik ondergetoekende. . . Bestuurde van. . . verklaar:  
Ten eerste: dat het lands cap. . . . een gedeelte uitmaakt van Nederlandsch-Indie en derhalve staat onder deheeschappij van Nederland; dat ik mitsdien steeds getrouw zal zijn aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en aan zijne Excellentie den Gouverneur General als Hoogstder zelve vertegenwoordiger, uit wiens handen ik het bestuur over. . . aanvaard.

Ten tweede: dat ik mij in geenerlei staatkundige aan rakingen zal stellen met vreemde mogendheden, zullen de de vijanden van Nederland ook mijne vijaude, de vrienden van Nederland ook mijne zijn.

## LAMPIRAN VI

### VERKLARING ( MODEL ACEH )

Ik ondergeteekende. . . . .  
hoofd van het landschap. . . . . verklar:

Ten eerste: dat het landschap . . . . . een gedeelte uitmaakt van Nederlandsch-Indie en gevolgelyk staat onder de heerschappij van Nederland; dat ik mitsdien steedsgetrouw zal zijn aan Hare Majestiet de Koningin der Nederlanden en aan zijn Excellentie, den Gouverneur-General als Hoogstderzelver vertegen woordinger, uit wiens handen ik het bestuur over het landschap. . . . . aanvaard.

Ten tweede: dat ik mij in geenerlei staatkundige aanrakingen zal stellen met vreemde mogendheden, zullende de vijanden van Nederland ook mijne vijanden, de vrienden van Nederland ook mijne vrienden zijn.

Ten derde: dat ik zal nakomen en handaaven alle regelingen, die met betrekking tot het landschap. . . . . door of namens den Gouverneur . . . . . zijn of Resident

zullen worden getroffen en dat ik in het algemeen alle bevelen zal opvolgen, die mij door of namens den Gouverneur Resident van. . . . . of den. . . . . den maand. . . . . van het Mohamadaansche jaar. . . . . en opgemaakt in driefvoud.

De Controleur ,  
Gezaghebber

Sumber: Muhammad Ibrahim, et.al., Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh; Dep. P dan K, 1978/1979).

## LAMPIRAN VII.

Petikan Pernyataan Perang yang dikutip dari Javasche courant nomor penerbitan istimewa tanggal 3 April 1873

### KOMISARIS PEMERINTAH HINDIA BELANDA UNTUK ACEH

Menimbang:

dsb. dsb. :

Berdasarkan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka dengan ini, atas nama Pemerintah tersebut:

#### MENYATAKAN PERANG

Kepada

Sultan Aceh

dan pernyataan ini lebih lanjut memberitahukan pula kepada setiap orang yang bersangkutan serta memperingatkan kepada setiap orang akan segala akibat yang mungkin ditimbulkan olehnya serta kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada setiap warga negara di dalam masa peperangan.

Termaktup di kapal uap Sri Baginda Raja "Citadel van Antwerpen" yang berlabuh di perairan Aceh Besar, pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Maret 1873.

ttd. NIEUWENHUYZEN.

Sumber: Perang Kolonial Belanda di Aceh, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977.



## PROCLAMATIE

De Gouverneur-Generaal van **Nederlandsch-Indie**,  
 Opperbeveelhebber der land- en zeemagt van Zijne Majesteit  
 den Koning der **Nederlanden** beoosten de Kaap de Goede  
 Hoop.

Brengt ter kennisse van een iegelijk wien zulks mogt  
 aangaan, dat, naar aanleiding van den toestand van oorlog,  
 waarin het Gouvernement van **Nederlandsch-Indie** met het  
 rijk van **Atjeh** verkeert, de havens en landingsplaatsen,  
 kusten, rivieren, baaijen en kreeken van gengemd rijk en  
 zijne onderhoorigheden worden verklaard te zijn **in staat van**  
**blokkade**, met al de gevolgen daaraan verbonden, en dat  
 met de uitvoering van dezen maatregel is belast de  
 Kommandant der in de wateren van **Atjeh** gestationeerde  
 Zeemagt.

Gedaan te **Buitenzorg**, den 4 Junij 1873.

**LOUDON.**

---

BATAVIA, TER LANDSDRUKKERIJ

Pengumuman berupa "Proklamasi" yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Bogor pada tanggal 4 Juni 1873 yang menyatakan bahwa oleh karena Pemerintah Hindia Belanda berada dalam keadaan perang dengan kerajaan Aceh, maka seluruh pantai, pelabuhan, teluk dan tempat-tempat yang memungkinkan pendaratan di Wilayah Aceh berada dalam keadaan blokade.

## LAMPIRAN IX.

### Dagorder bij de terugkomst der eerste expeditie.

*Aan de zee- en landmacht, die deel heeft genomen  
aan den oorlog tegen Atjeh.*

Toen ik U van hier zag gaan, om tegen Atjeh den oorlog te voeren, was ik met U een van verlangende, dat Gij niet zoudt wederkeeren dan na eene volkomene overwinning behaald te hebben.

Zoodra ik bericht bekwam dat Uw bevelhebber, de generaal Kohler, gesneveld was en dat Uwe strijdkrachten aanvulling behoefden, heb ik den generaal Verspijck tot Uwen chef benoemd en bevelen gegeven om Uwe krijgsmacht onverwijd te versterken.

Nanwelijks bad ik deze maatregelen getroffen, of de regeerings-commissaris voor de Atjehsche aangelegenheden vroeg mij machtiging om U te doen terugkeeren. Hij grondde zijn verzoek op het oordeel van Uwen tijdelijk opgetreden bevelhebber, van den commandant Uwer zeemacht en van Uwen chef van den staf, die allen eenparig de voortzetting van den oorlog onraadzaam verklaarden en op Uwe terugroeping aandrongen, onder anderen als reden aanvoerende, dat de westmoesson te Atjeh inviel, die alle gemeenschap tusschen den wal en de reede dreigde te verbreken.

Dee oorlog op's vijands grondgebied, zonder verzekerde communicatie met Uwe operatiebasis, de reede was onmogelijk. Ik heb U dus moeten terugroepen.

Indien wij nu ons gemeenschappelijk verlangen niet mogen bevredigd zien, dan is dit enkel, omdat wij hebben moeten toegeven aan de eischen der natuur:

Gij keert roemrijk weder. Gij hebt in weinige dagen, den overmachtigen en sterk verschansten vijand groot ontzag ingeboezemd, Zoo groot zelfs, dat hij zich, in al de dagen die Gij, in afwachting van uwe wederinscheping, op Uw strandbivak hebt doorgebracht; niet eens meer buiten zijne versterkingen heeft durven wagen.

Gij hebt Uw plicht gedaan. Weest welkom in ons midden.

Terwijl onze wakkere vloot op de vijandelijke kust blijft kruisen, zal ik U zoodra mogelijk de gelegenheid geven, Uwe taak te gaan hervateen en glansrijk te beeindigen.

Buitenzorg, Mei 1873.

*De Gouverneur-Generaal, Opperbevelhebber van de land-en zeemacht beoosten de Kaap de Goede Hoop,*

LOUDON.

Sumber: Perang Kolonial Belanda di Aceh, Banda Aceh; Pusat dan Informasi Aceh, 1977.

## LAMPIRAN X.

Perintah harian yang dikeluarkan pada waktu pasukan pendaratan Belanda yang pertama tiba kembali di Batavia (Jakarta) dalam bulan Mei 1873.

K e p a d a :

Para Anggota Angkatan Laut dan Darat yang turut serta dalam peperangan melawan Aceh.

Sewaktu saya melihat Anda berangkat dari sini dengan dibebani tugas untuk berperang melawan Aceh, Anda dan saya berkeinginan bahwa Anda tidak akan kembali kecuali setelah memperoleh kemenangan yang sempurna.

Ketika saya menerima kabar bahwa Panglima Anda, Jenderal Kohler, tewas dan Anda memerlukan tambahan tenaga juang, saya mengangkat Jenderal Verspijck menjadi Kepala Staf serta memerintahkan kepadanya agar ia segera memperkuat kesatuan Anda.

Sementara saya mengadakan persiapan-persiapan, Komisaris Pemerintah Urusan Aceh meminta kepada saya agar Anda diperintahkan untuk kembali. Permohonan beliau didasarkan atas keputusan bulat para Pejabat Panglima, Komandan Angkatan Laut dan Kepala Staf Anda, yang beranggapan bahwa adalah tidak bijaksana lagi melanjutkan pertempuran, dan karenanya mereka mendesak agar Anda dipanggil kembali dengan mengemukakan alasan, antara lain, bahwa musim penghujan sudah tiba dan menghambat hubungan antara daratan dengan tempat-tempat kapal berlabuh.

Adalah tidak mungkin sama sekali bertempur di daerah lawan tanpa adanya hubungan yang terjamin baik dengan pangkalan-pangkalan operasi Anda, yaitu tempat-tempat kapal berlabuh. Dan itu pulalah yang mendorong saya memanggil Anda kembali.

Dengan demikian apabila maksud kita bersama itu kini tidak dapat terwujud dengan baik, maka satu-satunya hambatan adalah bahwa kita harus menyerah kepada ketentuan-ketentuan alam sendiri.

Anda kembali dengan penuh kejayaan. Dalam beberapa hari saja Anda berhasil menimbulkan kekaguman pada pihak lawan yang sangat tangguh dan kuat pertahanannya melawan kegigihan Anda bertempur.

Kekaguman mereka kepada Anda yang demikian itu menyebabkan mereka tidak berani ke luar dari kubu-kubu pertahanan mereka selama Anda berada di bivak-bivak di pantai pada saat menanti keberangkatan kembali.

Anda telah melaksanakan tugas-tugas Anda dengan sebaik-baiknya. Saya mengucapkan "Selamat datang di tengah-tengah kami semua."

Selagi Armada kita yang perkasa itu melayari pantai-pantai lawan, saya akan memberi kesempatan, kepada Anda apabila kemungkinan terbuka lagi bagi Anda, untuk meneruskan kembali tugas-tugas Anda serta dapat mengakhirinya dengan hasil yang gilang-gemilang.

BOGOR, bulan Mei 1873

Gubernur Jenderal, Panglima Tertinggi  
Angkatan Laut dan Darat Wilayah Timur  
Tanjung Harapan

L O U D O N

Sumber: Perang Kolonial Belanda di Aceh, Banda Aceh, Pusat Dokumen dan Informasi Aceh, 1977.

## LAMPIRAN XI

### PERANG DAN BENCANA

Semangat jihat para pejuang Aceh tak pernah padam, Pada saat bala tentara Jepang menyerang dan menduduki seluruh kepulauan Hindia Belanda, pejuang-pejuang Aceh dibawah pimpinan Teuku Panglima Polem Muhammad Ali, Panglima Sagi XXII dan Teuku Nya' Arif, Panglima Sagi XXVI Mukim masih melakukan pertempuran di daerah Aceh Besar masing-masing pada tanggal 23/24 Februari 1942 dan 11/12 Maret 1942 yang mengakibatkan antara lain tewasnya Controleur J.C.Tiggelman. (Dr. A.J. Piekaar, Atjeh en de Oorlog met Japan, p. 63).

Peperangan kolonial yang dimulai sejak tanggal 6 April 1873 sampai dengan tahun 1914 saja, menurut data pihak Belanda sendiri (Paul van't Veer, De Atjeh-Oorlog, p.211, 311) telah menimbulkan korban sebagai berikut:

- a. pada pihak Belanda tewas 37.500 orang
- b. pada pihak orang Aceh 70.000 orang

atau pada kedua belah pihak berjumlah tidak kurang dari 100.000 orang ditambah lagi dengan yang luka-luka sejumlah 500.000 orang.

Dalam peperangan yang terlama dan terdahsyat ini, kedua belah pihak telah sama-sama menampilkan prajurit-prajuritnya yang tangguh, gagah berani berjuang atas dasar keyakinan masing-masing.

Semangat juang mereka ini tercatat sepanjang masa dalam sejarah peperangan Belanda di Aceh.

Sumber: Perang Kolonial Belanda di Aceh, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977.-

## LAMPIRAN XII

### BEBERAPA PENDAPAT MENGENAI PERANG KOLONIAL BELANDA DI ACEH

1. Daarom zal de Atjeh-oorlog Steeds een leerschool blijven voor ons leger, en achtte ik het nutting het derde en laatste deel dezer krijgsgeschiedenis in zijn geheel aan de behandeling daarvan te wijden.  
(Oleh karenanya perang Belanda di Aceh selalu akan menjadi sumber pelajaran bagi tentara kita dan oleh sebab itu pulalah saya menganggap tepat sekali, jilid ketiga dan terakhir mengenai sejarah peperangan (di Hindia Belanda) itu seluruhnya saya peruntukkan buat menjelaskan peperangan di Aceh).

G.B.Hooyer, De Krijgsgeschiedenis van Nederlandsch-Indie van 1811 tot 1894, III, p.5. (1897).

2. De waarheid is: dat de Atjehers, mannen en vrouwen, in het algemeen schitteren hebben gevochten voor wat zij zagen als hun nationaal of religieus ideaal. Er is onder die strijders een zeer groot aantal mannen en vrouwen die de trots van elks volk zouden uitmaken; zij deen de schitterendste van onze oorlogsfiguren niet onder. (Yang sebenarnya ialah bahwa orang-orang Aceh, baik pria maupun wanita, pada umumnya berjuang dengan gigih sekali untuk sesuatu yang mereka pandang sebagai kepentingan nasional, atau agama mereka, Di antara pejuang-pejuang itu terdapat banyak sekali pria dan wanita yang menjadi kebanggaan setiap bangsa; mereka itu tidak kalah gagahnya daripada tokoh-tokoh perang terkenal kita).

H.C.Zentgraaff, Atjeh, p.1.

3. Toch zal men van al onze aanvoerdens in de oorlogen, gevoerd in alle hoeken en gaten van dezen Archipel, hooren dat er geen krijgshaftiger en fanatieker volk is dan het Atjehsche, en dat de vrouwen van dit, volk andree overtreffen in noed en doosverachting.

(Namun dari semua pemimpin peperangan kita yang pernah bertempur di setiap pelosok kepulauan kita ini kita mendengar bahwa kita ada satu bangsa yang begitu gagah berani dan fanatik dalam peperangan kecuali bangsa Aceh; wanita-wanitanya pun mempunyai keberanian dan kerelaan berkorban melebihi wanita-wanita lain).

H.C. Zengraaff, Atjeh, P.63.

4. Dit was het einde van Teuengkoe di Barat, en van de anders voorname oelama's in die streek, die "sjahid" verkozen boven "mel". . . . en is er een volk op deze aarde, dat de ondergang dezer hereieke figuren niet met diepe verering zou schrijven in het boek zijner historie? (Dengan demikian berakhirlah kehidupan Teungku di Barat dan Ulama-ulama termasyhur lainnya di daerah itu yang lebih menyukai "mati syahid" daripada "melaporkannya diri" (menyerah kalau pada lawan). . . . dan adakah satu bangsa di permukaan bumi ini yang tidak akan menulis di dalam buku-buku sejarahnya mengenai gugurnya tokoh-tokoh heroik dengan penghargaan yang tertinggi-tingginya?).

H.C. Zengraaff, Atjeh, p.100.

5. De heldhaftigheid van der Atjeher, welke hij gedurende den Atjeh-oorlog aan den dag legde bij den strijd zijn om vrijheid en om zijn tevens hun bewondering voor zijn moed, doodsverachting, zelfopoffering en uithou-

dingsvermogen. Onuitputtelijk was de Atjeher in het bedenken en toepassen van origineele krijgs listen en scherp was zijn opmerkingsvermogen. De brigades werden nauwkeurig door hem gedegeslagen; hij wist precies welke brigade commandant slordig patrouilleerde en welke brigade steeds paraat en opgesloten marcheerde.

(Kepahlawanan orang Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan dan bumi persadanya, seperti yang dipergunakan selama perang Belanda di Aceh menimbulkan rasa hormat pada pihak marsose serta kekagumannya akan keberanian, kerelaan gugur di medan juang, pengorbanannya dan daya tahannya yang tinggi, Orang Aceh tidak habis-habis akal nya dalam menciptakan dan melaksanakan siasat perang yang murni asli, sementara daya pengamatan sangat tajam. Ia mengamati dengan cermat setiap gerak-gerik pemimpin brigade, dan tahu benar pemimpin-pemimpin brigade mana yang melakukan patroli dengan ceroboh serta mana pula yang selalu siap siaga dan berbaris secara teratur).

A,Doup, Gedenkboek van het Korps Marechaussee 1890 – 1940, p.248.

6. De Atjeh-oorlog was in 1913 of 1914 niet geëindigd. Van 1914 loopt een rode draad naar 1942, een spoor van moord en doodslag, van onder gronds en bovengronds verzet, dat van 1925 tot 1927 en weer in 1933 tot lokale opstanden van flinke omvang leidde. De tiental len Atjeh-moorden in de tussenliggende jaren waren in heel Nederl. Indie bekend. Het lijkt achteraf voor de hand te liggen deze van draad van 1914 naar 1942 door te trekken en zou de geschiedenis van 1873 tot 1942-het jaar waarin de Nederlanders definitief uit Atjeh verdwenen te beschouwen als een grote Atjeh-oorlog, of liever als

een opeenvolging van vier of vijf Atjeh-oorlogen van verschillend karakter.

(Perang Belanda di Aceh tidak berakhir tahun 1913 atau 1914. terentang seutas benang merah ke tahun 1942, sebuah jejak pembunuhan dan pemukulan sampai mati, dari perlawanan di bawah sampai ke atas tanah yang menyebar luas sedemikian rupa dari tahun-tahun 1925 sampai tahun 1927 dan kemudian lagi dalam tahun 1933 sehingga terjelmalah pemberontakan-pemberontakan setempat. Puluhan "pembunuhan Aceh" yang terjadi di antara tahun-tahun itu cukup diketahui di seluruh Hindia Belanda. Pada masa-masa belakangan ini disadari bahwa benang merah itu menjurus dari tahun 1914 ke tahun 1942 sehingga sejarahnya sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1942, yakni saat orang-orang Belanda meninggalkan daerah Aceh untuk selama-lamanya, harus dianggap sebagai sebuah perang Belanda yang besar di Aceh atau boleh juga disebut sebagai sebuah deret, terdiri dari empat atau lima buah peperangan Belanda di Aceh yang berbagai-bagai sifatnya.)

Paul van't Veer, De Atjeh-oorlog, p.293(1969).

7. Atjeh was het laatst onder Nederlands bestuur gebracht. Het was er het eerst ojder vandenn. De terugtoch van 1942 was het einde. Nederland had 69 jaar haast onafgebroken in Atjeh gevochten en het was genoeg geweest.

(Atjeh adalah daerah terakhir ditaklukkan oleh Belanda dan merupakan daerah pertama terlepas dari kekuasaannya. Kepergian Belanda dari sana pada tahun 1942 adalah saat terakhir ia berada di bumi Aceh. Selama 69 tahun, Belanda tak henti-hentinya bertempur di Aceh

dan ini sudah lebih dari pada cukup.).

Paul van't Veer, *De Atjeh-oorlog*, p.301(1969).

8. For centuries the Atjehnese had proved their ability in commerce and agriculture, as well as in war. And during the first years of is struggle with Holland Ajeh showed itself worthy of the considerable sympathy it optained from Europeans as well as Muslims in many parts of the world. It also contributed, despite itself, to the growth of wider loyalties in Indonesia.

(Selama berabad-abad, orang-orang Aceh telah membuktikan kesanggupan mereka baik dalam bidang pertanian perdagangan maupun dalam bidang peperangan. Selama tahun-tahun pertama perjuangan mereka melawan Belanda di Aceh, mereka telah membuktikan bahwa mereka layak memperoleh perhatian yang besar dari orang-orang Eropah dan kaum muslimin di dunia. Dalam hubungan ini, orang-orang Aceh juga telah memberikan sumbangan kepada perkembangan kesetiaan yang lebih besar di daerah-daerah lain kepada Indonesia).

A.Reid, *The Contest for North Sumatra*, p. 288-9(1969).

- 9 De Atjehers bleken niet allen fanatieke vechters te zijn, maar ook uitetekende vestingbeuwers.

(Orang-orang Atjeh ternyata bukan saja pejuang-pejuang yang fanatik, akan tetapi mereka tergolong pembangun kubu-kubu pertahanan yang ulung sekali.

Pierre Heijboer, *Klaniboes, Klewang, Klapperbomen*, p. 137 (1977).

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### I. Sumber-Sumber Arsip.

- A. Laporan-laporan dan surat-surat pejabat resmi Belanda yang disimpan di Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh, Banda Aceh dan di Arsip Nasional jalan Gadjah Mada Jakarta, dan di Museum Pusat, Jakarta.

Swart, H.N.A., Memorie van Overgave, van Gouverneur van Atjeh een Onderhoorigheden, 30 Augustus 1918. *Mailr.* 2398/18.

Goedhart, O.M., Memorie van Overgave, van Gouvernuer van Atjeh en Onderhoorigheden, 30 Mei 1928. *Mailr.* 2544/29.

Philips, A.H., Memoire van Overgave, van Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden, 31 Mei 1932. *Mailr.* 1624/32.

Aken, A.Ph., Memorie van Overgave, Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden, Februari 1936. *Mailr.* 504/36.

- B. Koleksi R.A. Kern yang disimpan di Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde, Leiden negeri Belanda.

Stukken van de adviseur voor Oosterse Talen en Mohammedaans Recht C. Snouck Hurgronje, 1891 – 1908, betreffende de religieuspolieke toestanden in Atjeh. No.410.

Stukken betreffende de Atjeh-moorden te Koeta Tjane, afdeling Alas-landen, 1921. (H. 797, 158, 159), No.414.

- C. Dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang telah diterbitkan.

*Koloniale Verslagen*, 1873 – 1913.

*Officeele Bescheiden betreffende het Onstaan van den oorlog tegen Atjeh in 1873*. Algemene Landsdrukkerij, 1881.

*Oorlog met Atjeh. Verslag van het Verhandelingen der Tweede Kamer in Comite-Generaal van 16, 17, 18 en 19 April 1874*. Algemeene Landsdrukkerij, 1881.

## II. Majalah Dan Surat Kabar

*Atjeh Sinbun*, Th. IV, 15 – II – 2605.

*Atjeh, "Publicatie"*, No. 23 Th. 1937.

*De Deli Courant*, Medan 1932 – 1934.

*De Java Bode*, Batavia, 1932 – 1933.

*De Telegraaf*, Amsterdam, 1939.

*Minami*, Nomor Khusus Atjeh.

## III. Buku-Buku Dan Artikel-Artikel

Abdul Muhtablib, Muhammad. *Riwayat Prang Pandrah Masa Djiduk Djepang, Kutaradja: Maktabah Atjeh Raja*, 1960.

Alfian, T.Ibrahim. "Emas Kafir dan Maut", *Nusantara* No. 2, Kuala Lumpur: Juli 1972.

-----, "Perang Di Jalan Allah, Aceh 1873 – 1912". Ph.D. Thesis yang belum diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1981.

-----, "Sedjarah Singkat Perang di Atjeh" dalam A.Sartono Kartodirdjo (ed). *Sedjarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme* Djakarta: Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sedjarah ABRI, 1973.

----- . "Wajah Rakyat Aceh Dalam Lintasan Sejarah", Dewan Bahasa, jilid XVI, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1972.

Alibasyah Talsya, T. *Sedjarah dan Dokumen-Dokumen Pemberontakan di Atjeh*, Djakarta: Kesuma, tanpa angka tahun.

Ali Hasjjmy. *Hikajat Prang Sabi Mendjiwai Perang Atjeh Lawan Belanda*, Banda Atjeh: Pustaka Faraby, 1971.

Amin, S.M. *Kenang-Kenangan Dari Masa Lampau*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

----- . *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*. Djakarta: N.V. Soeroengan, tanpa angka tahun.

Bannink, J.C.A. "De Veroveriang en Pacificatie van Atjeh Vergeleken met de Geschiedenis Van Britsch-Birma", I.G. 35, I (1913), hal. 145 – 308.

Benda, Harry J. *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980. Terjemahan oleh Daniel Dhakidae.

Biro Sejarah PRIMA, Medan Area Mengisi Proklamasi, jilid I, Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, 1976.

Boxer, C.R. "A Note on Portuguese to Revival of the Red Sea Spice Trade and The Rise of Acheh 1540 – 1600", *International Conference on Asian History*, paper No.2, 5 – 11 th. August 1968, Kuala Lumpur: University of Malaya, 1968.

Breeshoeft, P. *Geschieadenis van den Atjeh-Oorlog, 1873 – 1886*. Utrecht: P.B. van Ditmar, 1886.

- Brouwer, W. *Karel van der Heijden*. Amsterdam: L.J. Veen, 1900.
- Carmejelo, P.J. *Atjeh*. Groningen: J.B. Wolters, 1931.
- Cowan, H.K.J. *De Hikajat Malem Dagang*. 's-Gravenhage: Uitgegeven Door Het Koninklijk Instituut voor de Taal- Land-, en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, 1937.
- Dam, Pieter van, *Beschrijvingen van de Oost-Indische Compagnie I*, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931.
- Damste, H.T. "Atjeh-Historie", *KT V*, (1916), hal. 318 – 339; hal. 449 – 468 dan hal. 609 – 627.
- , "Hikajit Prang Sabi", *BKI 84*, (1928).
- Darsiti, Soeratman. *Sedjarah Afrika Zaman Imperialisme Moderen*, Yogyakarta: Vita, 1965.
- Das Gupta, Arun Kumar, "Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600 – 1641", Unpublished Ph.D. Thesis Cornell University, 1962.
- Dharmono Hardjowidjono, "Benarkah Orang-Orang Portugis Melantjarkan Perang Agama Terhadap Umat Islam Selama Kehadiran Mereka di Indonesia?", *Seminar Sedjarah Nasional ke II*, P. III/34, Yogyakarta: 26 – 29 Agustus 1970.
- Djajadiningrat, R.A. Hoesein. "Critish Overzicht van de in Maleische Werken Vervatte Gegevens over de Geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh," *BKI 65* (1911), hal. 135 – 265.
- Doup, A. *Gedenkboek van het Korps Marechaussee van Atjeh en Onderhoorigheden*, Medan: tanpa angka tahun.
- Du Croo, M.H. dan H.J. Schmidt, *Generaal Swart Pacificator van Atjeh*, Maastricht: Uitgave N.V. Leiter Nypels, 1943.

- Geconcentreerde Stelling in Greet-Atjeh.* 's-Gravenhage: De Gebroeders van Cleef, 1885.
- Gerlach, A.J.A. *Atjin en de Atjinezen*, Overdruk uit "de Tijdspeigel," Arnhem: D.A. Thieme, 1873.
- dspeigel," Arnhem: D.A. Theime, 1873.
- Gibson Hill, C.A. "On The Alleged Death of Sultan Aualudi of Djohor at Atjeh in 1613", *JMBRAS*, Vol. XXIX Part I, 1956.
- Gibson Hill, C.A. "Raffles, Aceh and the Order of The Golden Sword", *JMBRAS*, Vol. XXIX, Part I, 1956.
- Hall, D.G.E. *A History of South East Asia*, London: Macmillan & Co Ltd., 1960.
- Harrison, Brian. *South-East Asia A Short History*, London: Macmillan & Co. Ltd., 1957.
- Hasjmy, Ali dan Alibasyah Talsya T. *Hari-Hari Pertama Revolusi 45 Di Daerah Modal*, Banda Aceh: Kanwil Dept. P dan K Daerah Istimewa Aceh, 1976.
- Hazil, *Teuku Umar dan Tjut Nja' Din, Sepasang Pahlawan Perang Atjeh*, Djakarta: Djambatan, 1955.
- Ismail Jacob. "Riwayat Gema Proklamasi di Aceh," *Warta Pendidikan Dan Kebudayaan* No.7, Banda Aceh: Perwakilan Dept. P dan K Prof. Daerah Istimewa Aceh, 1971.
- Iskandar, Teuku. "De Hikajat Atjeh", *VKI* 26, 1958.
- (ed.) *Bustanus Salatin*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1966.
- Jacobs, Julius. *Het Familie en Kampongleven op Groot Atjeh* Leiden: E.J. Brill, 1894.
- Jakub, Ismail. *Teungku Tjhik di Tiro (Muhammad Saman) Pahlawan Besar Dalam Perang Atjeh 1881 - 1891*, Djakarta: Bulan Bintang, 1960.

- Joenoës Djamil, *M, Riwayat Barisan "F"* (Fujiwara Kikan), Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh, 1975.
- Joesoef, Hoesin, "Sedjarah Perdjuangan Pemuda di Daerah Atjeh," *Warta Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 7, Banda Aceh: Perwakilan Dept. P dan K Prof. Daerah Istimewa Aceh, 1971.
- Jonge, J.K.J. *De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie II-III*, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1864.
- Jongejans, J. *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*, Baarn: Hollandia Drukkerij, 1939.
- Juynboll, Th. W. "Atjeh", *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. I, 1960.
- Kielstra, E.B. *Beschrijving van den Atjeh-Oorlog*, tiga jilid, 's-Gravenhage: De Gebroeders van Cleef 1885.
- Kielstra, E.B. *De Vestiging van het Nederlandsch Gezag in den Indischen Archipel*, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1920.
- Klerk, E.S. de. *De Atjeh Oorlog. Het Onstataan van den Oorlog*, jilid I, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1912.
- Kreemer, J. *Atjeh* dua jilid, Leiden: E.J. Brill, 1922-3.
- Koreskamp, H. *De Westkust en Minangkabau 1665 - 1668*, Utrecht: Schotanus & Jens, 1931.
- Kruijt, J.A. *Atjeh en de Atjehers*, Leiden: Geralth Kolff, 1877.
- . *De Atjeh Oorlog: Kort Overzicht van Oorsprong Verloopen Gevolg*, 's-Gravenhage: Loman & Funke, 1896.
- Kruisheer, A. *Atjeh 1896*, dua jilid, Weltevreden: N.V. Boekhandel Visser, 1913.
- Lamster, J.C. *J.B. van Heutsz*, Amsterdam: J.H. De Bussy, 1886.

- Langhout, J. *Vijftig Jaren Economische Staatskunde in Atjeh*, Geschreven naar Aanleiding van de Herinneringsdata 26 Maret 1873 – 26 Maart 1923, Den Haag: N.V. Boekhandel W.P. van Stockum & Zoon, 1923.
- Lekkerkerker, *Land en Volk van Sumatra*, Leiden: E.J. Brill, 1916.
- Leupe, P.A. "1" *The Siege and Capture of Malacca from the Portuguese in 1640 – 1641*" (Translated by Mac. Hacobian), *JMBRAS*, Vol. XIV, Part. I, January, 1936.
- Meuraxa, Dada. *Perjuangan Rakyat di Atjeh*, Medan: Megabook Store, tanpa angka tahun.
- Maaten, K. van der. *Snouck Hurgronje di Atjeh, Oorlog*, dua jilid, Leiden: Oostersch Instituut, 1948.
- . *De Indische Oorlogen*, dua jilid, Haarlem: De Ervenloosje, 1896.
- Macgregor, I.A. "A Portuguese Sea Fight Near of Singapore" *JMBRAS*, Vol. XXIX, Part 3, 1957.
- Mochtar, J. Hasbi, dan Fauzi Hasbi, *Perang Bayu*, Medan: Seminar Pujangga Aceh, 1976.
- Mohammad Said. *Atjeh Sepandjang Abad*, Medan: diterbitkan oleh pengarang sendiri, 1961.
- Muhammad Ibrahim (Ketua tim Peneliti). *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Dep. P dan K Pusat Penelitian Sejarah Budaya, Proyek Penelitian Dan Pendataan Kebudayaan Daerah, 1977/1978.
- . *Sejarah Kebangkitan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Dep. P dan K Pusat Penelitian Sejarah Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1978/1979.
- . *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Dep. P dan K Pusat Penelitian Sejarah Budaya, Proyek Inventarisasi Dan Do-

- kumentasi Kebudayaan Daerah, 1979&1980. Nasution Notosusanto, Sedjarah Dan Hankam, Djakarta: Departemen Pertahanan Keamanan, Lembaga Sedjarah Hankam, 1968.
- , *Tentara Peta pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1979.
- Pabst, J.C. *Overzicht van de Krijgsverrichtingen in de Pidie-Streek in 1897 – en 1898, Bewerkt door A.A.A.G. taire Academie*, 1924.
- , *Overzicht van de Krijgsverrichtingen in Groot Atjeh van 1873 tot 1899*. Bewerkkt door A.A.A.G. Feuilleton de Bruijn, Breda : De Koninklijke Militaire Academie, 1924.
- Pante Kulu, Teungku. *Hikajat Perang Sabi di Atjeh*, terjemahan dari bahasa Atjeh oleh Dada Meraxa dan Nurdin Jahja, Djakarta: Balai Pustaka, 1958.
- Philips, W.J. *Penjoeratan Pekerdjaan Perang di Negeri, Atjeh*, Semarang: tanpa nama penerbit, 1889.
- Piekaar, A.J. *Atjeh en de Oorlog met Japan*, 's-Gravenhage; Bandung: W. Van Hoeve, 1949.
- Polim, *Teuku Muhammad Ali Panglima Polim*, Memoir (catatan) Teuku Muhammad Ali Panglima Polem, Kutardja: Alhamra, 1972.
- Reid, Anthony *The Blood of The People: Revolution and The End of traditional Rule in Northern Sumatra*, Kuala Lumpur: Oxford University Press 1979. *The Contest for North Sumatra: Aceh The Netherlands and Britain 1858 – 1898*, Kuala Lumpur, Singapore: Oxford University Press, 1969.
- Ryan, N.J. *Sejarah Semenanjung Tanah Melayu*, Kuala Lumpur: Oxford University Preess, 1966.

- Rochemont, J.J. de Loudon en Atsjin, Batavia: Ernst & Co., 1875.
- . *Onze Vestiging in het Rijk van Atsjin*, Haarlem: H.M. van Dorp, 1876.
- Sabi Ubit, T. "Rakyat Yang Berjiwa Patriotik Melawan Penjajahan Fasisme Jepang", *Berita Buana*, Jakarta: Kemis 22 - 23 Mei 1977.
- Sartono Kartodirdjo, (ed). *Sejarah Nasional Indonesia V - VI* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- . "Religious and Economic Aspects of Portuguese-Indonesian Relation", *Separata de STVDIA* Revista Quadrimestral, No.29, Lisboa, April 1970.
- Schoemaker, J.P. *Schetsen uit den Atjeh-Oorlog*, 's-Gravenhage: W.P. van Stockum & Zoon, 1888.
- Schrieke, B., Indonesian Sociological, studies, Bandung, van Hoeve Ltd., The Hague, 1955.
- Sejarah Pertempuran Cot Plieng Bayu, Lheuee Simpang Pandrah Melawan Fasisme Jepang*, Kabin Kebudayaan Departemen P dan K, Kabupaten Aceh Utara.
- Sjamaun Gaharu. *Beberapa Catatan Tentang Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan di Aceh*, Prasaran pada Seminar Pujangga Aceh, Medan: Panitia Seminar Pujangga Aceh, 1976.
- Siegel, James. *The Rope of God*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969.
- . *Shadow and Sound: The Historical Thought of a Sumatra People*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1979.
- Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, dua jilid, Batavia: Landsdrukkerij, 1894.
- Somer, J.M. *De Korte Verklaring*, Breda: Corona, 1934.

Struyvenberg, A. *Het Korps Marechaussee, 1890 – 1930*,  
Kutaradja: tanpa nama penerbit, 1930.

Swieten, J.van. *De Waarheid over Onze vestiging in Atjeh*,  
Zalt-Bommel: Jon. Noman & Zoon, 1879.

----- . *Open Brief van Generaal van Swieten aan Gene-  
raal P.G. Boom, Rotterdam: Nijgh & van Ditmer*,  
1879.

Szekely Lulofs, M.H. *Tjoet Nya' Din: De Geschiedenis van  
een Atjehsche Vorstin, Amsterdam: Mossult's Uitge-  
verij, 1948.*

× Taufik Abdullah, *Sejarawan Dan Kesadaran Sejarah*, Jakar-  
ta: Lembaga Ekonomi Dan Kemasyarakatan Nasional,  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1974.

× ----- . "Aspek Historis Kulturil Perjuangan Bangsa", *Bul-  
letin Yaperna* No.5, Jakarta: Yayasan Perpustakaan  
Nasional, Pebruari 1975.

Tiele, P.A. "*De Europeers in de Malaische Archipel*", *BKI* 29  
(1881), 35 (1886), 36 (1887) dan 37 (1888).

----- . "*Frederick de Houtman in Atjeh*", *Indische Gids*  
(1881), hal. 146 – 152.

Valentijn, *Oud en Nieuw Oost-Indie I*, Amsterdam: Wed.  
J.C. Kesteren & Zoon, 1862.

Veer, Paul van 't. *De Atjeh Oorlog*, Amsterdam: Uitgeverij De  
Arbeiderspers, 1969. Terjemahan Aboe Bakar Bsf.

Veltman, T.J. "Nota Over de Geschiedenis van het Landschap  
Pidie," *TBG* 58 (1919), hal. 15 – 157.

Veth, P.J. *Atchin en Zijne Betrokkingen tot Nederland*, Lei-  
den: Geralth Kolff, 1887.

Vlekke, H.M. Bernard. *Nusantara A History of Indonesia*, 's-  
Gravenhage: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, 1959.

Wap. *Het Gezantschap van den Sultan van Achin A° 1602 aan Prins Maurits van Nassau en de oud Nederlandsche Republiek*, Rotterdam: H.Nijgh, 1862.

Wessels S.J., C. "*Portugeezen en Spanjaarden in den Indischen Archipel tot aan de komst van O.I. Compagnie 1515 – 1605*", di dalam F.W. Stapel (ed) *Geschiedenis van Nederlandsch-Indie*, deel II, Amsterdam: Joost van de Vondel, 1938.

Winstedt, R.O. *A History of Malaya*, Kuala Lumpur, Singapore: Marican & Sons, 1968.

-----, "*Notes on The History of Kedah*", *JMBRAS* Vol. XIV, part III, Singapore: Desember 1936.

-----, "*The Early Rulers of Perak, Pahang and Acheh*", *JMBRAS*, Vol. X, part I, January 1932.

Zainuddin, H.M. *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.

Zakaria Ahmad. (Ketua) *Pahlawan Nasional Cut Nyak Meutia*, Dep. P dan Proyek Biografi Pahlawan Nasional, 1978/1979.

-----, *Sekitar Kerajaan Atjeh Dalam Tahun 1520 – 1675*, Medan: Monora, 1972.

Zentgraaff, H.C. *Atjeh*, Batavia: tanpa nama penerbit, 1938.

## DAFTAR INFORMAN

- Aboe Bakar, Psf. Banda Aceh, lahir 1917, karyawan PDIA, pensiunan kantor Residen Aceh.
- Abdul Muis. Takengon, lahir 1928, Ketua Legiun Veteran Kabupaten Aceh Tengah.
- A.Gani Mutyara. Lahir 1923, Medan, ex. Staf Redaksi Majalah Aceh Sinbun dan Majalah Pahlawan.
- Al Amin, Kaan T. Meulaboh, lahir 4 April 1925, ex. Asisten Wedana Meulaboh Aceh Barat.
- Abdullah, Tgk. (75 tahun) pensiunan Hakim, Tanah Luas, Aceh Utara.
- Abdul Rani, Tgk. (73 tahun), pensiunan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara.
- Adam Ismail. Banda Aceh, pensiunan TNI, bekas Sekwilda Kotamadya Banda Aceh.
- Ali Basyah, T.H. lahir tahun 1911, ex Zelbestuurder, Suntyo dan Wedana.
- Ali Hasjmy, lahir 26 Maret 1914, Banda Aceh, bekas Gubernur Aceh dan Ketua IPI/BPI/PRI/Pesindo di Daerah Aceh.
- Ali Keureukon, T, umur 66 tahun, pensiunan dan bekas anggota BPH Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Amir Husin Al Mujahid, Tgk. lahir 1901, Idie, bekas Ketua Pemuda PUSA, Wakil Koordinator Pertahanan Sumatra.
- Amin, T.M. Banda Aceh, bekas Bendahara PB. PUSA.
- A. Mutalib. Langsa, lahir tahun 1916, ex. Pemuda PUSA.
- Bahagia Wahab, Drs. Tapak Tuan, lahir 15-1-1930, ex. anggota TP.
- Darwis, M.Takengon, lahir tahun 1921, ex. Komandan Sabotase Markas Pesindo Kabupaten Aceh Tengah.

- Djaminuddin. Tapak Tuan, lahir 1 Maret 1921, ex. anggota API.
- Djohan, T. Banda Aceh, lahir 1932, Pegawai Sekretariat DPRD Kota Madya Banda Aceh.
- Darul Aman. Takengon, ex Camat Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah.
- Hasan Syah, T. Lhok Seumawe (Aceh Utara), lahir tahun 1928, ex. Anggota MPR Republik Indonesia.
- Ismuha, Drs. SH. Medan, ex. PB PUSA dan Rektor IAIN Ar Raniry dan IAIN Sumatra Utara.
- Ibrahim Abduh. Banda Aceh, lahir tahun 1917, pensiunan Bupati Kabupaten Pidie, dan ex. PB PUSA.
- Ismail Arief. Kuala Simpang (Aceh Timur), lahir tahun 1914. ex. anggota PBH Kabupaten Aceh Timur.
- Ismail Usman, H. Simpang Ulim (Aceh Timur), ex. Seinedan.
- Ismail Muhammad, Lhok Seumawe, lahir 1917, pensiunan.
- Mohammad Syam. Tapak Tuan, lahir tahun 1914, ex. Bestuur Comisie Tapak Tuan.
- Muchlis Jusuf, H. Blang Pidie, lahir tahun 1915, ex. anggota Sidang Mahkamah Syariat Blang Pidie.
- Muhammad Hasan, Mr. T. Jakarta, lahir 4 April 1906 di Sigli Anggota Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ex. Gubernur Sumatera, Wakil Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia, ex. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan PDRI.
- Raja Iskandar, T. Meulaboh, lahir 2 - 2 - 1920, ex. Wakil Ketua BPI di Meulaboh.
- Saifoeddin Kadir. Takengon, lahir 1 September 1926, ex. Staf Penerangan TNI Divisi X.
- Soegondo Kartoprodjo, K. Medan, lahir di Yogya 15 Juli 1908, ex. Pimpinan Taman Siswa Aceh, anggota Perintis Kemerdekaan.

- Syhabuddin Razi, T. Medan, lahir 16 Juli 1928, ex. pejuang '45.
- Sufi Ismail, Tgk. umur 65 tahun, Indrapuri (Aceh Besar), ex. anggota Fujiwara Kikan.
- Usman Amin. Tapak Tuan, lahir Oktober 1922, ex. Wakil Komandan Kompi TKR Batalyon VIII, Resimen III Div. X.
- Usman Azis, Tgk. umur 70 tahun, Lhok Seumawe (Aceh Utara), ex. Bupati Aceh Utara yang pertama.
- Ya'kub Ali, Drs. T.H. Sigli, lahir 25 Maret 1917, ex. Pemuda PUSA.
- Zainal Abidin Usman, Takengon, lahir 1919, pensiunan Sosial Markas Legiun Veteran, Kabupaten Aceh Tengah.
-



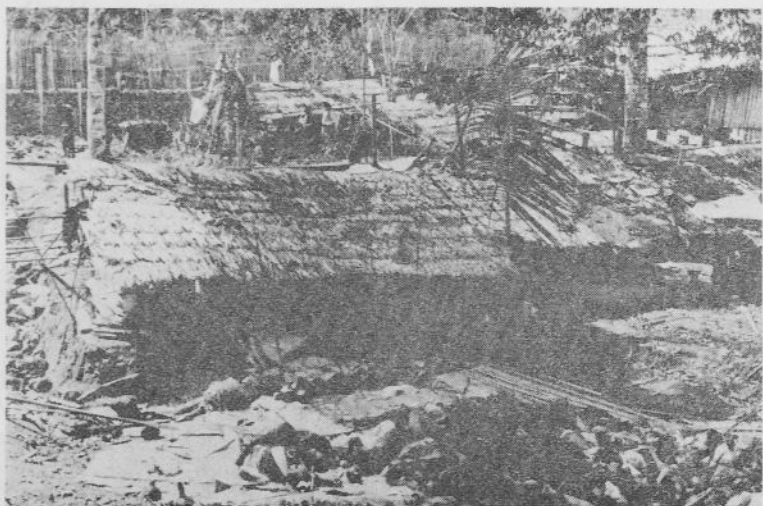
*Major General J.H.R. Kohler, pemimpin pasukan Belanda yang pertama kali mendarat di Aceh pada tanggal 6 April 1873 Belanda berhasil merebut mesjid Raya Baiturrahman yang dijadikan kubu pertahanan oleh pejuang-pejuang Aceh pada tanggal 14 April 1873, tetapi J.H.R. Kohler tewas tertembak dalam pertempuran ini, sehingga seluruh pasukan Belanda ditarik kembali ke Batavia.*



*Jenderal van Heutsz ketika memimpin serangan ke kubu pertahanan Batee ILIEK Samalanga, yang dipertahankan dengan gigih oleh pejuang-pejuang Aceh, tetapi akhirnya benteng ini dapat juga direbut oleh pasukan Belanda pada tanggal 3 Pebruari 1901. Usaha Belanda untuk merebut kubu tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh Jendral K.van der Heijden pada Agustus 1877 dan Agustus 1880 dan oleh Mayor W.A.Schmilan pada tahun 1880 juga, tapi semuanya gagal.*



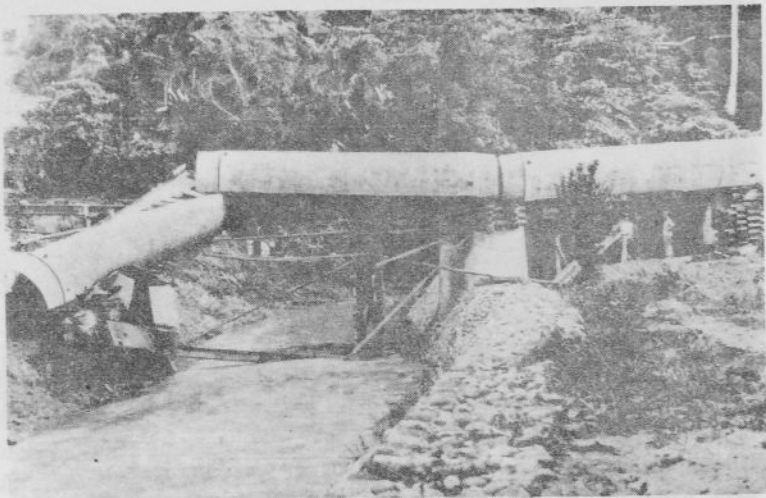
*Perlawanan yang diberikan oleh pejuang-pejuang Aceh pada waktu pasukan Kohler mendarat di Pantai Ceureumen di sekitar Ulee Lheue.*



*Kuburan massal para pejuang yang tewas di kubu Kuta Reh Aceh Tenggara. Kubu ini berhasil direbut oleh pasukan Van Daalaen pada tanggal 14 Juni 1904. Jumlah korban 516 orang, di antaranya 248 orang wanita dan anak-anak.*



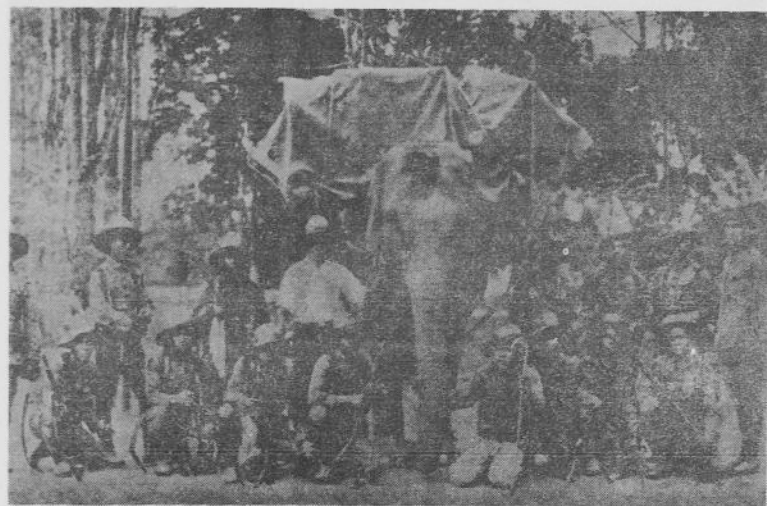
*Korban pembantaian di Kampung Likat Aceh Tenggara oleh pasukan, Belanda di bawah pimpinan Van Daalen. Sebanyak 432 orang tewas, termasuk 212 wanita dan anak-anak.*



*Sebuah jembatan kereta api yang dirusakkan oleh pejuang-pejuang Aceh yang dipimpin oleh Cut Meutia.*



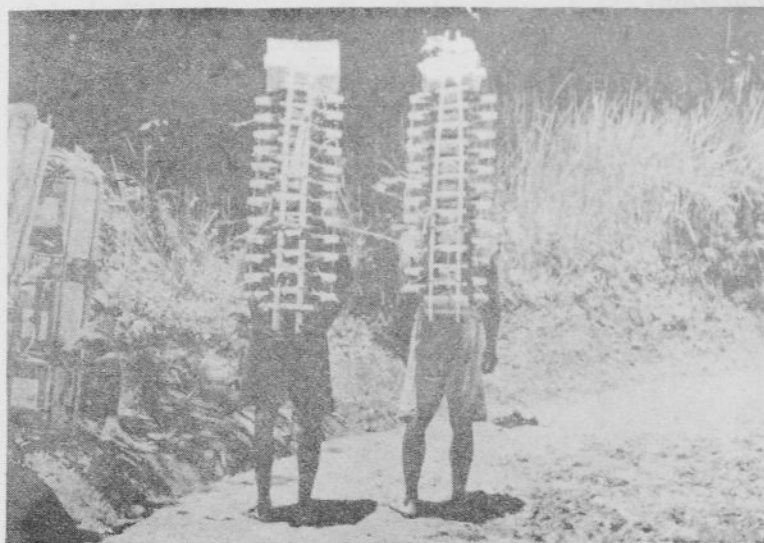
*Pengrusakan jalan-jalan kereta api yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Aceh di Aceh Utara dibawah pimpinan Pang Nanggrona, suami srikandi Cut Meutia.*



*Sepasukan Korps Marsose sejenak bergambar bersama gajah yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang keperluan perang.*



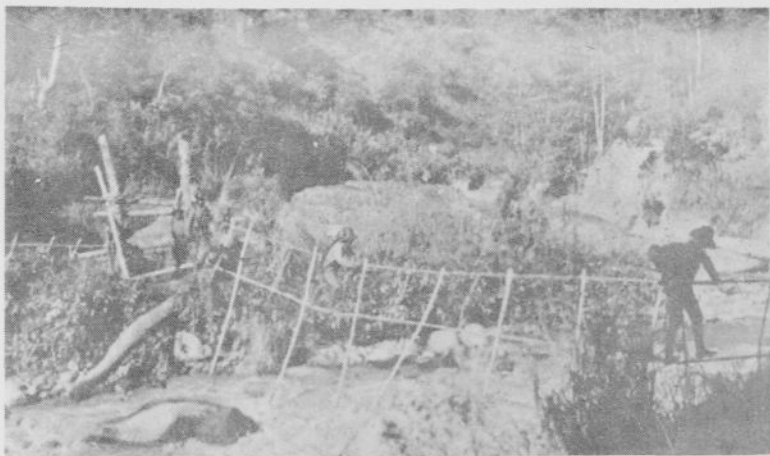
*Pengangkutan barang-barang keperluan pasukan Belanda di Aceh dengan menggunakan gajah. Pada gambar ini kelihatan Korps Marsose menyeberangi sungai melalui jembatan gantung tradisional, sedangkan gajah yang membawa barang-barang kelihatan sedang menyeberangi sungai.*



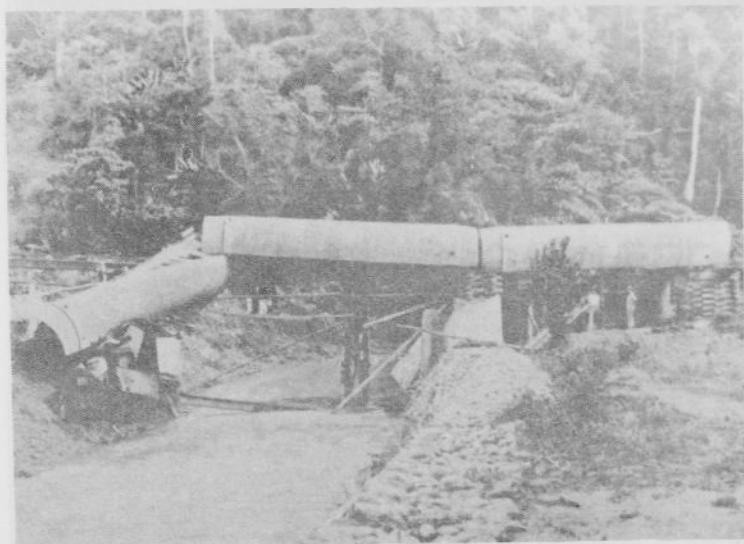
*Alat angkutan tradisional lainnya yaitu "jangkat" yang sering dipakai di daerah pegunungan Aceh, dipergunakan juga selama Perang Belanda di Aceh berlangsung.*



*Untuk membawa keluarga serdadu Belanda dari satu tempat ke tempat lain di daerah pegunungan Aceh, "jangkat" sebagai alat angkutan memegang peranan penting.*



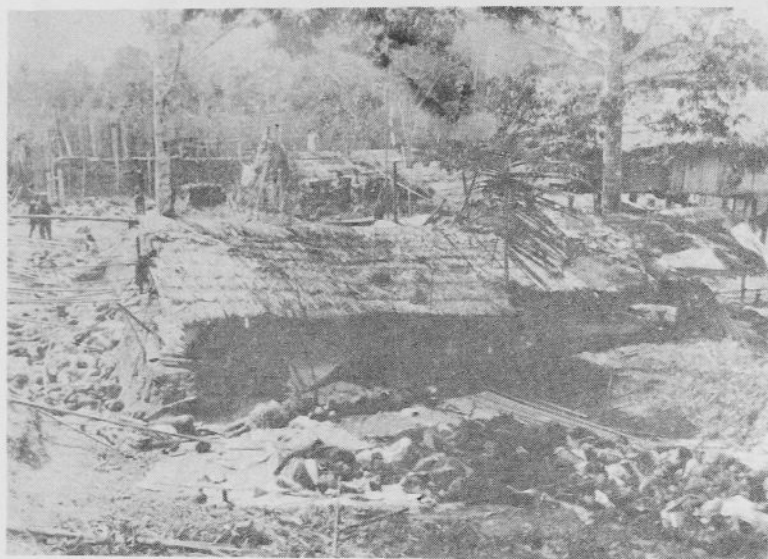
*Sejenis jembatan gantung tradisional yang terbuat dari rotan yang hingga sekarang masih kita jumpai di pedalaman Aceh, telah merupakan sarana perhubungan penting selama Perang Belanda di Aceh berkecamuk.*



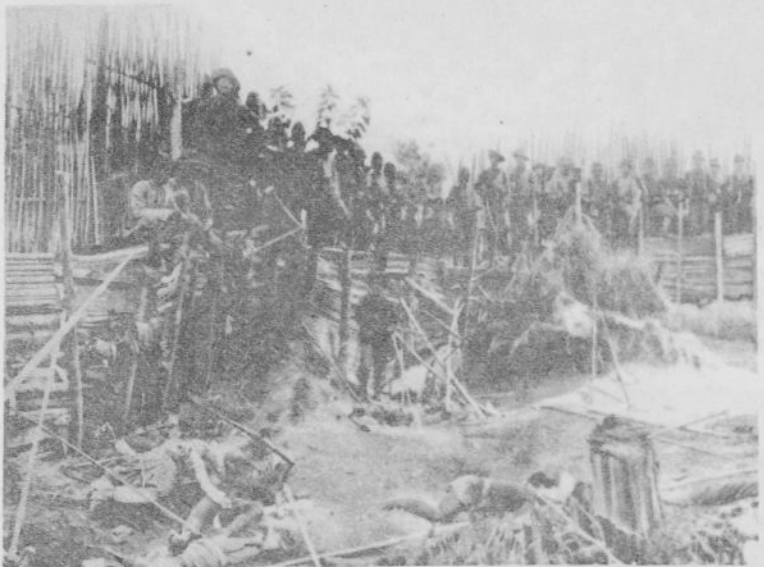
*Sabotase terhadap sarana yang dipergunakan untuk keperluan perang merupakan pemandangan sehari-hari yang tak asing lagi. Selama perang berlangsung. Sebuah jembatan kereta api yang dirusakkan oleh pejuang-pejuang Aceh dapat kita lihat pada gambar di atas.*



*Dalam suasana medan yang menyeramkan seperti terlihat pada gambar di atas, pasukan Belanda harus menghadapi orang-orang Aceh yang mempertahankan tiap jengkal tanah airnya.*



*Penguburan massal para pejuang yang gugur di benteng Kuto Reh Aceh Tenggara.*



*Keadaan di benteng pertahanan Kuto Reh yang ditumpas pasukan Van Daalen pada tanggal 14 Juli 1904. Jumlah korban 516 orang, di antaranya 248 orang wanita dan anak-anak. Pada gambar terlihat satu-satunya korban yang masih hidup, yakni seorang anak kecil. Berdiri paling kiri atas adalah Van Daalen pemimpin pasukan Belanda yang di Negeri Belanda sendiri dikenal sebagai "Penyebarkan Maut" di Aceh.*



*Sultan Muhammad Daud Syah, Sultan terakhir kerajaan Aceh yang dipaksa menyerah sesudah anak dan isterinya disandra oleh pasukan Belanda. Kelihatan sedang menuju ke meja perundingan (no. 3 dari kiri yang berbaju putih). Di sebelah kanan sultan adalah Kolonel Van Daalen yang terkenal namanya karena melakukan Long March bersama pasukan Marsose ke Aceh Tengah/Tenggara.*









